

NASKAH AKADEMIK

HASIL PENELITIAN

**REORGANISASI RUANG KAPITAL, PEMBANGUNAN, DAN
KRISIS SOSIAL-EKOLOGIS DI WILAYAH III JAWA BARAT**

TIM PENELITI

Fuad Faizi, ID 20200716071014 (KETUA)

Alfian Febriyanto, ID 20200702081041 (ANGGOTA)

Intan Tsurroya, NIM 1808305002 (MAHASISWA)



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

TAHUN 2022

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Peneliti : 1. Dr. Fuad Faizi, M.A.,
2. Alfian Febriyanto, M.Ant
3. Intan Tsuroyya

Judul Penelitian : **REORGANISASI RUANG KAPITAL, PEMBANGUNAN,
DAN KRISIS SOSIAL-EKOLOGIS DI WILAYAH III
JAWA BARAT**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan karya hasil sendiri, benar keasliannya, bukan skripsi, tesis, ataupun disertasi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata dikemudian hari karya ini terbukti merupakan hasil plagiat atau penjiplakan atas hasil karya orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawab sekaligus menerima sanksi sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku termasuk mengembalikan seluruh dana yang telah saya terima kepada LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.

Cirebon 1 Desember 2022

Peneliti,



Dr. Fuad Faizi, M.A.,
NIP. 198006042009121003

Naskah Akademik ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2022

HALAMAN PENGESAHAN

NASKAH AKADEMIK HASIL PENELITIAN DOSEN

Judul Penelitian : Reorganisasi Ruang Kapital, Pembangunan, Dan Krisis Sosial-Ekologis Di Wilayah Iii Jawa Barat

Klaster Penelitian : Penelitian Terapan Proyek Strategis Nasional

Ketua Peneliti

Nama Lengkap : Dr. Fuad Faizi, M.A.,

Jenis Kelamin : Laki-Laki

NIDN/NIP : 2004068002/198006042009121003

Disiplin Ilmu : Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat

Pangkat/Golongan : Penata/IIIc

Jabatan : Lektor

Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/HKI

Alamat Rumah : Perum Taman Kota Blok D5 No 8 Desa Ciperna Kec. Talun Kab Cirebon

E-mail :

Jumlah Anggota Peneliti

Nama Anggota 1 : Alfian Febriyanto, M.Ant

Nama Anggota 2 : Intan Tsurroya

Lokasi Penelitian : Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan

Jangka Waktu Penelitian : Enam Bulan

Sumber Dana Penelitian : DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2022

Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 30.300.000,00

Cirebon, 1 Desember 2022

Ketua LP2M

Dr. H. Ahmad Yani, M.Ag
NIP. 19750119 200501 1 002

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang reorganisasi ruang kapital, pembangunan, dan krisis sosial-ekologis di Wilayah III Jawa Barat. Reorganisasi ruang kapital dilihat dari krisis sosial-ekologis pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di Wilayah III Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui reproduksi ruang kapital krisis sosial ekologis dampak pembangunan proyek strategis nasional di Wilayah III Jawa Barat.

Penelitian ini menggunakan teori eksklusi sosial yang menggambarkan ketidakadilan yang terjadi akibat adanya efek samping pembangunan proyek strategis nasional di Wilayah III Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Unit analisisnya ialah warga terdampak pembangunan proyek strategis nasional.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Wilayah III Jawa Barat masuk dalam master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Pembangunan proyek strategis nasional di Wilayah III Jawa Barat cenderung neoliberalistik yang mengakibatkan krisis sosial-ekologis dan eksklusi sosial pada masyarakat terdampak. Proyek bandara internasional Jawa Barat (BIJB) di Majalengka mengakibatkan krisis sosial seperti minimnya keterjaminan alih pekerjaan dari pertanian ke industri perdagangan dan/atau jasa. Krisis ekologis menyebabkan berkurangnya wilayah resapan air, penyempitan saluran air, dan terjadinya banjir. Kilang Pertamina RU-VI dan Industri Petrokimia di Balongan Indramayu menyebabkan krisis sosial ekologis seperti hilangnya mata pencaharian petani, petambak, dan nelayan akibat ekspansi industri petrokimia serta rusaknya ekosistem laut. Bendungan Kuningan di Kabupaten Kuningan mengakibatkan relokasi warga seta menghilangkan sebagian mata pencaharian warga. Kondisi ini menyebabkan banyaknya pengangguran dan ganti untung yang tidak sesuai ekspektasi. PLTU Cirebon mengakibatkan dampak sosial ekologis seperti berkurangnya hasil tangkapan nelayan karena limbah batu bara, rusaknya ekosistem laut, dan polusi udara.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Proyek strategis nasional di Wilayah III Jawa Barat berdampak positif pada percepatan perekonomian nasional. Akan tetapi, pembangunan proyek strategis nasional ini cenderung neoliberalistik. Sehingga, yang paling diuntungkan adalah investor dibandingkan masyarakat. Proyek strategis nasional memiliki efek samping berupa krisis sosial ekologis pada masyarakat terdampak langsung pembangunan. Warga terdampak langsung proyek strategis nasional (PSN) mengalami eksklusi sosial berupa ketidakadilan.

Kata Kunci: Reorganisasi Ruang Kapital, Dampak Sosial-Ekologis, Proyek Strategis Nasional, Eksklusi Sosial

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahman dan rahimNya, karunia dan hidayahNya, sehingga naskah akademik penelitian berjudul "Reorganisasi Ruang Kapital, Pembangunan, Dan Krisis Sosial-Ekologis Di Wilayah III Jawa Barat" dapat tersusun dan diterbitkan. Shalawat serta salam kami panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, serta umatnya karena berkat beliau kita memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian naskah akademik penelitian ini.

Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) merupakan salah satu unit pelaksana kegiatan akademik IAIN Syekh Nurjati. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, LP2M berupaya menyusun kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu akademiknya salah satunya melalui program penelitian dosen. Guna memberikan kemudahan bagi dosen dalam melakukan penelitian maka LP2M menyusun pedoman teknisnya, baik terkait prosedur, persyaratan administrasi, maupun format penyusunannya. Penyusunan naskah akademik penelitian ini selain mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh LP2M IAIN Syekh Nurjati, juga mempertimbangkan hasil analisis dan kebutuhan, sehingga dinilai perlu adanya penyesuaian.

Diharapkan naskah akademik penelitian ini meningkatkan kualitas mutu penelitian di IAIN Syekh Nurjati. Akhirnya, semoga naskah akademik penelitian ini dapat berfungsi dengan baik penelitian di IAIN Syekh Nurjati.

Cirebon, Desember 2022

Penyusun,

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Penelitian

Halaman Pengesahan

Abstrak

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Kajian Teori
- B. Kajian Penelitian Yang Relevan
- C. Alur Pikir
- D. Pertanyaan Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
- E. Keabsahan Data
- F. Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Hasil Penelitian
- B. Pembahasan dan Temuan
- C. Keterbatasan Penelitian

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

- A. Simpulan
- B. Implikasi
- C. Saran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan dokumen MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) 2011-2025, pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama pengembangan industrialisasi Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011). Infrastruktur dijadikan sebagai prasyarat dasar agar investasi dan industrialisasi bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016), berencana membangun berbagai macam infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia selama kurun waktu 2015-2019. Jawa Barat, termasuk Wilayah III Ciayumajakuning merupakan salah satu provinsi yang menjadi wilayah tujuan pembangunan infrastruktur. Pembangunan wilayah III Ciayumajakuning dicanangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021).

Beberapa proyek strategis nasional yang telah dibangun di wilayah III Ciayumajakuning, Jawa Barat seperti Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Majalengka, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon I dan II, dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu. Proyek strategis nasional yang dibangun pada wilayah III Ciayumajakuning, Jawa Barat tersebut dinilai berdampak positif sebagai berikut, (1) percepatan, perluasan, peningkatan potensi pembangunan ekonomi wilayah; (2) peningkatan konektivitas nasional khususnya wilayah III Ciayumajakuning; dan (3) penguatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Proyek strategis nasional

tersebut digadang-gadang menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri, maju, adil dan makmur (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011).

Di Indonesia, pembangunan-pembangunan di atas dinarasikan sebagai usaha untuk pertumbuhan ekonomi (economic growth) bangsa, tetapi ia seringkali menguntungkan kelompok oligarki saja (Ridha, 2016). Berdasarkan logikanya, pertumbuhan ekonomi ini pada hakekatnya adalah pertumbuhan atau akumulasi kapitalisme global yang mengabaikan kondisi bio-fisikal dimana pembangunan-pembangunan itu dilakukan (Liodakis, 2018); (Tilzey, 2016). Selain itu, ekspansi ruang kapital ini ternyata diiringi dengan perluasan krisis sosial-ekologis di berbagai wilayah Indonesia (Yanuardi et al., 2014).

Dilihat dari sudut pandang berbeda, proyek strategis nasional yang dicanangkan melalui masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) memberikan pengaruh laten pada masyarakat terdampak. Proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Majalengka pada tahun 2016 telah memakan 5000 hektar lahan di 11 desa. Lahan seluas 1800 hektar diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas bandara dan *aerocity* (Kementerian Perhubungan, 2005). Salah satu masyarakat terdampak pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) berasal dari Desa Sukamulya. Petani Desa Sukamulya bermata pencaharian dari lahan-lahan pertanian produktif. Mereka menolak menjual tanahnya, sehingga terjadi bentrok antara aparat dan warga. Kejadian tersebut memicu perpecahan hubungan sosial (Akbar, 2016), (Syifa, 2017). Ironinya, meski pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dikebut, sekarang sepi pengunjung (Dzulfaroh, 2021).

Sementara itu, proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon II menerima gugatan dari warga terdampak di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung bernomor 124/G/LH2016/PTUN/BDG (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Pembangunannya ditolak karena warga trauma pada pembangunan PLTU Unit I. Pada saat pembangunan PLTU Unit I,

penghidupan warga yang mengandalkan hasil laut menurun. Sehingga, pembangunan PLTU II ditolak karena warga trauma (Iqbal, 2017). Hampir semua warga di sekitar lokasi PLTU Cirebon Unit II bermata pencaharian sebagai nelayan yang hidup dari memanfaatkan hasil.

Pemerintah bersikukuh melanjutkan proyek pembangunan PLTU Cirebon Unit II walaupun mendapatkan penolakan warga. Puncaknya ketika warga memenangkan gugatan pada 19 April 2017 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Pengadilan memerintahkan agar izin lingkungan PLTU Cirebon II dihentikan (Wardani, 2017). Namun, kemenangan warga hanya sesaat. Di tengah proses banding, Pemerintah Jawa Barat justru mengeluarkan izin lingkungan baru terhadap proyek PLTU Cirebon II, meskipun menyalahi Rencana Tata Ruang Wilayah Cirebon. Dalihnya, RTRW Daerah harus mengikuti RTRW Nasional. Sebab, kawasan tersebut masuk dalam proyek strategis nasional.

Pembangunan PLTU Indramayu Unit II juga menghadapi gugatan dari warga Desa Mekarsari karena cacat substantif. Warga baru mengetahui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PLTU Indramayu II yang terbit tahun 2010 pada tahun 2017. Informasi AMDAL PLTU Indramayu II didapatkan melalui proses permohonan informasi kepada badan permodalan dan perizinan Indramayu. Intinya, pembangunan PLTU Indramayu II tersebut tidak melalui proses sosialisasi ke warga sekitar. Warga menolak karena dampak kesehatan yang dialami. Selain itu, alasan warga menolak pembangunan PLTU Indramayu II karena dianggap merusak ekosistem laut, sehingga berdampak pada penurunan hasil tangkapan nelayan.

Proyek-proyek pembangunan pemerintah yang dicanangkan dalam MP3EI betul memberikan dampak positif, namun sekaligus membawa pengaruh negatif secara langsung pada masyarakat terdampak. Sehingga, proyek-proyek strategis nasional pemerintah tampaknya kurang memperhitungkan dampak sosial-ekologis, terutama di Wilayah III Jawa Barat. Oleh karena itu, pengetahuan yang mendalam terhadap (potensi) dampak sosial-ekologis diperlukan, terutama sebagai bahan

acuan, pertimbangan dan evaluasi terhadap (rencana) proyek-proyek pembangunan yang sudah atau akan berjalan. Oleh sebab itu, penelitian tentang reorganisasi ruang kapital, pembangunan, dan krisis sosial-ekologis di Wilayah III Jawa Barat sangat perlu dilakukan. Secara khusus, penelitian ini hendak melakukan diagnosa atas krisis sosial-ekologis yang sedang terjadi untuk kemudian memahami “*the coming crisis*” (krisis yang akan datang) di Wilayah III Jawa Barat (Craig, 2018).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proyek pembangunan MP3EI, Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Segitiga Rehana di Wilayah III Jawa Barat menjadi bentuk dari (re)produksi ruang kapital?
2. Bagaimana proyek-proyek pembangunan di Wilayah III Jawa Barat itu telah dan akan diimplementasikan?
3. Bagaimana proyek-proyek pembangunan telah dan akan menyebabkan krisis sosial-ekologis dan ekonomis di Wilayah III Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Membongkar (re-)produksi) ruang kapital dalam kebijakan proyek pembangunan MP3EI, PSN, dan Segitiga Rehana di di Wilayah III Jawa Barat.
2. Melacak dan menganalisis implementasi dan proyeksi dari proyek-proyek pembangunan di atas di Wilayah III Jawa Barat.
3. Mendiagnosa krisis sosial-ekologis yang telah terjadi dan dan memprediksi krisis yang akan terjadi wilayah III Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritik maupun praktik.

1. Manfaat Teoritik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang sosiologi, antropologi, maupun lingkungan.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan di bidang penelitian yang sejenis dan/atau sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan bagi para pembaca, mahasiswa, dan peneliti tentang Reorganisasi Ruang Kapital, Pembangunan, Dan Krisis Sosial-Ekologis Di Wilayah Iii Jawa Barat.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Warga Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh kepada masyarakat luas mengenai kontribusi hadis dalam menyukseskan program kota iklim Cirebon melalui upaya mitigasi dan adaptasi akibat perubahan iklim Reorganisasi Ruang Kapital, Pembangunan, Dan Krisis Sosial-Ekologis Di Wilayah Iii Jawa Barat.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional di berbagai wilayah Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian terkait proyek pembangunan di Wilayah III Jawa Barat telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Proyek pembangunan yang pernah diteliti oleh para peneliti seperti Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan *Aerocity* Kertajati dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Cirebon. Penelitian terkait proyek Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan *Aerocity* Kertajati pernah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti (Yuliawati, 2016); (Tjahjono & Yuliawati, 2017); (Suryadi et al., 2018); (Syafarudin & Mulyana, 2019); (Sari & Kushardono, 2019); (Hermanto, 2021); dan (Rochman et al., 2021).

Yuliawati meneliti *modal share* dalam *demand forecasting* BIJB. Ia menguraikan empat skenario yang ditawarkan terkait kemungkinan perpindahan penumpang angkutan udara di BIJB. Keempat skenario memiliki preferensi nya tersendiri tergantung pada kondisi tiap-tiap skenario (Yuliawati, 2016). Penelitian terkait proyek Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan *Aerocity* Kertajati yang dilakukan oleh Yuliawati berbeda dengan fokus penelitian peneliti. Penelitian peneliti membahas reorganisasi ruang kapital, pembangunan, dan krisis sosial ekologis BIJB yang didirikan di wilayah III Ciayumajakuning.

Tjahyono dan Yuliawati dari puslitbang kementerian perhubungan meneliti BIJB dan Potensi Kertajati sebagai *Aerocity*. Tjahyono dan Yuliawati menyebutkan jika tidak mencermati luasan penawaran tata ruang dengan baik maka dapat berefek pada terjadinya *urban sprawl* (Tjahjono & Yuliawati, 2017). Penelitian Tjahyono dan Yuliawati berkaitan dengan penelitian peneliti. Jika Tjahyono dan Yuliawati meneliti potensi pembangunan BIJB yang dapat menyebabkan *urban sprawl*, maka peneliti meneliti reorganisasi ruang kapital pada pembangunan BIJB yang menyebabkan dampak sosial-ekologis. Kedua penelitian ini saling berkaitan sebab berusaha melengkapi satu sama lain.

Suryadi, Chrysanti, Nurnadiati, Adityawan, dan Kuntoro melakukan studi tentang daya dukung sumber daya air untuk daya dukung BIJB dan *Aerocity* Kertajati. Hasil studi mereka menyebutkan bahwa, berdasarkan simulasi model *water evaluation and planning* (WEAP) Sungai Cimanuk dapat memenuhi kebutuhan air hingga tahun 2040 (Suryadi et al., 2018). Penelitian Suryadi, Chrysanti, Nurnadiati, Adityawan, dan Kuntoro berbeda dengan penelitian peneliti. Penelitian mereka menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif.

Syafarudin dan Mulyana mengkaji strategi perumusan PT BIJB dalam bisnis *Aerotropolis* menggunakan strategi model Wheelen and Hunger. Strategi ini mengevaluasi faktor eksternal dan internal, lalu menentukan arah strategis menggunakan matriks SWOT (Syafarudin & Mulyana, 2019). Penelitian Syafarudin dan Mulyana memberikan arahan operasional sistematis pada pengelolaan BIJB. Disisi lain, mereka mengharapkan peneliti lain melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengembangan *Airport City/ Aerotropolis* tersebut. Berdasarkan rekomendasi penelitian Syafarudin dan Mulyana inilah peneliti memosisikan diri untuk meneliti dampak sosial ekologis dalam pembangunan *Aerotropolis* di sekitar BIJB.

Sari dan Kushardono dari Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN menganalisis dampak pembangunan infrastruktur BIJB terhadap alih fungsi lahan pertanian melalui citra satelit resolusi tinggi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi penurunan luasan sejak 2013-2018, yaitu 5.822,80 ha menjadi 5.347,30 ha. Dengan demikian telah terjadi penurunan luasan dari tahun ke tahun (Sari & Kushardono, 2019). Penelitian yang dilakukan peneliti melengkapi penelitian Sari dan Kushardono. Jika penelitian mereka memanfaatkan teknologi untuk melihat penurunan luasan lahan pertanian dari tahun ke tahun, maka penelitian peneliti mengkaji dampak penurunan luasan lahan pertanian secara langsung pada masyarakat.

Penelitian ekologis terhadap Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan *Aerocity* Kertajati pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Rochman, Meilina, fajriati, Amalia, dan Subana meneliti ekologi administrasi pada dampak pembangunan BIJB. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa ditinjau dari beberapa aspek faktor ekologi administrasi cukup memberikan dampak positif (Rochman et al., 2021). Penelitian mereka nampak tidak berimbang sebab terlalu fokus pada dampak positif pembangunan BIJB. Padahal, berdasarkan fakta dilapangan banyak sekali masyarakat terdampak yang mengalami kerugian akibat dibangunnya BIJB (Akbar, 2016), (Syifa, 2017), (Iqbal, 2017), (Hermanto, 2021). Penelitian peneliti berbeda dengan penelitian Rochman, Meilina, Fajriati, Amalia, & Subhan. Peneliti berusaha melihat masalah ekologis di BIJB secara holistik. Penelitian ini tidak hanya melihat sisi positifnya saja, namun juga sisi negatifnya.

Hermanto meneliti dampak pembangunan BIJB menggunakan kajian *green political theory*. Hasil kajiannya menyebutkan bahwa, pengalihan fungsi lahan pertanian mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Dampaknya, terjadi kebisingan, terganggunya ketersediaan air, pencemaran udara dan kualitas pertanian memburuk. Negara sebaiknya memberi kesempatan kepada warga kolektif dalam proses pembuatan kebijakan publik (Hermanto, 2021). Penelitian yang dilakukan peneliti melengkapi penelitian Hermanto. Peneliti juga meneliti ekspansi ruang kapital yang mengiringi dampak sosial ekologis pada pembangunan BIJB.

Penelitian tentang proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Cirebon telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti penelitian (Muhaimin et al., 2015); Dede, (Widiawaty, Nurhanifah, Ismail, Artati, et al., 2020); dan (Widiawaty, Nurhanifah, Ismail, & Dede, 2020).

Penelitian Muhaimin, Sugiharto, dan Suratman dilakukan melalui upaya simulasi polusi udara pada aktivitas PLTU Cirebon. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konsentrasasi maksimum untuk semua parameter masih di

bawah baku mutu yang telah ditetapkan. Berdasarkan Simulasi yang dilakukan menunjukkan konsentrasi Maksimum SO_x sebesar $52,95 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan NO_x sebesar $44,86 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Tentu saja, simulasi polusi udara pada aktivitas PLTU Cirebon harus dilakukan secara berkala untuk menguji tingkat polutannya (Muhaimin et al., 2015). Penelitian Muhaimin, Sugiharto, dan Suratman berbeda dengan penelitian peneliti. Peneliti meneliti dampak polusi udara pada masyarakat terdampak aktivitas PLTU Cirebon.

Adharani meneliti penataan dan penegakan hukum lingkungan pada pembangunan infrastruktur dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada PLTU II Cirebon. Adharani menyebutkan bahwa Pembangunan PLTU II Cirebon tidak sesuai dengan tujuan SDGs pada poin kesejahteraan, pembangunan berkelanjutan, dan pelestarian sumber daya alam. Selain itu, pembangunan PLTU II Cirebon tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Lebih parahnya, penyusunan AMDAL tidak melibatkan masyarakat. Alhasil, pengadilan mengabulkan gugatan dan memerintahkan pencabutan izin pembangunannya. Akan tetapi, tidak lama setelah itu diterbitkan izin baru untuk melanjutkan pembangunannya (Adharani, 2017). Penelitian peneliti dengan penelitian Adharani saling berkaitan satu sama lain, sebab sama-sama mengkaji pembangunan PLTU II Cirebon. Akan tetapi, penelitian peneliti berbeda dengan penelitian Adharani. Jika ia meneliti pada aspek penataan dan penegakan hukum lingkungan, maka peneliti meneliti tentang reorganisasi ruang kapital yang terjadi pada masyarakat terdampak.

Dede, Widiawaty, Nurhanifah, Ismail, Artati, Ati, Ramadhan meneliti estimasi perubahan kualitas udara berbasis citra satelit penginderaan jauh di sekitar PLTU Cirebon. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa, PLTU Cirebon menyumbang peningkatan kadar CO sebesar $1,25 \text{ mg}/\text{l}$ pada rentang yang luas. Pada parameter kualitas udara lainnya seperti PM10, SO2 dan NOx mengalami penurunan (Widiawaty, Nurhanifah, Ismail, Artati, et al., 2020). Penelitian peneliti berbeda dengan penelitian Dede, dkk. Penelitian yang

dilakukan peneliti dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggali data secara langsung di masyarakat terdampak pembangunan PLTU Cirebon.

Penelitian Widiawaty, Nurhanifah, Ismail, dan Dede berkaitan dengan dampak PLTU Cirebon terhadap kualitas air di perairan Cirebon. Hasil penelitian mereka menunjukkan adanya pengaruh terhadap perubahan kualitas air di perairan Cirebon. Perubahan kualitas air ditunjukkan dengan peningkatan konsentrasi TSS dan SST yang signifikan disertai dengan penurunan kadar klorofil-A dan tingkat salinitas. Perubahan kualitas air perairan juga mengganggu habitat biota laut dan menyebabkan nelayan kesulitan mendapatkan tangkapan (Widiawaty, Nurhanifah, Ismail, & Dede, 2020). Penelitian peneliti berbeda dengan penelitian Widiawaty, dkk. Penelitian Widiawaty, dkk menggunakan pendekatan ilmu lingkungan dengan penggalan data melalui penginderaan satelit. Sedangkan penelitian peneliti menggali data secara langsung di masyarakat.

Penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti diatas sama-sama meneliti tentang berbagai proyek strategis nasional yang dibangun di wilayah III Ciyumajakuning, Jawa Barat. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut berbeda fokus kajian, sehingga tiap-tiap kajian saling melengkapi satu sama lain. Berdasarkan pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan, belum pernah dilakukan penelitian tentang reorganisasi ruang kapital, pembangunan, dan dampak sosial ekologis pada proyek percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia khususnya wilayah III Ciyumajakuning, Jawa Barat. Oleh sebab itu, penelitian tentang reorganisasi ruang kapital, pembangunan, dan dampak sosial ekologis pembangunan proyek infrastruktur di wilayah III Ciyumajakuning, Jawa Barat penting dilakukan.

B. Kajian Teori

Eksklusi Sosial

Konsep eksklusivitas sosial digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Eksklusivitas sosial didefinisikan sebagai *”proses dimana kelompok-kelompok tertentu secara sistematis dirugikan karena mereka didiskriminasi berdasarkan etnis, ras, agama, orientasi seksual, kasta, keturunan, jenis kelamin, usia, kecacatan, status HIV, status migran atau tempat tinggal mereka. Diskriminasi terjadi di lembaga publik, seperti sistem hukum atau layanan pendidikan dan kesehatan, serta lembaga-lembaga sosial seperti rumah tangga”* (Departement for International Development, 2005). Kerugian yang dialami baik material, non-material, ekonomi, dan sosial. Hilary Silver, menyebutkan bahwa *“Eksklusivitas sosial sebagai proses dinamis pemecahan multidimensi progresif dari ikatan sosial di tingkat individu dan kolektif”*. Menurut Hilary Silver, eksklusivitas sosial menghalangi partisipasi penuh individu dan kolektif (komunitas, nasional, bahkan internasional) dalam aktivitas yang ditentukan secara normatif dalam masyarakat tertentu dan menolak akses ke informasi, sumber daya, kemampuan bersosialisasi, pengakuan, identitas, mengikis harga diri dan mengurangi kemampuan untuk mencapai tujuan pribadi. Singkatnya, eksklusivitas sosial adalah proses struktural isolasi sosial atau menghilangkan berbagai dimensi keterlibatan sosial (Silver, 2012). Hanya saja jika proses struktur isolasi sosial dilakukan secara sukarela maka akan sulit menyebutnya sebagai eksklusivitas sosial. Oleh sebab itu, eksklusivitas sosial berlaku jika terjadi di luar kendali subjek (individu atau kolektif) (Barry, 2002). Apa yang dikatakan Barry perlu ditelaah lebih lanjut. Kita harus berhati-hati pada proses struktur isolasi sosial secara sukarela, sebab bisa jadi individu atau kolektif yang melakukannya didasarkan pada reaksi atas perlakuan buruk yang didapatkan. Jika ini yang terjadi maka eksklusivitas sosial tetap terjadi.

Konsep eksklusivitas sosial terjadi pada aras kepemilikan secara horizontal, bukan terjadi secara vertikal. Eksklusivitas sosial kontras dengan ketimpangan sosial, sehingga memiliki logika yang berbeda. Seseorang atau kolektif yang terekklusivitas

secara sosial terpisahkan secara horizontal dari sistem yang melingkupinya. Sedangkan seseorang atau kolektif yang mengalami ketimpangan terpisahkan secara vertikal berdasarkan pada kelas-kelas sosialnya. Oleh sebab itu, Touraine mengatakan bahwa, eksklusi sosial itu adalah masalah masuk atau keluar, bukan naik atau turun (Touraine, 1991). Bagi Hilary Silver, masalah yang muncul pada masyarakat pasca industri bukan lagi ketimpangan, tetapi keadilan dan aturan main.

Hilary Silver mengemukakan bahwa dinamika eksklusi sosial dikonseptualisasikan pada aras mikro, meso, dan makro. Pada aras mikro, eksklusi sosial seringkali terjadi pada individu. Ekspresi eksklusi sosial yang muncul pada individu biasanya terjadi pada dislokasi sosial terus menerus atau kronis, baik kemiskinan maupun cacat non-materi lainnya. Pada aras meso, eksklusi sosial terkait dengan kelompok. Suatu kelompok tereksklusi secara sosial dari suatu masyarakat melalui penarikan perbedaan atau batas-batas sosial (Barth, 1969). Pada aras Makro, eksklusi sosial terjadi pada konteks nasional dan transnasional. Pada konteks nasional, negara kesejahteraan (*welfare state*) berkontribusi pada terjadinya eksklusi sosial. Negara mengeksklusi warga negaranya dari perlindungan yang seharusnya diberikan tanpa adanya satupun diskriminasi. Pada konteks transnasional, jika suatu negara tidak mau dikucilkan atau diisolasi dari arus perdagangan dunia, maka sebaiknya masuk kedalam keanggotaan walaupun hal tersebut merugikan (Hickey & du Toit, 2013).

C. Alur Pikir

Alur pikir menggambarkan inti dari alur pikiran penelitian. Tujuannya mempermudah pembaca dalam memahami isi keseluruhan dari penelitian ini. Guna menjelaskan reorganisasi ruang kapital, pembangunan, dan krisis sosial-ekologis di Wilayah III Jawa Barat, penelitian ini menggunakan pisau analisis eksklusi sosial. Penjelasan reorganisasi ruang kapital, pembangunan, dan krisis sosial-ekologis dilakukan dengan cara mengobservasi masyarakat yang terkena

dampak secara langsung proyek-proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Penggalan data melihat pada persoalan ketidakadilan yang diterima masyarakat akibat proyek strategis nasional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksklusi sosial guna menggali kerugian yang dialami masyarakat baik material, non-material, ekonomi, dan sosial akibat proyek strategis nasional. Setelah teridentifikasi, dilakukan pemeriksaan guna mengetahui dinamika eksklusi sosial pada aras mikro, meso, dan makro. Pada aras mikro, eksklusi sosial terjadi pada individu. Pada aras meso, eksklusi sosial terjadi pada kelompok-kelompok masyarakat. Pada aras makro, terjadi pada konteks nasional dan transnasional.

Dari penjelasan tersebut dapat dibangun proposisi bahwa telah terjadi eksklusi sosial pada aras mikro, meso, dan makro. Disisi lain, reorganisasi ruang kapital, pembangunan, dan krisis sosial-ekologis di Wilayah III Jawa Barat terjadi akibat adanya ketidakadilan pada masyarakat yang disebabkan oleh pembangunan proyek strategis nasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *case study* (Creswell, 2017). Metode kualitatif digunakan untuk melakukan kajian mendalam terhadap dampak sosial-ekologis dari pembangunan dengan mengambil beberapa kasus tertentu di Wilayah III Jawa Barat. Penggunaan metode penelitian kualitatif diyakini mampu menggali informasi, data, dan pengetahuan yang mendalam dari beberapa kelompok masyarakat terdampak dari proyek-proyek pembangunan yang ada di Wilayah III Jawa Barat. Sementara itu, metode case study bertujuan untuk mengeksplorasi proses eksklusi sosial yang terjadi di beberapa desa terdampak pembangunan. Sehingga, dinamika krisis sosial-ekologis dari proyek pembangunan di Wilayah III Jawa Barat bisa ditangkap dan dijelaskan secara detail dan mendalam. Unit analisis dalam kajian ini ialah masyarakat terdampak langsung proyek strategis nasional di Wilayah III Jawa Barat yang meliputi Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Objek penelitian ini adalah reorganisasi ruang kapital, pembangunan, dan krisis sosial-ekologis.

B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi/Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Peneliti memilih minimal satu desa di sekitar pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Wilayah III Jawa Barat untuk dijadikan lokasi penelitian.

Di desa-desa tersebut dilakukan observasi, wawancara, dan/atau diskusi mendalam bersama informan dan *interlocutor*. *Pertama*, di

8	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian								
9	Monitoring dan Evaluasi								
10	Laporan Antara								
11	Review Keluaran Penelitian								
12	Seminar Hasil Penelitian								
13	Laporan Akhir								
14	Publikasi Ilmiah								

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yaitu data dari informan dan data sekunder guna melengkapi data primer.

1. Sumber Data Primer

Data Primer diperoleh oleh peneliti melalui observasi dan wawancara dengan informan. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive*, yakni memilih subjek yang memiliki pengetahuan dan menguasai informasi yang berkaitan dengan penelitian. Penentuan informan juga menggunakan teknik *snowball* yang didasarkan pada ketercapaian data.

Pada sesi penggalan data primer, peneliti telah turun ke lapangan selama empat hari (6 - 9 Juli 2022) di dua desa (Sukamulya dan Bantarjati) Majalengka untuk melakukan wawancara dengan sembilan orang, yaitu (1) Rahman, (2) Wak Adut, (3) Karman, (4) Ika, (5) Fatur, (6) Carli, (7) Ciman, (8) Samin dan (9) Ian. *Kedua*, di empat desa (Desa Balongan, Sukaurip, Sukareja dan Majakerta) di Indramayu, peneliti telah tinggal dan membaaur dengan masyarakat di sana selama 10 hari (15 - 25 Juli 2022). Di beberapa

desa tersebut peneliti telah melakukan wawancara formal dan informal dengan 13 orang, yaitu (1) Haris, (2) Akso, (3) Kholik, (4) Rahmat, (5) Ikromin, (6) Mista, (7) Tarwan, (8) Erwin, (9) Carnata, (10) Agil, (11) Gunawan, (12) Ganda dan (13) Sudin. Sementara itu, di Kabupaten Kuningan dan Cirebon peneliti belum melakukan pengambilan data di lapangan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pelengkap yang berisikan berbagai macam informasi untuk melengkapi data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur-literatur, dokumen, arsip, foto, video, dan *voice recorder* dan lainnya yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi proses dan perkembangan krisis sosial-ekologis akibat pembangunan proyek-proyek strategis nasional. Beberapa informan dan *interlocutor* (terutama dari kelompok terdampak) diwawancarai dan diajak untuk berdiskusi. Data dikumpulkan menggunakan teknik pengamatan/observasi, wawancara mendalam (Endraswara, 2006), metode mencatat hasil pembicaraan dengan para informan, dokumentasi.

1. Observasi

Peneliti menggunakan teknik observasi guna melakukan pengamatan kepada sumber-sumber data di lapangan. Peneliti datang langsung ke lokasi penelitian saat proses penelitian berlangsung. Peneliti mengamati dan mencatat data secara berulang dan sistematis sejak observasi awal sampai penelitian selesai dilaksanakan. Hasil observasi yang telah dilaksanakan seperti aspek fisik, para pelaku, kegiatan yang dilangsungkan, waktu kegiatan, hingga sampai perasaan/emosi yang dirasakan oleh para kelompok terdampak pembangunan proyek-proyek strategis nasional.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan penulis menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah setempat karena perlu adanya ungkapan-ungkapan tertentu yang harus diungkap menggunakan bahasa lokal. Hasil wawancara ditranskrip. Hasil wawancara yang menggunakan bahasa lokal dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia guna mempermudah analisis. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tidak terstruktur dan terbuka sambil merekam menggunakan *voice recorder*, kemudian mentranskripsinya.

Wawancara dengan informan dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Informan yang diwawancarai ialah kelompok terdampak pembangunan proyek-proyek strategis nasional, kepala desa/pemerintah setempat

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan guna melengkapi data-data penelitian. Dokumentasi yang berhasil dihimpun selama proses penelitian berupa foto, video, *voice recorder*. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen penting dari informan dan mendokumentasikan melalui buku harian selama penelitian. Peneliti juga memanfaatkan materi audio-visual saat pengambilan data. Dokumentasi bermanfaat guna memperkuat validitas/keabsahan data.

E. Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa strategi validitas data. Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai kememadaianannya. Strategi validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dan *member checking*.

Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara. Strategi ini membantu peneliti dalam menyimpulkan data yang valid dan relevan. Selanjutnya membandingkan data observasi dan wawancara dengan dokumen yang didapatkan selama penelitian.

Member Checking dalam penelitian ini dilakukan dengan membawa kembali hasil penelitian dihadapan partisipan atau informan. Hal ini dilakukan untuk memeriksa kembali bahwa hasil penelitian tersebut sudah sesuai dengan data yang disampaikan.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Analisis data memakai pendekatan yang dikemukakan oleh (Creswell, 2017), yaitu diawali dengan mengumpulkan semua data mentah. Data yang telah terkumpul disusun dan dipersiapkan untuk dianalisis. Seluruh catatan lapangan hasil pengumpulan data dibaca dan dilihat ulang secara menyeluruh. Catatan lapangan dikategorisasi (koding data) berdasarkan konsep-konsep etik (dari peneliti) maupun konsep emik (dari tineliti), lalu disusun menjadi tema-tema maupun deskripsi-deskripsi. Kategorisasi yang telah dilakukan dicari kaitannya untuk saling dihubungkan. Setelah itu menginterpretasikan tema atau deskripsi tersebut untuk menghasilkan proposisi yang menjelaskan gejala yang diamati.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Kapitalisme, Pembangunan Neoliberal dan Krisis Sosial Ekologis

Modernisasi tidak bisa dilepaskan dari industrialisasi dan ekspansi kapitalisme yang mayoritas percaya telah bermula sejak zaman ‘Enlightenment’ (Kaika, p. 4). Perubahan dan kemajuan yang dicapai oleh modernisasi tergambar dalam tumbuh kembang dan perluasan kawasan industri yang dibarengi oleh aliran modal yang deras. Dan, momen realisasi dari modernisasi itu telah bermutasi ke dalam proses material, kultural, sosial, ekonomi dan politik dari kehidupan keseharian manusia (Kaika, p. 5). Fenomena ekspansi dari kapitalisme terutama melalui proyek-proyek pembangunan neoliberal ini telah mengglobal ke berbagai penjuru dunia dan merubah tatanan ekonomi masyarakat secara lokal, nasional, dan regional (Conway & Heynen, 2017: 3-4).

Dalam tatanan ekonomi global sekarang ini, ekonomi neoliberal dianggap sebagai wujud mutakhir dari kapitalisme. Dengan kata lain, neoliberalisme adalah kapitalisme (Heynen et al., 2007:287). Atau, neoliberalisme itu diartikan sebagai sebuah upaya reorganisasi terhadap kapitalisme secara institusional, politik dan ideologis, terutama dengan menginstitutionalkan doktrin ‘pasar bebas’ (Brenner & Theodore in Heynen et al., 2007: 153). Neoliberalisme telah juga dipahami sebagai “*an economic and political philosophy that questions, and in some versions entirely rejects, government interventions in the market and people’s relationships to the economy, and eschews social and collective controls over the behavior and practices of firms, the movement of capital, and the regulation of socio-economic relationships*” (Heynen et al., 2007: 3). Sementara itu, David Harvey (2005, dalam Heynen et al., 2007: 5) menggambarkan neoliberalisme sebagai “*a global project to restore, renew, and expand the*

conditions for capital accumulation and, in related fashion, to restore power to economic elites (or to establish it where it did not already exist)”.

Namun, Heynen et al., (2007: 4) telah memperingatkan bahwa definisi dan pemahaman tentang neoliberalisme harus terus berkembang mengikuti keberlanjutan dan keterkaitannya dengan berbagai transformasinya dalam berbagai rentang periode dan lokasi. Oleh karena itu, pemahaman yang stagnan atas neoliberalisme ini berbahaya. Oleh karena itu, Brenner & Theodore, (2007: 153) melihat neoliberalisme sebagai suatu proses, bukan suatu keadaan atau kondisi akhir yang tetap. Akan tetapi, neoliberalisme secara garis besar dilihat sebagai sebuah proses transformasi sosial dan spasial yang disetir oleh pasar (*market-driven*) yang disebut sebagai ‘*neoliberalization*’.

Satu hal yang pasti adalah neoliberalisme telah memiliki posisi ideologis yang dominan di dunia terutama melalui mekanisme dan institusi politik (seperti negara dan institusi keuangan global) yang mencoba merekonstruksi ulang relasi antara negara-pasar-masyarakat sipil. Akibatnya, neoliberalisme telah sukses menancapkan cengkeraman pengaruh dan dampaknya ke berbagai penjuru dunia terutama terlihat dari perluasan kesempatan investasi dan akumulasi kapital melalui perluasan produksi, sirkulasi dan pertukaran komoditas (Heynen et al., 2007). Kapitalisme global (*global capitalism*) ini salah satunya ditandai dengan globalisasi degradasi lingkungan atau biosfer (Conway & Heynen, 2006: 5). Selain itu, laju pergerakan neoliberalisme atau kapitalisme telah menjadi pendorong utama bagi rekonfigurasi (re-organisasi) tatanan sosial dan alam (*socio-natural systems*) (Heynen et al., 2007: 10). Namun, proses transisi dari rekonfigurasi sosio-natural itu tidak berlangsung secara mulus karena pada kenyataannya ia dipenuhi dengan pemaksaan, pertarungan politik, konfrontasi fisik dan manipulasi institusional secara sengaja (Heynen et al., 2007: 10). Misalnya, laju dampak proyek-proyek infrastruktur seperti bandara, jalan tol dan

bendungan telah memaksa hampir sepuluh juta orang terusir dari rumahnya setiap tahun (Cernea & McDowell, 2000).

Melalui proyek-proyek pembangunan neoliberal, kapitalisme global telah membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem dan rekonfigurasi sosio-natural. Misalnya, pada satu sisi pembangunan neoliberal itu telah membawa perubahan atau kemajuan secara fisik pada kawasan-kawasan urban, tetapi pada sisi lain ia telah menyebabkan kerusakan lingkungan di mana-mana. Dampak kerusakan sosial ekologis yang dibawa oleh kapitalisme global terhadap kawasan-kawasan lokal itu berlangsung secara cepat (*volatility*), tidak teratur (*unruliness*) dan tidak terbayangkan sebelumnya (*unpredictability*) (Conway & Heynen, 2006).

Jadi, kapitalisme atau neoliberalisme sebenarnya mengandung kontradiksi-kontradiksi secara inheren pada dirinya sebagaimana proyek-proyek pembangunan itu telah memberikan akses pada sebagian orang tetapi ia juga telah meng-eksklusi sebagian yang lain. Selain itu, kawasan yang mengambil manfaat atau keuntungan terbesar secara ekonomis dari pembangunan neoliberal itu adalah negara-negara maju (*the most advanced countries*), sedangkan negara-negara berkembang (seperti Indonesia) hanya menjadi penyedia layanan manufaktur dan produsen berbiaya murah (Walcott, 2006: 49). Tidak hanya itu, perluasan secara spasial dari perusahaan skala besar ke negara-negara berkembang tampak telah mengabaikan peran-peran dari aktor-aktor lokal, seperti masyarakat, bangsa dan negara tersebut (Walcott, 2006: 49). Oleh karena itu, Harvey (1970) menyatakan bahwa dari bentuk-bentuk spasial dan proses-proses sosial yang dihasilkan (dijalankan) oleh pembangunan neoliberalistik itu, kita bisa mengaitkannya dengan isu *social justice* (keadilan sosial), seperti bisa dilihat dari aling fungsi lahan, pembentukan kawasan kumuh perkotaan dan sirkulasi keuntungan ekonomis (Merrifield & Swyngedouw, 1996).

Secara singkat, penelitian ini meyakini bahwa dengan memperhatikan proses transformasi dan reorganisasi terhadap konfigurasi sosio-spasial yang sedang dijalankan oleh agenda pembangunan neoliberalistik terhadap kondisi-kondisi sosial dan alamiah, kita akan mampu melihat dampak-dampak sosio-naturalnya karena pada hakikatnya ia merupakan suatu proses yang berkesinambungan (sebab-akibat) dan bukan suatu keadaan yang berdiri sendiri (Swyngedouw, 1999: 445). Dikarenakan dampak-dampak kontradiktif yang dihasilkannya, banyak ilmuwan dan aktivis yang mulai mengkritik proyek-proyek pembangunan neoliberal (misalnya, pembangunan bendungan) dianggap telah mengakibatkan kerusakan sosial-ekologis dan, oleh karena itu, mereka mengajak untuk mempertimbangkan ulang pembangunan bendungan-bendungan yang ada (Rajendran 2000 seperti dikutip dalam Bose, 2007: 157).

2. **Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Segitiga Rebana: Mantra Pembangunan Neoliberal di Indonesia**

i. **Kebijakan Pembangunan Indonesia**

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 merupakan implementasi konsep *good governance* yang didukung oleh *World Bank* (Rivai & Bastari, 2019) Sebelum menerapkan MP3EI 2011-2025, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kerap kali menyampaikan gagasan terkait konsep *good governance* dalam berbagai forum. Melalui pidato sambutan Konferensi Teknologi dan Komunikasi untuk Indonesia 3-4 Mei 2005, SBY menyatakan keyakinan serta keinginannya bahwa teknologi informasi dapat menjadi andalan untuk mendorong performa bisnis serta meningkatkan efisiensi pelayanan pemerintah dalam pembangunan *good governance*. Pada peringatan hari lahir Pancasila ke-61, SBY juga menegaskan *good governance* sebagai bagian positif dari keberadaan “*the invisible hand*”, dan

globalisasi dipandang sebagai peluang yang baik serta menguntungkan dibandingkan menjadi ancaman atau keburukan. Pemikiran politik SBY tentang *good governance* juga ditunjukkan pada sidang DPR/MPR hingga forum PBB. Oleh karena itu, pembahasan proyek MP3EI tidak bisa mengabaikan kaitannya dengan konsep *good governance*.

Berbeda dengan konsep *government* yang menekankan peranan pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik, konsep *governance* lazim dipahami sebagai kerangka proses “tata kelola”. Dalam sebuah negara, demokrasi terletak pada pemerintahannya karena pemerintahan dipilih rakyat melalui proses politik. Dengan demikian, pemerintah diharapkan memiliki kekuasaan mengontrol wilayah, menjaga keamanan, menjaga pertahanan, dan pelayanan publik. Namun ketika pemerintahan Soeharto mengalami kegagalan dalam menyelesaikan permasalahan publik, muncul beragam wacana reformasi terhadap “tata kelola” pemerintahan. Permasalahan publik dinilai tidak bisa diselesaikan oleh “pemerintah”. Di sisi lain konsep *governance* dinilai mampu membuka ruang kepada publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan permasalahan publik. Seiring dengan gencarnya wacana reformasi pada tahun 1980-an, kemudian hadir diskursus terkait konsep *good governance* atau sering disederhanakan sebagai “tata kelola yang baik” (Prianto, 2011).

Istilah *good governance* dikenalkan oleh *World Bank* pada tahun 1989 melalui artikel yang berjudul “*Subsaharans Africa from Crisis to Sustainable Growth*” (Fadli, 2021; Prianto, 2011). Artikel tersebut menjelaskan 3 aktor utama yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan publik ialah (1) *state* (negara), (2) *market* (pasar), dan (3) *civil society* (masyarakat sipil) (Prianto, 2011). *World Bank* memberikan argumen bahwa kegagalan pembangunan di berbagai negara diakibatkan oleh “tata kelola” pemerintahan yang buruk/*bad governance*. *World Bank* menganggap

pemerintah sebagai aktor yang dominan dalam mengatur segala permasalahan publik sehingga solusinya adalah mengurangi peran pemerintah dan memberikan ruang kepada aktor lain yakni *market* dan *civil society* (Prianto, 2011).

Secara sederhana, *good governance* berarti “tata kelola yang baik”, namun “baik” bagi siapa? dan “baik” yang seperti apa? Konsep *good governance* dikenalkan lembaga-lembaga dunia sebagai “resep pembangunan” kepada negara-negara berkembang (Toussaint & Millet, 2019). Oleh karena itu definisi “baik” berbeda-beda sesuai dengan “resep pembangunan” yang diberikan lembaga-lembaga dunia seperti Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), *World Bank*, *United Nations Development Program* (UNDP), *International Monetary Fund* (IMF), dan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) (Arifin Rivai & Bastari, 2019). Konsep *good governance* menunjukkan kritik pada pihak pemerintah yang dianggap tidak menjalankan sistem demokrasi. Pemerintah menurut konsep *good governance* seharusnya selaras dengan logika neoliberalisme (Rivai & Bastari, 2019). Setidaknya kelima lembaga dunia tersebut memberikan definisi yang serupa terkait konsep *good governance* bahwa suatu negara perlu menerapkan sistem pemerintahan dengan komponen yang bersifat transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat sipil (Brenner dalam Rivai & Bastari, 2019). Komponen-komponen *good governance* tersebut dapat mendorong negara untuk membuka pasar bebas dengan memberi peluang privatisasi aset-aset nasional oleh perusahaan multinasional.

Kebijakan privatisasi yakni adanya perubahan kepemilikan publik dan pelayanan publik kepada sektor swasta. Privatisasi dapat mengurangi peran pemerintah dalam mengintervensi pasar sehingga mendorong terbukanya pasar bebas (Savas, 1987 dalam Maro’ah, 2008). Privatisasi menjalankan

prinsip berdasarkan komponen yang sama dengan konsep *good governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas. Keterlibatan masyarakat sipil oleh pihak swasta dimaksudkan agar pemerintahan dapat transparan dan akuntabel agar pasar dapat berjalan dengan efisien tanpa adanya monopoli maupun korupsi oleh pihak pemerintah. Oleh karena itu privatisasi berkontribusi dalam mempercepat penerapan *good governance* bagi agenda pembangunan internasional.

Good governance selalu didasari pada analisis positivisme sehingga negara-negara yang dianggap “buruk” perlu menggunakan “resep *good governance*” untuk mencapai kesejahteraan. Namun jika berdasarkan perspektif postkolonial, *good governance* justru menjadi salah satu “hambatan” bagi negara yang merdeka untuk “berdaulat”. Negara-negara dengan *bad governance* seperti negara kawasan Amerika Latin, Afrika, dan Asia mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan internasional berupa bantuan donor atau modal dengan resep *good governance* (Rivai & Bastari, 2019). Pada akhirnya negara-negara tersebut ketergantungan dengan lembaga finansial internasional seperti *World Bank* dan IMF. Dengan demikian, saat ini istilah *governance* mengalami distorsi dengan mereduksi pengertian *governance* sekedar berarti “tata kelola”.

Government tanpa *governance* akan semakin lalim karena mengabaikan konsep konstitutif atau proses bersama dengan pihak lain. Apabila segalanya dijalankan sendiri oleh pemerintah, maka pemerintah justru akan menjadi penguasa yang lalim (Yunanto, 2020). Konteks ini relevan dengan pengalaman Indonesia pada pemerintahan Orde Baru yang berkuasa secara otoriter serta pandangan birokrasi yang diwarnai dengan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Di sisi lain *governance* tanpa *government* juga berbahaya dan akan menimbulkan tirani. Peristiwa krisis moneter tahun 1996-1998 menjadi puncak kegagalan pemerintahan Orde

Baru sekaligus menjadi momentum gerakan demokratisasi di Indonesia hingga terjadinya dukungan reformasi politik.

Harapan para pendukung reformasi untuk mencapai kehidupan yang demokratis justru menguntungkan pihak swasta untuk terlibat dalam memberikan pelayanan publik (Suparno, 2012). Peran pemerintah dalam kebijakan dan pelayanan publik semakin melemah sejak mematuhi kesepakatan *Washington Consensus* dengan IMF dan *World bank*. Pihak swasta dinilai sebagai aktor yang mampu memberikan pelayanan publik lebih baik dari pada Pemerintah (Moento et al., 2019). Oleh karena itu pemerintah dituntut transparan dan akuntabel, serta melibatkan pihak swasta dalam menjalankan pelayanan publik. Kehadiran pihak swasta dalam pelayanan publik dilakukan melalui privatisasi. Pada akhirnya, insfrastruktur pelayanan publik yang seharusnya diperoleh masyarakat secara non-komersial justru dikendalikan pihak swasta secara komersil sehingga membuka peluang akumulasi kapital dalam sistem monopoli pasar.

Jika menjelajahi jejak intervensi asing, tentu tidak dapat dilepaskan dengan era Orde Baru yang pertama kali membuka pintu kebijakan investasi asing. Meski era Orde Lama pernah terpaksa berhutang kepada IMF dan *World Bank* pasca dilanda krisis ekonomi karena mendapatkan warisan utang pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada akhirnya Soekarno memutuskan menjalin relasi dengan IMF dan *World Bank* yang berlangsung selama 9 tahun sejak tahun 1956-1960. Namun, hiperinflasi tidak dapat dihindari dan hegemoni Soeharto terhadap pemerintahan Orde Lama justru menjalin kemesraan dengan lembaga donor Internasional dengan menerbitkan UU No.8 Tahun 1966 tentang keanggotaan Republik Indonesia dalam *Asia Development Bank* dan UU No. 9 Tahun 1966 tentang keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam *International Monetary Fund* serta *World Bank*. Sejak berdirinya Orde Baru, Mafia Berkeley

menuntun paradigma ekonomi Indonesia menuju kapitalisme barat. Soeharto menempatkan para Mafia Berkeley pada posisi vital dalam pemerintahan sehingga mampu membuka pintu investasi asing melalui regulasi yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).

Penyusunan UU PMA didominasi oleh Amerika Serikat yang merivisi draft UU tersebut agar mampu mendukung terjadinya liberalisasi (Simpson, 2008 dalam Oppusunggu, 2019). Pada akhirnya UU PMA memberikan insentif bebas pajak serta jaminan tidak adanya ancaman nasionalisasi kepada calon investor asing (Prastya, 2019). Pasca disahkannya UU PMA pada 10 Januari 1967, kemudian pemerintah melanjutkan langkahnya dengan menyambut datangnya para investor asing melalui pembentukan konsorsium *Intergovernmental Group on Indonesia* (IGGI) pada 20 Februari 1967 kemudian diganti menjadi *Consultative Group on Indonesia* (CGI) pada tahun 1992. Konsorsium CGI dibentuk sebagai himpunan para kreditur multinasional sebagai sumber bantuan asing untuk Indonesia. CGI terdiri dari negara Jepang, Jerman Barat, Inggris, Prancis, Italia, dan Amerika dan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, UNDP, ADB (*Asian Development Bank*) dan OECD (*Organization for Economic Cooperative and Development*).

Setelah pemerintahan Orde Baru menyambut hangat datangnya investor asing, PT Freeport Sulphur mulai berdiri pada 7 April 1967. Perusahaan ini mendapatkan keistimewaan melalui kesepakatan Kontrak Karya (KK) dengan minimnya persyaratan izin usaha seperti bebas pajak penghasilan, pembayaran royalti, hingga penyertaan modal Indonesia (Pratiwi, 2021). KK memberikan jaminan hukum kepada perusahaan dan mengharuskan perusahaan maupun pemerintah untuk patuh pada seluruh syarat yang tertera, bahkan perubahan regulasi pun tidak dapat mempengaruhi KK. Demi menciptakan iklim yang ramah investor,

pemerintah membuat KK sebagai jaminan investasi jangka panjang. Kehadiran Freeport sebagai perusahaan asing pertama meyakinkan para calon investor asing terhadap komitmen Soerhato dalam menjalankan liberalisasi ekonomi (Pratiwi, 2021; Sirwanto, 2020). Sejak 1967-1976, investasi asing mengalir deras pada berbagai bidang ekstraktif seperti pertambangan dan manufaktur, hingga merambah pada bidang non-ekstraktif seperti kehutanan, pertanian, hingga perikanan.

Terbukanya perdagangan bebas mempercepat akumulasi global melalui berdirinya perusahaan-perusahaan transnasional lainnya seperti *International Nickel* yang membuka pertambangan Nikel; *Alcoa* menambang bauksit; perusahaan Weyerhaeuser, International Paper, Boise Cascade menguasai hutan Sumatera, Irian Barat dan Kalimantan (Fahmi, 2009; Pratiwi, 2021). Era Orde Baru memperlihatkan dukungannya terhadap peningkatan investasi asing terhadap aset nasional demi “pembangunan ekonomi”. Kebijakan pembangunan pada era Orde Baru memberikan fasilitas serta proteksi yang mampu menjaga kroni kapitalisme Soeharto (Pratiwi, 2021) dan mewariskan kolonialisme terhadap aset nasional Indonesia (Sirwanto, 2020). Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa berbagai permasalahan ekonomi saat ini sangat dipengaruhi oleh era Orde Baru. Namun bukan berarti pemerintahan pasca Soeharto dapat melepaskan tanggung jawabnya dalam meratapi penderitaan rakyat Indonesia karena tidak melakukan penghapusan berbagai produk kebijakan liberalisasi ekonomi yang diwariskan Soeharto dan para Mafia Berkeley di bawah intervensi para lembaga donor internasional (Baidhawiy, 2015). Pada akhirnya, produk kebijakan era Soeharto telah menjembatani kepentingan akumulasi global dengan menciptakan iklim ramah investor (Baidhawiy, 2015).

Relasi Indonesia dengan para lembaga ekonomi internasional sempat melemah setelah keruntuhan era Orde Baru. Namun kemesraan dengan lembaga ekonomi internasional mulai kembali lagi pada era Reformasi di bawah kepemimpinan SBY dan Joko Widodo (Jokowi). Terlebih lagi saat pemerintahan SBY dan Jokowi berperan aktif pada forum *Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors* (G20) (Astuti & Fathun, 2020). Forum G20 terdiri dari negara-negara dengan tingkat perekonomian yang besar dari seluruh penjuru dunia, termasuk lembaga ekonomi internasional seperti IMF dan World Bank (Wulandari, 2010). G20 menjadi forum kerja sama ekonomi dalam skala internasional terbesar yang menghimpun 90% rasio Produk Nasional Bruto/*Gross National Product* dan 80% perdagangan global meliputi dua pertiga penduduk di dunia (Fathun, 2022). Keterlibatan Indonesia dalam forum G20 menunjukkan pengaruh besar Indonesia terhadap perekonomian global sehingga IMF menaruh kepercayaan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah forum tahunan IMF-World Bank (Imannulloh & Rijal, 2022).

ii. **Paradiplomasi Provinsi Jawa Barat**

Pemerintahan SBY gemar menjalin relasi dengan berbagai negara dan eksis dalam berbagai forum internasional demi menjaga kestabilan politik luar negeri Indonesia (Alvian et al., 2018). Sedangkan sikap politik luar negeri pada pemerintahan Jokowi justru lebih lugas dalam menangani isu global dan lebih memilih menjalin hubungan bilateral yang menguntungkan pembangunan nasional dalam bidang ekonomi dan infrastruktur (Situmorang, 2015), (Widiatmaja & Albab, 2019). Meski demikian, kedua presiden yang sama-sama menjabat selama dua periode tersebut saling berkomitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi global yang inklusif melalui forum G20 (Astuti & Fathun, 2020). Setelah pemerintahan SBY membawa masuk Indonesia ke dalam Konferensi Tingkat Tinggi *Group of Twenty* (KTT G20)

pada tahun 2008, tongkat estafet Presidensi KTT G20 diterima Jokowi pada tahun 2022. Indonesia resmi memegang Presidensi KTT G20 ke-16 dengan mengusung tema “*Recover Together, Recover Stronger*”. Presidensi Indonesia di KTT G20 membuka peluang praktik pembangunan berbasis *green economy* dan memberikan kesempatan kerja sama *multi-level government* melalui *paradiplomasi* (Fathun, 2022).

Paradiplomasi merupakan aktivitas pemerintah daerah dalam kancah internasional untuk memperoleh investor asing melalui pintu pasar global. Presidensi Indonesia di KTT G20 memfasilitasi pemerintah daerah untuk mempromosikan potensi wilayahnya dan menyambut datangnya para calon investor di daerah dengan melakukan kerja sama *multi-level government*. Aktivitas paradiplomasi juga didukung dengan serangkaian kebijakan yang dapat membantu pemerintah daerah untuk melakukan hubungan multilateral yakni melalui UU/23/2014, UU/24/2000/UU/37/1999, PP. 28/2018, Permendagri No.25/2020 dan Permenlu No. 3 tahun 2019 (Mukti, 2020 dalam Fathun, 2022). Kesempatan paradiplomasi juga terbuka lebar pada beberapa agenda di dalam pertemuan KTT G20, di antaranya adalah Urban 20 (U20), Think 20 (T20), dan Youth 20 (Y20). Agenda U20 menjadi klimaks pertemuan Presiden Indonesia di KTT G20 sebagai momen penting bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai leader *co-chairs* untuk aktif mengembangkan paradiplomasi dengan pemerintah daerah dari berbagai negara.

Pada konteks pembangunan Rebana Metropolitan, pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan paradiplomasi melalui agenda promosi investasi *West Java Investment Summit* (WJIS). Agenda WJIS diselenggarakan berdasarkan landasan kebijakan dari Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 119.05/Kep.245-PEMKS/2017 tentang Koordinasi Kerjasama Daerah Tim Provinsi Jawa Barat (Alam et al., 2021).

Penyelenggaraan WJIS diusung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Perwakilan Bank Indonesia untuk memasarkan proyek pembangunan kepada para calon investor asing. Salah satu proyek pembangunan Pemerintahan Jawa Barat adalah Rebana Metropolitan. Melalui portofolio digital yang dipublikasikan melalui *website* resmi *West Java Investment Summit* (WJIS) pada tahun 2020, Kota Cirebon diproyeksikan menjadi pusat kota Metropolitan Rebana dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Jawa Barat (*REBANA METROPOLITAN a Portfolio of New Industrial Area and City Development in West Java*, n.d.).

iii. Rebana Metropolitan

Evolusi perkembangan Kota Cirebon menjadi kawasan Metropolitan telah melalui proses waktu yang panjang dengan berbagai dinamika konflik pembangunan. Kota Cirebon sempat berinisiasi melakukan pemekaran wilayah untuk berdiri menjadi provinsi yang otonom. Mencuatnya keinginan Kota Cirebon untuk memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari propaganda para pemburu rente aktor politik dan tokoh elit keraton Cirebon yang menggunakan isu perbedaan serta isu konflik antar etnis Cirebon dan Jawa Barat (Utomo & Aldrin Pasha, 2020). Meredupnya gerakan pemekaran Provinsi Cirebon membawa Kota Cirebon pada gagasan baru untuk mengembangkan proyek Metropolitan Cirebon Raya (MCR) kemudian diganti menjadi Rebana Metropolitan. Pada tahun 2019, pemerintah Kota Cirebon mulai berupaya mempromosikan Kota Cirebon dengan label “*The Gate of Secret*” yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Cirebon No. 430/Kep.-DKOKP/2019 (SUKAMDANI et al., 2021).

Rebana Metropolitan memiliki empat kawasan utama yang memiliki sektor unggulannya masing-masing yang terdiri dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning). Cirebon sebagai kota inti Rebana Metropolitan termasuk ke dalam kawasan berkembang (Kuadran II)

dengan posisi strategis yang menghubungkan sektor perdagangan dan jasa antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah sekaligus ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Provinsi Jawa Barat (RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029). Kota yang berada dalam tipologi Kuadran II juga dipegang oleh Indramayu dengan sektor unggulan pertambangan. Di sisi lain, Majalengka dan Kuningan masih berada pada kawasan tertinggal dengan sektor unggulan pertanian (Lestari, Fatimah, & Farus, 2017).

3. Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB): Musibah atau Berkah Bagi Masyarakat Majalengka

i. Penggusuran Desa dan Kaum Tani

a. Runtuhnya Dalih Relokasi

Dalam video profil BIJB, rencana pembangunan BIJB dan aerocity Kertajati akan membebaskan lahan seluas ± 5.000 Ha yang tersebar di 11 desa di Kecamatan Kertajati. Dari lahan seluas itu akan 1.800 Ha akan dipakai untuk pembangunan BIJB, dan sisanya untuk pengembangan kawasan Aerocity Kertajati. Target awalnya pada tahun 2018 bandar udara sudah terbangun dan bisa digunakan untuk transportasi. Tetapi sampai 2022 ini BIJB terpaksa dihentikan operasionalnya dikarenakan ternyata sepi penumpang. Sepinya penumpang BIJB disebabkan oleh aksesibilitasnya yang belum maksimal. Jarak tempuh pengunjung dari daerah-daerah sekitarnya menuju BIJB masih memakan waktu yang cukup lama, dibanding bandara-bandara yang sudah ada. Salah satu upaya yang sedang dilakukan pemerintah adalah menyelesaikan pembangunan jalan tol Cisumdawu.

Dari lahan BIJB seluas ± 1.800 Ha rencananya akan dimanfaatkan sebagai terminal penumpang menara/ATC, GSE, Terminal Haji, Bangunan Catering, Bangunan Metco, Terminal Cargo, Masjid Raya, Bangunan Administrasi Bandara, Gudang, Storage, dan Fuel Area. Untuk lahan Bandar Udara, pembebasan lahan terletak di Desa Sukamulya, Sukakerta, Bantarjati Lor, Kertajati dan Mekarmulya.

Sementara itu, untuk pembangunan kawasan aerocity dibutuhkan lahan seluas ± 3.200 Ha, yang rencananya akan dimanfaatkan untuk Pemukiman dan Relokasi ± 928 Ha, untuk Area Bisnis ± 384 Ha, Area Central Park ± 128 Ha, Area Rekreasi ± 288 Ha, serta Area Industri ± 960 Ha yang berlokasi di Desa Kertasari, Babakan dan Palasah.

Lahan seluas ± 1800 Ha yang sebelumnya digunakan masyarakat untuk bertani, hendak diubah menjadi bangunan-bangunan seperti menara/ATC, GSE, Terminal Haji, Bangunan Catering, Bangunan Metco, Terminal Cargo, Masjid Raya, Bangunan Administrasi Bandara, Gudang, Storage, dan Fuel Area. Sedangkan lahan seluas ± 3500 Ha, sampai 2025 mendatang akan diubah menjadi area khas perkotaan di mana tidak ada satu pun yang membahas kebutuhan mata pencaharian masyarakat.

Rencana mega proyek seluas ± 5000 Ha, rencana akan digunakan untuk relokasi pemukiman seluas 928 Ha. Dengan kata lain dari cetak birunya saja, proyek ini akan menggusur lahan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat seluas 4082 Ha. Lebih dalam praktiknya rencana relokasi itu tidak berjalan. Sejak penggusuran tahap awal pada 2011 di empat desa, BIJB tidak menyediakan lahan relokasi untuk masyarakat. Masing-masing orang yang pemukimannya dibebaskan sudah berpencar.

Pak Karman (43 tahun) menyebutkan ada 4 desa yang lahannya sudah dibebaskan untuk proyek BIJB, yaitu Kertasari, Bantarjati, Sukakarta dan Sukamulya. Di Kertasari baik lahan pertanian maupun pemukimannya sudah tergusur. Di Desa Bantarjati sudah sebagian besar lahan pertaniannya yang sudah tergusur. Untuk Desa Kertasari hanya sebagian sawahnya saja. Sementara Desa Sukamulya sebagian pemukiman sudah tergusur dan/atau dijual untuk pembangunan BIJB.

Dari semua lahan-lahan pertanian dan pemukiman yang sudah dibebaskan di empat desa itu tidak ada yang dilakukan relokasi. Meskipun belakangan ada wacana Desa Sukamulya akan direlokasi jika suatu waktu dibebaskan. Sebab letak geografis Sukamulya berada tepat di depan landasan BIJB.

Jika suatu waktu BIJB memperluas landasannya, pemukiman Sukamulya akan dipindahkan di sekitar Jalan Lingkar yang baru beberapa tahun lalu dibangun. Tidak begitu jelas tepatnya di wilayah mana pemukiman Sukamulya akan direlokasi. Jikapun benar relokasi dilakukan, realitasnya tetap ada lahan-lahan sawah yang dialihfungsikan. Artinya tetap ada penghidupan petani yang tergusur.

Luas keseluruhan lahan Sukamulya ada 750 Ha. Sementara kebutuhan lahan untuk perluasan landasan BIJB mencapai 500 Ha. Maka lahan Sukamulya akan tersisa 250 Ha. Jika untuk relokasi pemukiman dibutuhkan 150 Ha, maka sisanya tinggal 100 Ha. Padahal, penduduk Sukamulya kurang lebih ada 1.400 KK dari 4.600 jiwa. Dari jumlah itu kira-kira ada 100 KK yang sudah meninggalkan Sukamulya, sehingga tinggal 1.300 KK (Wawancara Pak Ian, 2022).

Sekitar 80 persen masyarakat Sukamulya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Jika yang bermata pencaharian petani ada

kira-kira 1000 KK, sementara hanya ada lahan pertanian 100 Ha, maka masing-masing KK hanya memperoleh 0,1 Ha. Lahan 0,1 Ha tentu saja sangat jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sebab jika mengacu pada UUPA 1960, batas minimum petani dapat dikatakan cukup sejahtera adalah 2 Ha.

Dalam masyarakat pedesaan di Jawa, dikenal ukuran luasan lahan yang disebut "*bata*". Satu hektar sama dengan 700 *bata*. Jadi jika secara merata relokasi itu dijalankan dengan konsekuensi kepemilikan lahan dibagi rata-rata 0.1 Ha, maka masyarakat hanya memperoleh lahan sawah seluas 70 *bata* saja. Hitungan ini sangat sedikit, mengingat menurut Pak Karman, masyarakat Sukamulya mayoritas memiliki lahan dan banyak di antaranya 200 *bata* sampai 500 *bata*.

Petani Sukamulya ada yang memiliki 50 *bata*. Ada juga yang memiliki 1 bahu atau 500 *bata*. Sementara yang tidak punya tanah sama sekali relatif sedikit, dan biasanya menggarap lahan-lahan kehutanan. Ada masyarakat Sukamulya yang memiliki lahan di luar desa, dan ada juga masyarakat luar desa yang memiliki lahan di desa Sukamulya. Meskipun yang terakhir itu juga relatif sedikit.

Keragaman pola kepemilikan lahan itu membuat Pak Karman kesulitan dalam menentukan rata-rata kepemilikan lahan di Sukamulya. Meskipun begitu Pak Karman mencoba membuat klasifikasi berdasarkan luas kepemilikan lahan di desanya sebagai berikut. Petani kelas atas adalah kelompok petani yang kaya, yaitu petani yang memiliki lahan di atas 5 bahu. Petani kelas menengah yang memiliki 2 sampai 5 bahu. Kelas "sedang" atau menengah ke bawah yaitu petani yang memiliki kurang dari 1 bahu atau 1 hektar. Sedangkan kelas bawah adalah petani yang memiliki lahan yang sangat sempit atau tidak punya lahan sama sekali.

Dalam amatan Pak Karman, kepemilikan lahan di Sukamulya relatif merata atau tidak terlalu timpang. Kesimpulan itu didapat dari membandingkan dengan kepemilikan lahan yang pernah ditemuinya di wilayah Patrol, Indramayu. Meskipun di Sukamulya sendiri ada beberapa orang yang memiliki lahan yang sangat luas. Misalnya Bos Hendi mempunyai lahan 20 bahu. Kemudian ada juga Mang Sartam memiliki lahan 25 bahu.

Bos Hendi disebut bos karena menjadi tengkulak di Sukamulya, yaitu yang memperdagangkan hasil panen petani Sukamulya ke pabrik dan pasar. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan seorang bos juga ada di kelas menengah secara kekayaan, misalnya Bos Noto. Sedangkan Mang Kartam, meskipun petani asli, bukan bos, diklasifikasikan berada di kelompok kelas atas, karena memiliki lahan yang relatif sangat luas dibanding petani pada umumnya di Sukamulya.

b. Relasi Sosial Berbasis Kekeluargaan Terancam Hilang

Ketimpangan lahan yang ada di Sukamulya adalah realitas yang pada umumnya terjadi di desa-desa lain di Jawa. Masalah ketimpangan itu tidak kunjung terselesaikan, misalnya karena kebijakan reforma agraria tidak pernah benar-benar berhasil dijalankan. Meskipun begitu, lahan pertanian dan relasi-relasi sosial produksi yang sudah terbangun di atasnya sudah menghidupi beberapa generasi masyarakat Sukamulya. Sehingga jika Desa Sukamulya digusur, bukan hanya lahannya yang hilang, melainkan relasi sosial dan sejarah di atas lahan itu pun juga hilang.

Salah satu bentuk relasi sosial menyenar itu adalah pola ketenagakerjaan dalam pertanian di Sukamulya yang tidak sepenuhnya berorientasi keuntungan sebesar-besarnya. Petani masih mengutamakan

penyerapan tenaga kerja dari kalangan masyarakat sendiri. Misalnya dalam konteks memilih antara menggunakan mesin atau tenaga kerja buruh tani dalam proses *derep* atau panen Petani akan menawarkan kepada petani atau buruh tani yang lain untuk bekerja memanen di lahannya. Biasanya yang ditawarkan adalah orang-orang yang dulu bekerja sebagai buruh tanam di lahan tersebut. Lalu ditawarkan ke tetangga dan kerabatnya. Jika semua sibuk, baru petani akan memutuskan untuk menggunakan mesin panen.

“Jadi petaninya kasih tahu dulu ke buruh yang tadinya dulu nandur, bisa *nderep* apa tidak? Kalo buruh jawab tidak bisa, misalnya lagi repot. Ya udah pakai *combine*. Bagusnya gitu. Ga asal gruduk-gruduk pakai *combine*.”

Secara nominal, panen menggunakan *komben* (sebutan masyarakat untuk *combine harvester* - alat panen padi) lebih menguntungkan dibanding menggunakan tenaga kerja manusia, karena dapat mengurangi biaya operasional modal. Sebut saja petani kaya yang memiliki 20 bahu, jika menggunakan tenaga buruh, maka membutuhkan 10 hari untuk panen. Sedangkan jika menggunakan *komben*, satu sampai dua hari bisa selesai. Akan tetapi menawarkan kesempatan kerja kepada buruh tani untuk *derep* menjadi semacam bentuk etika kekeluargaan di dalam masyarakat Sukamulya. Dalam sistem tersebut terdapat relasi saling menguntungkan di antara buruh tani dan petani sendiri. Buruh tani diuntungkan karena memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan harian. Sedangkan petani diuntungkan karena secara tidak langsung memperoleh jaminan ketersediaan tenaga kerja khususnya untuk periode panen berikutnya. Meskipun sebenarnya petani bisa saja menggunakan armada buruh tani dari luar Sukamulya. Akan tetapi hal itu akan menimbulkan kecemburuan sosial dan merusak relasi kekeluargaan di antara masyarakat Sukamulya sendiri.

Relasi sosial yang terbangun sejak lama tersebut juga bukan hanya menghidupi masyarakat petani, melainkan juga masyarakat yang bekerja di sektor yang lain. Peneliti seringkali mendengar dari beberapa orang di Sukamulya, bahwa banyak orang yang sudah menjual lahannya dan pindah ke desa lain, tetap menggantungkan hidup dengan menggarap atau menjadi buruh tani di Sukamulya. Jika orang itu pedagang, tidak jarang yang ia tetap menjajakkan dagangannya kepada masyarakat Sukamulya, karena sudah bertahun-tahun sebagian besar pelanggannya adalah masyarakat Sukamulya. Biasanya orang yang demikian adalah orang-orang yang setelah pindah dari Sukamulya, kesulitan beradaptasi dengan tempat yang baru dan berbaur dengan masyarakat yang juga baru (Wawancara Ian dan Rahman, 2022). Sehingga dapat dikatakan bahwa relasi sosial sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat.

c. Palawija Menjadi Primadona

Sebenarnya lahan Desa Sukamulya adalah lahan tadah hujan. Sebab tidak ada sungai alami atau pun irigasi teknis yang tersedia di sana. Akan tetapi setelah hadirnya teknologi sumur pantek pada 1970-an masyarakat Sukamulya bisa menggarap lahan sepanjang tahun. Musim pertama dan kedua masyarakat menanam padi. Kemudian musim ketiga masyarakat menanam palawija.

Mesin pantek adalah mesin bor yang menyedot air dari dalam tanah untuk mengairi sawah-sawah di desa-desa di Kertajati pada umumnya. Dari satu titik pengeboran air dialirkan ke sawah-sawah yang digarap petani menggunakan selang besar kira-kira berdiameter 10 cm berbahan plastik tebal. Karena wilayah ini tidak berdekatan dengan pantai, kualitas air yang dihasilkan dari sumur pantek itu sangat jernih.

Sehingga kualitas dan kuantitas panen yang dihasilkan pun sangat baik. Untuk lahan seluas 100 bata dapat menghasilkan panen 1 ton gabah.

Biasanya petani Sukamulya menyimpan gabah hasil panen itu untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga sampai panen berikutnya. Jika ada kelebihan, ada yang langsung menjualnya, ada juga yang menyimpannya dan menjualnya kepada bos-bos yang ada di Sukamulya saat butuh uang tunai saja. Sementara untuk panen palawija, masyarakat langsung menjualnya kepada bos-bos atau pengepul di sana untuk yang sejak awal untuk memperoleh keuntungan (Karman, 2022). Dengan kata lain, masyarakat yang hidup di Sukamulya memiliki jaminan penghidupan dari sektor pertanian dari dua komoditas: padi untuk memenuhi kebutuhan pangan, sedangkan palawija untuk memenuhi kebutuhan akan uang tunai.

Kemampuan petani Sukamulya menanam sepanjang tahun menjadi indikator bahwa petani Sukamulya cukup sejahtera secara sosial maupun ekonomi. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa petani Sukamulya sejak lama menolak tanahnya dibebaskan untuk pembangunan BIJB. Ketika BIJB memberikan janji-janji membuka banyak lapangan kerja baru, masyarakat Sukamulya justru selalu kekurangan tenaga kerja, baik masa tanam maupun masa panen (Wawancara Rahman, 2022). Demikian itu karena mayoritas petani Sukamulya adalah petani pemilik lahan, dan kebiasaan masyarakat menggarap lahannya secara serentak. Sehingga masyarakat sibuk menggarap lahannya masing-masing.

Terlebih di musim ketiga, ketika di tempat lain petani tidak menggarap lahannya, di Kertajati, khususnya Sukamulya musim ketiga justru musim yang paling menguntungkan. Dengan kemampuan membaca perkiraan musim dan perkiraan harga pasar, petani dapat

menghasilkan puluhan juta bahkan dalam waktu yang singkat. Di lapangan peneliti mendengar bahwa seorang petani palawija dapat menghasilkan 200 juta dalam waktu beberapa bulan saja (Pak Carli, 2022).

Bagi petani Sukamulya menanam palawija memiliki kerumitan dan resiko yang lebih besar dibanding menanam padi. Meskipun resikonya besar, jika berhasil keuntungan yang diperoleh pun jauh lebih besar ketimbang menanam padi. Ada banyak faktor yang menentukan keberhasilan menanam. Perkiraan cuaca berkaitan dengan keterampilan tentang hama dan perawatan tanaman secara berkala. Sementara perkiraan harga pasar menentukan komoditas apa yang akan ditanam. Tentu saja dipengaruhi oleh seberapa modal yang dimiliki petani.

Sulitnya memperkirakan kondisi cuaca dan harga pasar, menjadi faktor tidak adanya rumusan pasti apa yang menjadi mempengaruhi keputusan komoditas yang ditanam itu. Biasanya *tergantung sreg*-nya petani saja mau nanam apa. Terkadang di sepetak lahan petani menanam banyak jenis komoditas palawija seperti kacang panjang, semangka, bonteng, cabe dan sebagainya (Karman, 2022).

Selain itu, petani Sukamulya juga tidak mengkategorikan mana komoditas menguntungkan dan mana yang tidak. Hal itu lagi-lagi dipengaruhi oleh kondisi harga pasar dan kualitas hasil panen yang didapat. Seumpama dalam lahan 100 bata ditanami beberapa tanaman sekaligus seperti kacang panjang, bonteng dan semangka. Petani tidak dapat secara pasti menebak mana komoditas yang paling menguntungkan.

Hal yang bisa diperkirakan oleh petani bukan komoditas mana memberi keuntungan yang lebih besar, melainkan komoditas mana yang

lebih cepat menguntungkan. Hal itu dilihat dari masa panennya. Komoditas yang paling cepat panen adalah timun, yaitu 33 hari. Kacang panjang panen setelah 2 bulan. Cabe dan semangka baru bisa panen di umur 3 bulan lebih. Meskipun masing-masing berpotensi memperoleh hasil yang menjanjikan.

Menurut Pak Karman, sebetulnya ada yang paling menjanjikan jika benar-benar untung, yaitu menanam timun:

“kalau hasil, langsung cash motor juga bisa sekali panen. Kalo tanah luas, panen bagus, mobil bisa kebeli, misal sebau. Tapi modalnya besar. Tapi sebaliknya, kaauo rugi *nggeletak*. Ancur.”

Hitungannya begini. Selain umurnya yang singkat, jika harganya sedang meledak harganya bisa mencapai 4-5 ribu rupiah per kilogram. Untuk lahan 100 bata sehari dapat menghasilkan 10 kantong. Sebut saja satu kantong berisi 3 kwintal. Jadi 5 ribu dikalikan 300 kilo, yaitu 1,5 juta per hari. Lalu dikalikan 20 hari panen, hasilnya bisa mencapai 35 juta (kurang dari 2 bulan).

Jumlah itu terlalu besar jika dibandingkan dengan lapangan kerja yang ditawarkan BIJB, jika mengacu pada UMR Majalengka. Belum menjawab pertanyaan apakah lapangan kerja itu akan menyerap semua petani yang lahannya dibebaskan yang mana mayoritas petani. Sementara secara tingkat pendidikan, mayoritas petani tidak akan memenuhi kualifikasi untuk bekerja di bandara ataupun sektor formal lainnya. Dalam analisis peneliti, melihat kesejahteraan petani Sukamulya dan dibandingkan apa yang dijanjikan oleh BIJB, pengusuran atas desa-desa dan petani akan sangat merugikan petani, baik secara sosial maupun ekonomi yang sudah terbangun selama beberapa generasi.

ii. Fragmentasi dan Konflik Sosial-Horizontal

Sukamulya berdiri sebagai sebuah desa sejak 1963. Pendirinya bernama Kasman Karsuno bersama beberapa orang yang lain yang sudah lama menetap di wilayah di Kertajati. Selain penduduk asli setempat, Desa Sukamulya didirikan oleh orang-orang dari desa-desa lain di perbatasan Majalengka dan Indramayu (Syifa, 2018). Sehingga tidak heran bahasa yang digunakan masyarakat Sukamulya berbeda dengan desa-desa di sekitarnya di Kecamatan Kertajati. Masyarakat Sukamulya bisa berbahasa baik Jawa maupun Sunda, sementara di desa-desa lain mayoritas masyarakatnya berbahasa Sunda.

Sejarah berdirinya Sukamulya memiliki lika-liku yang panjang. Cerita tentang sejarah cikal bakal berdirinya Desa Sukamulya, disahkan sampai dibangun itu tertulis cukup lengkap di dalam sebuah dokumen sejarah Sukamulya yang ditulis berbahasa Sunda. Di dalam catatan sejarah itu disebutkan bahwa pasca disahkan menjadi sebuah desa, masyarakat Sukamulya membangun infrastruktur desa dan fasilitas-fasilitas umum desa secara gotong royong. Masyarakat Sukamulya bersama-sama membuka hutan, membangun kantor desa, masjid, jalan dan seterusnya secara bersama-sama dan sukarela. Dalam istilah lokal, masa membangun desa pada awal berdirinya Desa Sukamulya itu disebut *bebera*. Dari kerja sukarela inilah kemudian menautkan ekspresi bersama tentang rasa memiliki atas desanya.

Ekspresi rasa memiliki akan desa ini oleh masyarakat Sukamulya diwujudkan dalam bentuk tradisi peringatan ulang tahun desa, yang di banyak tempat tradisi ini jarang ditemukan. Ulang Tahun Desa Sukamulya diperingati setiap 20 Mei. Rangkaian acara ulang tahun desa ini dimulai dari awal bulan, diisi dengan banyak lomba-lomba yang pesertanya dari semua kalangan. Lalu di malam puncak biasanya diadakan pagelaran wayang. Di acara puncak juga masyarakat Sukamulya dibacakan riwayat Sejarah Desa

Sukamulya yang ditulis oleh Pak Gano dalam Bahasa Sunda tadi. Tujuan pembacaan sejarah desa itu untuk mengingatkan anak-anak muda Sukamulya akan asal-usulnya dan menambah kecintaan generasi muda terhadap desa (Syifa, 2018).

Pembacaan sejarah desa itu membekas di benak masyarakat. Sejak awal wacana pembebasan lahan BIJB pun sebagian besar masyarakat Sukamulya sudah menolaknya. Adapun penandatanganan persetujuan oleh 11 desa pada 2004 itu dilakukan sepihak oleh kepala desa, tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan masyarakat untuk memperkuat perjuangan mempertahankan desa Sukamulya adalah dengan mencalonkan seseorang yang juga menolak pembebasan lahan untuk BIJB. Karena pada saat itu mayoritas masyarakat menolak pembebasan lahan, Kuwu Bona berhasil meraih kemenangan di pemilihan kepala desa pada 2016. Naiknya Kuwu Bona itu dilandasi harapan masyarakat atas dukungan perjuangannya mempertahankan Desa Sukamulya dari rencana pembebasan lahan untuk BIJB. Masyarakat menaruh harapan yang tinggi karena Kuwu Bona adalah cucu dari Kuwu Kasman, pendiri Desa Sukamulya. Asumsi yang dipegang oleh masyarakat bahwa karena Kuwu Bona adalah cucu pendiri desa, sudah barang tentu akan mendukung perjuangan masyarakat mempertahankan eksistensi desa yang dibangun kakeknya (Wak Adut, 2022).

Masyarakat memilih Kuwu Bona atas dasar semangat mempertahankan desa. Naiknya Kuwu Bona diupayakan oleh beberapa tim sukses yang notabene orang-orang yang berpengaruh di Sukamulya, seperti Wa Adut dan Abah Heri alm. sebagai orang yang dituakan; Ustadz Rahman sebagai tokoh agama; dan Bambang sebagai tokoh muda. Orang-orang berpengaruh di Sukamulya ini tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat

Sukamulya (FPRS), organisasi yang didirikan untuk tujuan penolakan atas pembebasan lahan untuk BIJB.

Semangat masyarakat mempertahankan desa meningkat setelah mendapat dukungan dari pemerintah Desa. Masyarakat seperti merasa bahwa perjuangan akan lebih mudah jika mendapat dukungan dari kepala desa. Sampai pada Agustus 2016 suasana persatuan masyarakat Sukamulya menolak pembebasan lahan untuk BIJB masih kuat. Demikian itu dapat dilihat dari rekaman upacara *tujuh belasan* di Sukamulya yang diunggah oleh Ari, salah seorang tokoh pemuda Sukamulya di kanal Youtube-nya. Rekaman video itu menampilkan seorang pemudi asli Sukamulya yang mendeklamasikan sebuah puisi yang menggambarkan nasib Sukamulya yang menghadapi ancaman penggusuran lahan untuk BIJB. Selain itu terlihat juga bagaimana khidmat masyarakat yang menjadi peserta upacara mendengarkan deklamasi puisi tersebut.

Kegigihan masyarakat Sukamulya mempertahankan lahannya membuat pemerintah semakin kerepotan. Seperti juga terjadi di daerah yang lain, pemerintah melakukan upaya-upaya represif dan intimidatif terhadap masyarakat yang menolak dibebaskan lahannya. Tiga bulan setelah upacara tadi itu, tepatnya 17 November 2016 BIJB mengerahkan 6.000 aparat gabungan hanya untuk melakukan pengukuran lahan yang akan dibebaskan. Masyarakat mengaku terkejut dan ketakutan dengan kehadiran ribuan polisi di desanya. Karena semangat masyarakat mempertahankan eksistensi desa yang masih kuat, terjadilah bentrok antara aparat gabungan dan masyarakat Sukamulya di areal persawahan. Bentrok berlangsung selama 4 jam, dari jam 1 sampai jam 5 sore. Setelah bentrok selesai, polisi menduduki sebagian wilayah Desa Sukamulya selama 3 hari. Sementara itu banyak masyarakat yang meninggalkan rumahnya karena ketakutan dan mengungsi di balai desa.

Cerita lengkap tindakan represifitas aparat terhadap masyarakat Sukamulya pada kejadian saat itu sudah digambarkan di banyak media massa dan video dokumenter yang tersebar luas. Tragedi itu sempat menjadi isu yang diperbincangkan secara nasional. Karena ia menjadi isu nasional, pemerintah berupaya membangun citranya di hadapan publik dengan mendatangkan salah seorang anggota Kepala Staf Presiden (KSP) untuk menarik mundur.

Pada saat bentrok antara polisi dan masyarakat berlangsung, Kuwu Bona tidak ada di tempat, melainkan bersembunyi selama beberapa hari di luar kota. Setelah aparat ditarik mundur, Kuwu Bona pulang ke Sukamulya dan keberpihakannya berbelok arah 180 derajat, yang semula kebersamaan masyarakat menolak tanahnya dibebaskan, berbalik mendukung pembebasan lahan Sukamulya untuk BIJB. Perubahan sikap keberpihakan Kuwu Bona itu membuat masyarakat sangat terpukul karena merasa dikhianati. Salah seorang warga mengibaratkan “seperti anak ayam kehilangan induknya”.

Kekecewaan masyarakat kemudian bertambah ketika Kuwu Boba dan kelompoknya mendukung pemberkasan lahan dan pembangunan rumah hantu di banyak tempat. Rumah hantu adalah istilah yang dikenal oleh masyarakat untuk menyebutkan rumah yang tidak berpenghuni yang dibangun dengan tujuan diganti rugi pada saat pembebasan lahan. Ketika menjabat sebagai kuwu, Kuwu Bona menjadi salah satu pendukung masyarakat menekan dibangun nya rumah-rumah hantu tersebut. Sebab semakin banyak rumah hantu dibangun berarti semakin banyak masyarakat Sukamulya yang bersedia menjual tanahnya untuk BIJB.

Setelah diizinkan oleh Kuwu, rumah hantu semakin marak dibangun di Sukamulya. Masyarakat yang pro pembebasan lahan dan para spekulasi lahan merasa didukung oleh pemerintah Desa. Sementara masyarakat yang kontra pembebasan lahan justru semakin merasa kecewa, sebab banyak

tetangganya yang terbujuk untuk menjual tanahnya untuk BIJB. Situasi itu berakibat pada terjadinya konflik horizontal.

Semakin banyak masyarakat Sukamulya yang membangun rumah hantu, semakin besar pula eskalasi konflik horizontalnya. Pergeseran dari konflik vertikal dengan BIJB menjadi konflik horizontal di antara masyarakat itu membuat perjuangan mempertahankan lahan pun semakin berat karena harus berkonflik dengan saudara dan tetangganya sendiri.

Konflik horizontal ini berjalan selama sekitar 3 tahun. Selama itu ketegangan sosial yang terjadi tidak sampai pada konflik yang melibatkan penyerangan fisik. Akan tetapi antara masyarakat yang pro dan kontra itu tidak saling menyapa apa lagi bercakap-bercakap. Untuk sebagian orang masih bisa saling menyapa dan mengobrol, tetapi seperlunya, misalnya Ustadz Rahman. Karena seorang ustadz dan menjadi *lebe* di desa, beliau masih harus berinteraksi dan mengayomi masyarakat.

Bandara Nge-prank: Rumah Hantu dan Dilema Ketidakpastian

- Sejak awal proyek BIJB tidak transparan
- Maraknya rumah hantu pasca beloknya kuwu Bona.
- Rumah hantu sebagai pancingan prank
- Kerugian Pak Carli dari Bantarjati ke Sukamulya

iii. *Unnatural Floods*: Pembangunan Jalan Lingkar, Pengurangan Area Resapan Air dan Penyempitan Saluran Air

Belum selang setahun pasca peristiwa bentrok di Sukamulya, masyarakat dihadapkan dengan terjadinya banjir di beberapa desa di sekitar BIJB. Banyak berita yang menyebutkan bahwa banjir itu disebabkan oleh

berkurangnya daerah-daerah resapan akibat pembangunan BIJB. Pada awal April 2017 banjir menggenangi beberapa desa seperti Bantarjati, Kertajati dan Biawak. Daerah yang paling parah terendam banjir adalah Desa Bantarjati di Blok Jumat karena tempatnya yang relatif lebih rendah dibanding daerah-daerah di sekitarnya. Pak Nono, kepala desa Kertajati pada waktu itu berpikir bahwa banjir tersebut disebabkan oleh keberadaan BIJB. Konstruksi BIJB telah menutup area-area resapan air di atasnya (Suryagrageonline.com, 2022). Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Majalengka menyebutkan bahwa ada sedikitnya 10 desa dan 300 hektar sawah yang terendam di Kecamatan Kertajati dan Jatitujuh. Sepuluh desa itu adalah desa-desa dari Babakan sampai Sumber Wetan (rakyatcirebon.disway.id, 2017).

Setelah itu banjir semakin sering terjadi di desa-desa sekitar BIJB. Setiap musim hujan tiba, banjir di daerah itu semakin banyak diberitakan di media-media massa. Isu bahwa banjir itu disebabkan oleh konstruksi BIJB dan jalan-jalan tol penghubungnya menjadi isu publik. Sebaliknya banyak juga media yang memberitakan janji-janji dan solusi dari pihak pemerintah dan BIJB untuk segera menyelesaikannya. Namun, sampai awal 2020 banjir masih sering menggenangi desa-desa tersebut. Akhirnya pada April 2020 pihak BIJB memberikan sembako kepada 375 kepala keluarga di dua desa, yaitu 145 warga Desa Bantarjati dan 230 warga Desa Kertajati (BIJB, bijb.co.id, 2020).

Setahun berikutnya banjir semakin meluas, tidak hanya menggenangi desa-desa selatan BIJB yang datarannya relatif rendah. Pada Februari 2021 banjir juga menggenangi Sukamulya dan Mekarjaya, selain juga 3 desa di selatan, yaitu Kertajati, Bantarjati dan Biawak. Di Sukamulya banjir melanda 7 rumah warga dengan 2 jiwa di Blok Padasuka, juga merendam jalan kabupaten sepanjang 50 Meter dengan tinggi muka air 40 sentimeter.

Tingginya muka air di jalan itu membuat sepeda motor, bahkan mobil pun tidak dapat melintas (Nugraha, Liputan6.com, 2021). Oleh karena itu warga yang pada saat itu berada di luar desa, memutuskan untuk menginap di desa lain. Sedangkan warga yang ada di desa, tidak dapat keluar desa (Wawancara Pak Fatur, 2022).

Dari lima desa itu selanjutnya peneliti akan memaparkan dua desa saja, yaitu banjir di Desa Sukamulya dan Desa Bantarjati. Banjir di dua desa itu memiliki penyebab yang sama, namun polanya berbeda. Keduanya sama-sama disebabkan oleh hilangnya daerah resapan air karena BIJB, curah hujan yang terlalu tinggi, sementara aliran airnya kecil karena tersumbat. Sedangkan perbedaannya dari titik dan pola penyumbatan aliran airnya.

a. Banjir Sukamulya

Secara topografi, Sukamulya merupakan desa dengan dataran yang relatif lebih tinggi dari desa-desa lain di Kecamatan Kertajati. Mestinya tidak akan ada banjir yang menggenang karena banyak desa-desa yang lebih rendah di sekitarnya. Selain itu Sukamulya juga memiliki dua aliran air besar yang biasanya digunakan petani untuk membuang air dari sawah-sawah warga. Dua aliran air itu adalah Ciduwet dan Ciborelang. Dua aliran air ini di banyak media online disebut-sebut sebagai sungai. Akan tetapi menurut masyarakat aliran air itu disebut *kalen*, istilah untuk menyebut sungai tanpa hulu. Fungsinya untuk pembuangan air hujan dan air bekas pengairan lahan pertanian ke daerah-daerah hilir.

Kalen Ciduwet ada di bagian barat Sukamulya, sedangkan Kalen Ciborelang ada di bagian timur. Kedua kalen itu bertemu di perbatasan desa antara Sukamulya dan Sukakarta. Setelah itu menjadi satu aliran dan mengalir ke desa-desa yang lebih rendah ke utara. Karena memiliki dataran yang relatif tinggi, Sukamulya tidak pernah mengalami banjir. Permasalahan banjir muncul justru setelah dibangun jalan lingkar BIJB. Kalen yang semula

memiliki volume aliran yang besar, setelah dibangun jalan lingkar, di atas aliran setelah pertemuan dua kalen tadi dibangun jembatan. Lalu kalen itu diubah menjadi gorong-gorong dan mengakibatkan volumenya semakin mengecil.

Jalan lingkar itu adalah jalan baru yang dibangun mengelilingi area BIJB yang menghubungkan desa-desa di sekitar BIJB. Jalan lingkar tersebut melintas dari Mekarmulya, masuk ke Sukamulya, lalu ke Sukakerta. Dari Sukakerta tembus ke Pasiripis, dan terakhir keluar ke jalan raya di Bantarjati. Karena belum digusur, pemukiman Sukamulya berada di bagian dalam jalan lingkar, yaitu diapit antara jalan lingkar dan landasan BIJB. Sedangkan bagian yang tergenang banjir adalah area persawahan bagian dalam jalan lingkar di sekitar gorong-gorong kalen tersebut.

Selain disebabkan oleh penyempitan aliran di gorong-gorong jalan lingkar, banjir juga disebabkan oleh pendangkalan kalen Ciborelang. Kalen ini mengalami pembaruan, bukan kalen alami seperti sebelumnya. Pada saat pembangunan landasan BIJB, Ciborelang yang alami terurug, kemudian dibuatkan aliran yang baru. Berbeda dengan kalen yang alami yang sudah teraliri air berpuluh-puluh tahun, karena baru dikeruk, kalen baru itu sering membawa pasir dan bantuan kecil-kecil. Akibatnya Ciborelang baru tersebut mengalami pendangkalan, sehingga kapasitas tampung debit airnya pun mengecil.

Dengan demikian penyebab banjir di Sukamulya adalah penyempitan saluran pembuangan air di areal sawah. Sementara itu ada dua faktor yang menjadi penyebab menyempitnya kalen tersebut. Pertama, karena pembangunan gorong-gorong di bawah jalan lingkar yang buta krisis. Kedua, kali Ciborelang yang diurug karena pembangunan area landasan BIJB. Baik jalan lingkar maupun landasan, keduanya dibawah satu mega proyek yang sama yaitu BIJB.

b. Banjir Bantarjati

Bantarjati adalah salah satu desa yang sebagian lahannya telah dibebaskan untuk pembangunan BIJB. Lahan Bantarjati yang dibebaskan berupa lahan pertanian. Menurut masyarakat setempat, saat ini lahan pertanian di Bantarjati sebagian besar sudah dibebaskan, meskipun masyarakat yang dulu pemiliknya masih diperbolehkan menggarapnya selama BIJB belum mendirikan bangunan di atasnya. Selain itu ada juga sebagian yang menjual lahannya kepada pengusaha-pengusaha individu dari luar desa (Wawancara Pak Samin, 2022). Sehingga kepemilikan lahan pertanian sekarang masyarakat di Bantarjati relatif sangat sedikit.

Selain lahannya sedikit, masyarakat Bantarjati juga menghadapi masalah lain yaitu banjir yang semakin sering melanda lahan pertanian tersebut. Lahan pertanian Bantarjati berbatasan langsung dengan BIJB sebelah selatan. Secara topografi pun, wilayah Bantarjati lebih rendah di bandung wilayah BIJB, bahkan berada tepat di bawah tiga rawa yang menjadi tempat pembuangan air yang mengalir dari wilayah BIJB. Ketika rawa-rawa itu tidak mampu menampung debit air ketika curah hujan sangat tinggi, air akan mengalir ke wilayah desa-desa di bawahnya dan terjadi banjir.

Terjadinya banjir di desa-desa yang ada di bawah BIJB disebabkan oleh dua faktor, yaitu pertama, hilangnya daerah resapan air karena sudah dibangun BIJB dan kedua, penyempitan aliran air yang menuju hilir di sekitar desa-desa tersebut. Penyebab pertama adalah faktor terbesar yang menjadi penyebab banjir di daerah tersebut, sebab sulit untuk diperbaiki kecuali membongkar ulang bangunan bandara itu sendiri. Sementara penyebab kedua masih ada kemungkinan untuk diperbaiki, yaitu dengan membenahi dan memperbesar aliran-aliran air tersebut, sehingga air limpahan dari daerah hulu cepat mengalir ke hilir dan tidak menggenang.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang karakteristik penyebab banjir di Bantarjati, ada baiknya memahami kondisi geografis di daerah tersebut. BIJB berada di wilayah yang topografinya lebih tinggi. Di sebelah tenggara ada wilayah persawahan dan pemukiman tiga desa yaitu Kertajati, Bantarjati dan Biawak. Lalu di antara BIJB dan tiga desa tersebut ada tiga rawa yang dijadikan tempat pembuangan air dari daerah BIJB. Tiga rawa itu masing-masing memiliki nama, yaitu Cijawura, Cimaneh dan Citamiyang. Sebelum BIJB dibangun, fungsi rawa-rawa tersebut. Pak Samin, warga Desa Bantarhati, menjelaskan bahwa awalnya rawa-rawa itu difungsikan sebagai waduk penampung air untuk irigasi pertanian. Status tanahnya milik pemerintah provinsi. Karena tidak terurus, waduk itu kemudian disewakan untuk tambak-tambak budidaya ikan.

“Kalau waduk itu sebetulnya buat pertanian cuma sekarang sudah disalahartikan. Disewakan ke peternakan ikan. Akhirnya saat pertanian butuh air, airnya ada ikan. Akhirnya abis. Soal penggunaan sebetulnya. Urusannya beda lagi. Akhirnya petani yang beli air ke yang punya rawa. Ini sudah dikontrak sama saya, berikut airnya jadi punya saya.”

Kemudian di antara rawa-rawa itu dan desa-desa ada beberapa ada tiga aliran air atau kali di area persawahan. Sebagaimana di Sukamulya, kali-kali itu bukan sungai yang dialiri air, melainkan tempat untuk membuang air hujan dan air sawah ke wilayah-wilayah hilir. Lebar kali-kali itu kurang lebih 2 meter. Dulunya kali-kali itu lebar. Akan tetapi semakin hari semakin mengalami penyempitan dan pendangkalan. Di antara penyebabnya adalah perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan kondisi ekologis sungai tersebut. Misalnya, orang yang mencari belut biasanya menggali tanah lalu membuangnya ke dalam sungai. Sebab jika dibuang keluar pun tidak bisa karena akan merusak tanaman milik orang lain. Akhirnya terjadilah pendangkalan. Selain itu misalnya, banyak orang yang menanam seperti

pisang, singkong dan sebagainya di bibir sungai, sehingga terjadi penyempitan.

4. RDMP (*Refinery Development Master Plan*): Ekspansi Mega Proyek Kilang Pertamina RU-VI dan Petrokimia Balongan di Indramayu

i. Pembangunan Kilang Minyak Pertamina Balongan: Ekspansi Kilang, Komplek Industri Petrokimia dan Penggusuran Desa

Kilang Minyak milik PT Pertamina *Refinery Unit* (RU) VI di Balongan ini merupakan kilang ke-enam yang dibangun sejak 1990 dan mulai beroperasi sejak 1994 di kabupaten Indramayu (Dewi, 2021). Kilang Pertamina RU-VI Balongan berorientasi pada peningkatan ekspor migas dan nonmigas dan ia telah melakukan beberapa kali transformasi (atau *revamp*) dan ekspansi pabriknya dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor (Dewi, 2021). Misalnya, pada 2005 Pertamina Balongan membangun Kilang Langit Biru Balongan (KLBB) dengan kapasitas produksi 52 MBSD dan pada 2008 Pertamina Balongan membangun kilang petrokimia baru (disebut kilang ROPP - *RCC Off Gas to Propylene Project*) yang akan memproduksi *propylene* (Dewi, 2021).

Sejak diterbitkannya Perpres Nomor 146/2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri, PT Pertamina melakukan ekspansi kilang minyak yang dimilikinya di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Balikpapan, Cilacap dan Indramayu. PT Pertamina merupakan motor utama dalam peningkatan kapasitas kilang minyak dalam negeri itu. Proyek peningkatan kapasitas kilang minyak oleh Pertamina itu disebut *Refinery Development Master Plan* (RDMP). Proyek RDMP ini kemudian merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek RDMP Balongan merupakan salah satu bagian dari Proyek

Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan menaikkan kapasitas pengolahan Kilang Balongan dari 125 MBSD menjadi 150 MBSD guna memenuhi kebutuhan energi dalam negeri (Kencana, 2021).

Pada tahun 2019, pemerintah memulai negosiasi dengan China Petroleum Corporation (CPC) Taiwan untuk pengembangan kawasan industri petrokimia terpadu yang akan dikelola oleh PT Pertamina di Balongan Indramayu. Untuk itu, pemerintah Indramayu dituntut untuk menyediakan infrastruktur (seperti akses jalan, air baku, listrik) dan terutama lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) tersebut di Balongan Indramayu. Industri petrokimia merupakan sektor industri hulu yang memiliki peran strategis karena ia akan menghasilkan bahan baku bagi industri plastik, tekstil, cat, kosmetik dan farmasi (kemenperin. go.id, 2019).

Industri Petrokimia ini akan dibangun di sebelah selatan Komplek Industri Pertamina. Lahan yang akan dibangun kompleks Industri tersebut adalah lahan persawahan milik masyarakat setempat. Namun, sekarang sawah-sawah itu sudah dibebaskan oleh Pertamina pada awal 2022 lalu. Meskipun di satu kawasan, sawah-sawah itu berada di dalam administrasi 3 desa, yaitu Desa Sukaurip, Desa Sukareja dan Desa Tegal Sembadra. Sawah itu oleh masyarakat disebut sawah ranjeng, sebuah sebutan untuk areal sawah yang telah dibebaskan oleh Pertamina.

Selain untuk industri petrokimia, pembebasan lahan juga akan dilakukan untuk perluasan RU VI sebagai amanat proyek strategis nasional. Kilang minyak yang dibangun sejak 1990-an itu dalam beberapa tahun ke depan akan diperluas untuk memperbesar kapasitas produksi per barel per tahunnya, yang konsekuensinya membutuhkan lahan yang tidak sedikit. Berdasarkan tuturan banyak informan, area yang akan dibangun kawasan RU VI adalah lahan yang sekarang wilayah administratif Desa Majakerta.

Tidak seperti Industri Petrokimia yang menggusur lahan sawah, proyek perluasan RU VI akan menggusur seluruh wilayah Desa Majakerta. Dengan kata lain, dalam waktu dekat semua masyarakat Majakerta akan terusir dari lahan dan sejarah yang eksis di atasnya.

Penggusuran desa ini juga telah terjadi pada saat pertama kali RU VI dibangun pada 1980-an. Bangunan kompleks kilang pengolahan minyak tersebut dulunya adalah Desa Sukareja. Setelah digusur desa itu direlokasi ke Desa Sukareja yang sekarang, yang berbatasan dengan Desa Sukaurip. Saat ini desa itu menjadi desa yang menyerupai kompleks perumahan yang memiliki wilayah administratif desa yang dihuni oleh orang-orang yang dulu hidup di atas tanah RU VI. Meskipun menurut warga, pada saat itu tidak semua warga menempati area tersebut. Sebagian dari mereka ada yang pindah ke desa lain (Wawancara Haris, 2022). Di antaranya ada yang pindah ke Balongan Blok Pesisir, Balongan Blok Kesambi, Sukaurip, Tegal Urung, Singaraja dan ada sebagiannya memilih pindah ke Cirebon atau kembali ke kampung asal orang tua mereka (Ahlan, 2020).

Diceritakan pada 1980-an lalu sempat terjadi penolakan penggusuran oleh masyarakat. Pembebasan lahan RU VI berjalan bertahun-tahun. Sampai akhirnya ada peristiwa di mana masyarakat diberikan uang berupa kasbon oleh pihak Pertamina. Pada saat itu Kuwu Sukareja yang menandatangani pelelangan desanya. Akan tetapi Kuwu tersebut tidak menjelaskan apa-apa kepada masyarakat terkait pelelangan tersebut, sampai belakangan masyarakat mengetahuinya dan terpaksa menerima ganti rugi atas lahan dan rumahnya (Maneke, 2020). Sekarang, Desa Sukareja sudah tidak lagi menyerupai desa pesisir, melainkan lebih seperti kompleks perumahan.

Pada saat itu yang dilelang bukan hanya pemukiman Sukareja, melainkan juga lahan sawah yang berada di sebelahnya. Saat ini sawah yang dimaksud adalah sawah yang berada tepat di depan kompleks Pertamina.

Sawah tersebut sudah milik Pertamina, namun warga masih diperbolehkan menggarap. Sawah tersebut mulanya luas hampir ke bibir pantai. Sebab sebelum ada pabrik, area tersebut sangat subur meskipun dengan dengan laut. Airnya masih segar, tidak terkontaminasi asin.

Lahan yang dulu dibebaskan dan belum dipakai oleh Pertamina, sampai sekarang masih digarap oleh masyarakat. Penduduk setempat menyebutnya sawah Ranjeng lama. Luasnya kira-kira 150 meter ke selatan dari komplek Pertamina. Ranjeng lama itu kemudian digarap oleh masyarakat dari sepuluh desa, yaitu Desa Balongan 15 Ha, Desa Majakerta 16 Ha, Desa Sukaurip 16 Ha, Desa Sukareja 16 Ha, Desa Tegal Urung 5 Ha, Desa Rawadalem 5 Ha, Desa Tegal Sembadra 5 ha, Desa Gelarmendala 5 Ha, Desa Sudimampir dan Desa Sudimampir Lor 5 Ha.

Hal serupa juga terjadi pada pengusuran lahan pada awal 2022. Lahan yang akan dibangun komplek industri petrokimia adalah lahan sawah dari tiga desa: Sukaurip, Sukareja dan Tegal Sembadra. Lahan ini kemudian disebut lahan sawah blok Ranjeng Baru. Letaknya sebelah selatan dari sawah Ranjeng Lama. Semua sudah dibayarkan ganti ruginya. Seperti halnya Ranjeng Lama, masyarakat di tiga desa itu pun masih diperbolehkan menggarap sawah di Ranjeng Baru. Akan tetapi hanya digarap oleh petani dari tiga desa itu saja (Wawancara Erwin, 2022).

Pertamina menyerahkan kepada pemerintah desa untuk membagi-bagi petak lahan kepada petani penggarap di Penyangga Baru. Rata-rata dari petani diberi garapan mulai dari 60 bata sampai 120 bata. Cara pembagiannya menggunakan kretek atau lot atau undian. Di sawah sudah dipetak-petak, yang masing-masing sudah diberi kode nomor dan huruf. Di kretek itu ditulis kodenya beserta luas lahannya. Pembagian tersebut tidak dibuat rata, karena akan memakan banyak biaya dan tenaga, karena harus membuat galengan ulang. Jadi berdasarkan petak-petak yang sudah ada, lalu dibagi-

bagi dan dipatok-patok. Jumlah lahan yang dibebaskan Pertamina di Penyangga Baru adalah 40 Ha. Dari jumlah itu dibagi untuk tiga desa. Namun, sebelum itu dipotong 7 Ha untuk digarap oleh 7 desa yang tanahnya tidak tergesur oleh industri petrokimia, seperti Tegalurung, Balongan dan Siwatu.

Petani yang menggarap lahan dikenai sewa per masa tanam. Per bahu petani dikenai sewa senilai 1,5 kwintal gabah. Akan tetapi pihak pemerintah hanya menerima sewa berupa uang tunai. Sehingga jika diuangkan petani harus membayar 675 ribu rupiah per 100 bata. Harga itu dianggap lebih murah jika dibandingkan harga sewa ke perorangan yang mencapai 7 juta per 100 bata per tahun. Lalu, uang sewa itu digunakan oleh pemerintah desa untuk kebutuhan pembangunan (Wawancara Erwin, 2022).

Meskipun sewa yang relatif terjangkau, bertani di tiga desa tersebut tidak mudah. Ada beberapa sebabnya seperti masalah sawah yang tadah hujan, tidak subur dan rawan banjir. Mengenai sawahnya yang sebagian ada yang tadah hujan itu membuat petani hanya bisa menanam dua musim saja dalam satu tahun. Bahkan ketika musim penghujan datang, tidak jarang areal sawah tersebut tergenang banjir karena saluran pembuangan ke laut tidak begitu lancar. Meskipun genangan nya tidak lama, hal itu mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panennya karena akan memicu datangnya hama. Biasanya padi muncul bercak-bercak putih. Sementara untuk sawah yang memperoleh irigasi pun kualitas airnya tidak baik karena mengandung kadar garam yang tinggi. Sehingga paling besar panen hanya 8 kwintal per 100 bata (Wawancara Erwin, 2022). Padahal menurut tuturan masyarakat, sebelum ada Pertamina dulu air di daerah tersebut terasa segar (Maneke, 2020).

ii. Pertamina Balongan, Limbah dan Pencemaran Ekosistem Laut, Tambak dan Sawah

Desa-desanya yang ada di kecamatan Balongan kabupaten Indramayu berada di sekitar kawasan pesisir pantai utara Jawa. Oleh karena itu, banyak warga desa di kecamatan Balongan itu berprofesi sebagai nelayan. Misalnya, di desa Majakerta sebagian besar warga menggantungkan penghidupan (*livelihood*) mereka sebagai nelayan (kecil). Nelayan kecil di desa Majakerta menangkap (a) ikan, (b) udang dan (c) rajungan. Nelayan kecil itu sangat menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Nelayan Majakerta digolongkan sebagai nelayan kecil yang menangkap ikan secara tradisional sehingga ia ramah terhadap ekosistem laut (Nugroho & Sulistiono, 2017).

Masing-masing nelayan memiliki penghasilan yang variatif tergantung dengan musim. Musim rajungan terjadi pada November-Februari, musim udang terjadi pada November-April dan musim ikan terjadi pada Maret-Juli (Nugroho & Sulistiono, 2017: 121). Untuk menambah penghasilan terutama ketika penghasilan dari nelayan kurang (Nugroho & Sulistiono, 2017: 121 & 126), mereka juga bekerja sebagai petani penggarap dengan menyewa lahan dari Pertamina sebesar 1.2 juta/tahun. Rata-rata penghasilan yang didapat oleh nelayan rajungan adalah sekitar 482.500/bulan (Nugroho & Sulistiono, 2017: 122), penghasilan nelayan udang adalah sekitar 2.260.833/bulan (Nugroho & Sulistiono, 2017: 123) dan penghasilan nelayan yang menangkap rajungan dan udang adalah 995.833/bulan (Nugroho & Sulistiono, 2017: 124).

Nugroho & Sulistiono (2017) menegaskan bahwa usaha perikanan tangkap (ikan, udang dan rajungan) skala kecil nelayan itu merupakan sebuah mata pencaharian yang penting dan menguntungkan bagi warga desa Majakerta. Rata-rata penghasilan nelayan kecil Majakerta mampu memberikan keuntungan yang variatif dimana nelayan penangkap udang

merupakan pekerjaan yang paling menguntungkan dibandingkan yang lain. Namun, berkaitan dengan keberadaan Pertamina RU-VI Balongan, nelayan kecil Majakerta dan luar Majakerta mengeluhkan keberadaan instalasi jaringan pipa dan patok-patok bawah laut milik Pertamina yang mengganggu aktivitas penangkapan hasil laut mereka. Instalasi pipa bawah laut itu menghalangi alat tangkap mereka untuk bekerja secara maksimal dan seringkali merusak alat tangkap nelayan sehingga mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk perbaikannya. Memang konflik pemanfaatan ruang telah terjadi di Balongan dimana area-area yang ada patok-patok dan instalasi pipa bawah laut tersebut merupakan zona larangan bagi nelayan tetapi nelayan menganggap zona tersebut merupakan area yang menghasilkan tangkapan laut yang banyak (Nugroho & Sulistiono, 2017: 120 & 126).

Selain itu, ada beberapa pencemaran yang dihasilkan oleh Pertamina RU-VI Balongan yang semakin mendegradasi ekosistem laut di Balongan. Misalnya, kebocoran minyak mentah akibat kebocoran yang dibawa oleh kapal pengangkut sangat membahayakan karena bisa mengakibatkan sedimentasi, merusak ekosistem biota laut dan habitatnya. Kebocoran seperti ini pernah terjadi di perairan Pertamina RU-VI Balongan pada 2008 (Umroh, 2011). Selanjutnya, pengolahan minyak mentah di kilang minyak Pertamina RU-VI Balongan juga menghasilkan berbagai limbah (seperti partikel, gas karbon monoksida (CO), gas karbondioksida (CO₂), gas belerang oksida (SO₂), Amoniak (NH₃) dan uap air yang bisa mencemari air, tanah dan udara. Diantara kadar limbah yang lain, kadar amoniak di *Outlet Impounding Basin* (OIB) melampaui ambang batas yang telah ditetapkan karena lebih dari 25 mg/L (Utami, 2014: 20). Dan, pengolahan limbah cair yang dilakukan oleh Pertamina RU-VI Balongan tidak memenuhi Pedoman Baku Mutu Lingkungan Lampiran II dan III untuk biota laut dan wisata bahari

yaitu untuk parameter Amonia berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 51/2004 tentang Baku Mutu Air Laut. Sehingga, limbah cair Pertamina Balongan yang dibuang ke laut itu bisa mengancam dan berbahaya bagi keberlangsungan biota laut dan pengunjung lokasi wisata bahari di sekitarnya (SUSANTHY et al., 2008).

Selain tidak mendapatkan dampak positif secara ekonomis, warga desa Majakerta menerima dampak negatif paling besar dari keberadaan Pertamina RU-VI Balongan. Dampak negatif itu diantaranya adalah (1) degradasi lingkungan pesisir, (2) pencemaran pantai dan laut akibat dari tumpahan minyak, (3) pencemaran gas limbah produksi yang mengganggu kesehatan saluran pernafasan warga sekitar, (4) pencemaran suara bising dari mesin produksi yang mengganggu terutama di malam hari akan terdengar sangat keras, (5) pencemaran air sumur warga dan (6) getaran besar yang menggetarkan rumah warga jika mesin sedang beroperasi besar-besaran yang rutin terjadi 3-4 bulan sekali (Ayodya & Rusmana, 2017: 1261). Misalnya, pipa bawah tanah Pertamina Balongan yang ditanam di desa-desa sekitar pernah mengalami kebocoran. Kebocoran pipa bawah tanah itu terjadi karena pekerja Pertamina Balongan lalai dan menyepelekan prosedur. Pertamina Balongan juga dianggap tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap pekerjaannya sehingga kebocoran fatal itu telah mencemari lingkungan sekitar (Heryuanita, 2016).

Selain Majakerta, desa pesisir yang terkena dampak kebocoran limbah adalah desa Balongan. Jika Majakerta berdampingan langsung dengan RU VI di sebelah timur, Desa Balongan justru berada tepat di belakang RU VI. Dari jalan raya, desa ini tidak akan terlihat, sebab tertutup Komplek Pertamina, khususnya di Blok Kesambi. Blok ini diapit oleh kawasan Komplek Pertamina, berdampingan langsung dengan aktivitas industri. Oleh

karena itu, desa ini adalah desa yang paling mengalami pendalaman krisis sosial ekologis.

Sebagai desa pesisir, dulu masyarakat Balongan sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Selain itu masyarakat Balongan banyak juga yang bermata pencaharian sebagai petani, baik sawah maupun tambak udang dan ikan. Setelah pada 1980-an ada perluasan kompleks Pertamina, masyarakat mulai mengalami kesulitan dalam memperoleh hasil laut, terutama blok yang berdekatan dengan RU VI. Sebab RU VI adalah pabrik pengolahan yang menyuling minyak mentah menjadi beberapa bahan jadi seperti BBM dan bahan baku produk petrokimia. Sehingga potensi limbah sangat besar. Limbah inilah yang kemudian mencemari lahan dan air di Balongan.

Pencemaran lahan oleh Pertamina menurut warga sudah lama dirasakan, meskipun warga biasanya tidak secara tepat mengingat kapan itu mulai terjadi. Seperti diucapkan Pak Raut kepada Ahlan yang dicatat dalam laporan penelitiannya:

“Semenjak adanya Pertamina tanah mulai kurang subur. Sekarang tanah seperti ibu tiri berbeda dengan dulu. Dulu tanah sebagai ibu kandung kita. Dulu petani mengasah cangkulnya di lahan sawah. Sekarang petani hanya bisa mengasah otaknya untuk menyambung hidup. Dulu itu (tanah pesisir) masih bisa ditanami apa saja. Seperti semangka, jagung dan kacang”.

Selain petani, masyarakat Balongan dulu bermata pencaharian sebagai petani garam, petambak bandeng atau udang windu. Ada juga yang bekerja mencari ikan di laut di malam hari, yang biasanya membawa petromak karena pada saat itu belum ada listrik. Pada 1980-an saja masih ramai orang yang mencari ikan untuk makan dan mencari benur dan udang rebon. Pada saat itu biota-biota laut itu masih mudah untuk ditemui. Menurut Pak Raut dalam seperempat jam saja orang sudah bisa mendapat ribuan benur ikan dan udang

dengan menggunakan jaring. Bahkan bukan hanya masyarakat setempat, masyarakat di desa-desa lain pun seperti dari Juntinyuat mengais rezeki dan pantai Balongan (Maneke, 2020).

Pada 1985-an air di sungai masih bisa dikonsumsi. Airnya masih terasa tawar dan belum tercemar oleh limbah. Sejak Pertamina berdiri kondisi sosial ekologis mulai berubah.

Secara permukaan saja pencemaran itu sangat nampak. Pada saat peneliti tinggal di desa-desa sekitar Pertamina sudah bisa merasakan bau yang menyengat. Baunya bisa dirasakan sampai ke Desa Sukaurip, sampai lebih dari 100 meter dari kompleks Pertamina. Ketika melintas di depan kompleks Pertamina, di sepanjang jalan saat melintas sudah dapat dirasakan aroma yang mirip minyak yang sangat tidak sedap. Bau itu berasal dari genangan sawah yang ada di pinggir-pinggir depan Pertamina.

Desa-desa terdampak Pertamina Balongan dikategorikan ke dalam dua wilayah. Ada desa yang masuk ke wilayah ring satu, seperti desa Sukaurip, Sukareja, Tegal Sembadra, Balongan, Majakerta, Tinumpuk, dan Lombang. Kemudian sisanya ada lima desa di kecamatan Balongan yang masuk ke dalam wilayah ring dua. Itu sisanya masuk ring dua.

Pak Haris, karyawan proyek, mengatakan bahwa Pertamina selalu membuangnya ke laut, meskipun dirinya tidak tahu bagaimana secara teknis hal itu dilakukan. Akan tetapi dalam praktiknya yang jelas metode pembuangan limbah itu dapat dilakukan sendiri. Pembuangannya dengan dua cara. Satu dengan *flair*, yaitu pembuangan gas yang dirasa tidak layak guna. Kemudian untuk limbah minyaknya dibuang ke laut. Sehingga panta jika ada berita seperti yang terjadi di laut sudah tercemar limbah karena limbahnya itu d buang ke laut menggunakan pipa. Pipa tersebut diarahkan ke dasar laut,

membuang limbah tersebut ke dasar laut. Akan tetapi kemudian ia terbawa ombak ke tepian juga.

Pada awal 2022 lalu media memberitakan bahwa laut Balongan tercemar. Hal rupanya itu karena Pertamina sedang melakukan *turn around* atau TA, melibatkan sekitar 15000 karyawan yang dipekerjakan dalam 3 bulan. Dari *turn around* itu semua mesin dibersihkan ulang, sehingga air yang dipakai tercampur dengan zat lain dan jadilah limbah (Wawancara Harris, 2022).

Turn Around (TA) itu dilakukan setiap tahun, biasanya pada akhir tahun, yaitu sekitar November-Desember. Namun per lima tahunan ada pengecekan kondisi mesin, termasuk jantung pertamina yaitu bangunan besar yang terlihat dari pinggir jalan yang terletak di kawasan RU VI. Sehingga limbah yang dihasilkan pun berkali-kali lipat. Ada pun yang paling terdampak dari pencemaran ekosistem laut itu adalah tambak-tambak dan nelayan kecil di sekitar pantai Balongan.

Sejak dulu masyarakat Balongan sudah memanfaatkan hasil laut sebagai mata pencaharian utama. Pak Mista sudah menggarap tambak sejak 1955. Pada 1973 mulai ada bibit ikan bandeng ke Balongan. Namun, pada tahun 1985 ia menjadi nelayan laut. Di tahun ini masih banyak kapal di pinggiran sungai Balongan Blok Dua. Kebanyakan mereka sebagai nelayan pinggiran yang cukup untuk memenuhi keperluan makan harian keluarga.

Namun setelah munculnya nelayan yang menggunakan alat tangkap *arad* atau *garok* (istilah lokal) nelayan di Balongan mulai berkurang drastis. Alat *garok* dalam prakteknya merusak terumbu karang/rumah ikan di pinggiran pantai. Ikan yang masih kecil atau belum siap untuk dikonsumsi ikut tertangkap jaring *garok* itu. Sehingga tangkapan nelayan pinggiran semakin menurun karena ikan tidak sebanyak dulu. *Garok* mulai digunakan pada 1990-an oleh nelayan lokal untuk meningkatkan hasil tangkapannya.

Lalu semenjak tahun 2000-an Pak Mista mulai mengelola tambak. Tambaknya bisa ditanami udang 3 kali panen dalam satu tahunnya. Ia sendiri menanam 100 ribu bibit untuk 3 tambak miliknya. Harga setiap ekor udang 350 rupiah. Sudah 4 kali tambaknya tercemar limbah pertamina. Jika tambak sudah terkena limbah airnya berbusa dan berwarna putih seperti susu. Dengan demikian ikan dan udang akan mati. Durasi kematiannya ada yang secara langsung ataupun bertahap. Ketika mengalami pencemaran limbah Pertamina tambaknya ditanami ikan bandeng dan udang windu.

Jumlah ikan bandeng yang Pak Mista tanam waktu itu 10.000 ribu bibit. Sementara untuk udang windu 25.000 ribu bibit. Harga 1 bibit bandeng 80 Rupiah sedangkan udang windu 40 Rupiah untuk 1 ekornya. Ikan bandeng miliknya sudah berumur 2 bulan sebelum tercemar limbah. Akan tetapi karena limbah tersebut, ia mengalami gagal panen. Biasanya itu karena umur bandeng masih 2 bulan dan tidak memiliki daya tahan yang kuat. Pak Mista karena itu merugi besar, sebab walaupun dijual tidak ada harganya. Maka Pak Mista memilih membiarkan bandengnya tidak dipanen sampai mati dengan sendirinya karena limbah itu. Termasuk udang windu miliknya mengalami gagal panen karena waktu penanamannya berbarengan dengan ikan bandeng yang masih berumur 2 bulan. Usia siap panen yang ideal bagi udang windu yaitu 4 bulan. Di usia 2 bulan itu sama saja tidak harganya dan dibiarkan begitu saja sampai mati dengan sendirinya.

Kerugian yang dirasakan mulai dari modal bibit, pakan, pendapatan harian yang didapatkan dalam satu kali masa panen 4 bulan itu. Pendapatan harian itu artinya ketika udang sudah mulai panen, udang diambil dengan estimasi 5 kilogram udang setiap harinya. Termasuk masa pemulihan tambak ketika masih tercemar limbah juga dihitung ke ganti rugi 40 juta itu. Hal tersebut karena tambak yang terkena limbah tidak bisa langsung ditanami udang setelah panen dilakukan. Gagal panen terjadi sekitar 20 tahunan yang lalu.

Pencemaran limbah Pertamina juga dialami hampir oleh semua penambang yang ada di Indramayu. Kejadian itu mengakibatkan rata-rata dari setengah bibit yang ditanam petani tambak mati. Ganti rugi diberikan sebanyak 23 juta untuk Pak Mista dengan perhitungan luas tambaknya. Nominal ganti rugi diberikan sesuai luasan tambak yang dimiliki oleh para penambang. Jika penambang memiliki banyak tambak ia bisa mendapatkan uang ganti rugi miliaran rupiah.

Di Balongan banyak warga yang mencari udang rebon. Wilayah tangkapannya tidak jauh dari bibir pantai, kurang lebih sekitar 10 sampai 30 Meter dari bibir pantai. Tidak kenal waktu dalam pencarian udang rebon. Namun umumnya warga mulai mencari udang rebon mulai pagi hari sampai sore hari. Pak Mista menuturkan jika di bulan 11 sampai 8 adalah bulan dimana udang rebon itu banyak ditemukan. Ukuran sedang banyak atau tidaknya udang rebon di pinggiran laut ditentukan oleh musim. Musim hujan adalah musimnya udang rebon karena cuacanya adem. Di musim inilah udang rebon mudah dan banyak didapatkan oleh warga Balongan. Rata-rata setiap warga mendapatkan udang rebon 1 kwintal setiap harinya. Teknis menangkap udang rebon sederhana, nelayan cukup turun ke laut dengan jarak 20 meter, cukup bermodal jaring sebagai alat tangkapnya dan tempat secukupnya untuk menyimpan hasil tangkapannya. Sehingga tidak perlu modal besar dalam pekerjaan ini.

Udang rebon dihargai 4-5 ribu rupiah perkilonya. Jumlah secara keseluruhan mereka yang berstatus sebagai pencari udang rebon di Balongan yaitu 600an orang. Para pencari udang rebon menjualnya ke bandar-bandar lokal dan ke daerah Junti. Tidak susah sebetulnya untuk menjual udang rebon karena bandar-bandar lokal pun jumlahnya banyak. Harga udang rebon untuk musim hujan cenderung lebih murah yaitu kisaran 3/4 ribu. Sementara jika musim panas/kemarau harganya naik yaitu 5 ribu rupiah. Perbedaan

harga tersebut karena cuaca di musim panas lebih mempermudah penjemuran udang oleh para bandar. Sebaliknya ketika musim hujan bandar lebih susah melakukan penjemuran. Akan tetapi pencemaran limbah minyak telah berpengaruh besar terhadap penurunan/kelangkaan udang untuk para nelayan udang rebon. Sekarang pencari udang rebon sudah tidak terlihat lagi, khususnya di Balongan.

iii. Kebisingan, Ledakan Pertamina RU-VI dan Trauma Warga

Dengan teknologi tingkat tinggi, perhari kilang Pertamina RU-VI Balongan mampu mengolah 20.313 kl minyak mentah dan 5.247 kl nafta. Sekitar 60 persen kebutuhan BBM dan 75 persen kebutuhan LPG DKI-Jakarta di-*supply* dari hasil pengolahan Pertamina RU-VI Balongan Indramayu (1). Sebagian besar kebutuhan BBM DKI-Jakarta dipasok dari hasil pengolahan dari kilang Pertamina RU-VI Balongan. Meskipun Pertamina RU-VI Balongan telah menerapkan standar perlindungan atas kebisingan terhadap alat pendengaran para pekerjanya, berbagai mesin yang digunakan untuk penyulingan minyak mentah menghasilkan tingkat kebisingan yang besar. Tingkat kebisingan itu mencapai 101 dBA di area kilang Pertamina RU-VI Balongan (Huboyo, 2008: 6).

Berdasarkan pengujian kebisingan di salah satu unit (yaitu AHU - *Atmospheric Hydrodemetalization Unit*) dari Pertamina RU-VI Balongan. (Fungky, 2014) menyimpulkan bahwa tingkat kebisingannya telah melebihi ambang batas, yaitu sebesar 77,2-91,4 dB. Sehingga, kebisingan itu bisa membahayakan lingkungan di sekitarnya terutama bagi tenaga kerja Pertamina. Meskipun Pertamina telah memiliki hearing conservation program tetapi tidak semua tenaga kerja Pertamina dibekali helmet dengan *earmuff*. Ada semacam dampak yang sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan pekerja.

Berkaitan dengan keselamatan sosial, Pertamina beberapa kali mengalami kebocoran baik gas maupun minyak. Ledakan paling besar terjadi pada 29 Maret 2021 lalu, yang mau satu kilang minyak meledak. Ledakan itu disebabkan oleh kebocoran minyak yang tidak terkelola dengan baik oleh Pertamina. Masyarakat Balongan menuturkan bahwa sebenarnya sejak sore hari warga sudah mencium bau minyak dan menduga telah ada kebocoran. Masyarakat menggeruduk dan meminta kejelasan karena takut terjadi ledakan. Akan tetapi pihak Pertamina tidak menemui masyarakat untuk memberikan kejelasan dugaan masyarakat tersebut.

Masyarakat sempat membubarkan diri. Akan tetapi masyarakat tetap merasa ketakutan dan kembali menggeruduk Pertamina pada pukul 21.30-an. Akan tetapi Pertamina tidak juga memberi penjelasan yang memadai. Sampai akhirnya tindakan diam itu menyulut kemarahan masyarakat dan sempat terjadi aksi lempar batu ke kantor Pertamina. Unjuk rasa itu terus berlangsung sampai tengah malam. Sampai pada pukul 00:45 terjadi ledakan yang besar di kilang dekat Dusun Wisma Jati Desa Suka urip.

Ledakan itu membuat warga berhamburan menyelamatkan diri. Begitu juga warga yang berada di rumah di sekitar Komplek Pertamina turut panik berhamburan karena mereka khawatir ledakan itu akan merembet. Sebab masyarakat mengetahui bahwa ada pipa-pipa yang dibangun di pemukiman mereka. Masyarakat langsung melarikan diri. Sebagian besar mengungsi di tempat yang telah disediakan. Sebagian lain mengungsi di rumah kerabat mereka yang tinggal di kecamatan lain. Pengungsian itu berlangsung beberapa hari sampai pihak Pertamina memastikan situasinya sudah aman.

Ledakan itu telah menyebabkan rumah-rumah yang dekat dengan ledakan mengalami kerusakan dan menyisakan trauma di benak masyarakat. Sebagian ada yang dinding-dinding rumahnya mengalami retak-retak. Karena itu masyarakat menuntut Pertamina untuk memberikan ganti rugi.

Akhirnya beberapa bulan kemudian setelah ledakan Pertamina memberikan ganti rugi tersebut. Adapun mengenai trauma, masyarakat mengaku bahwa trauma ledakan itu masih sering dirasakan. Masyarakat merasa ketakutan setiap mendengar suara petir. Selain itu setiap terjadi bau gas atau minyak yang menyengat masyarakat langsung merasa panik (Wawancara Haris, 2022).

Pada awal 2022 masyarakat melakukan demonstrasi lagi karena mencium bau gas yang menyengat. Pada demonstrasi ini Pertamina lebih terbuka dan memastikan bahwa apa yang dikhawatirkan masyarakat sudah dapat dikendalikan. Setelah diyakinkan akhirnya masyarakat membubarkan diri. Adapun masyarakat yang paling merasakan trauma tersebut adalah masyarakat yang paling dekat dengan Komplek Kilang Pertamina yaitu Blok Wisma Jati, Desa Sukaurip dan Blok Kesambi Desa Balongan. Dua blok itu terletak tepat berdampingan dengan RU VI dan sangat dekat dengan kilang yang meledak pada Maret 2021 tersebut.

Menurut Pak Haris, warga Blok Kesambi dan Blok Wisma Jati tersebut sudah sering ditawari untuk digusur karena sangat dekat dengan Pertamina, akan tetapi mereka tetap menolak. Di Wisma Jati ada makam Ki Buyut, karena itu mereka menolak untuk digusur. Sedangkan menurut informan yang lain, sebab masyarakat memilih hidup berdampingan dengan Pertamina karena dengan begitu masyarakat bisa berada di Ring Satu dan berharap diprioritaskan dalam hal perolehan pekerjaan proyekan. Sebab kondisi ekologis desa sudah rusak, dan hanya pekerjaan outsourcing itu lah yang menjadi tumpuan hidup mereka.

iv. Abrasi dan Hilangnya Lahan Garapan Warga

PT Pertamina RU-VI Balongan telah menyebabkan abrasi pantai di Balongan Indramayu. Misalnya, pembangunan pelabuhan Jetty Pertamina RU-VI Balongan secara berbarengan telah mengakibatkan pendangkalan (sedimentasi) dan abrasi (pengikisan daratan). Sedimentasi itu terjadi di sekeliling pelabuhan Jetty yang menjorok ke laut saja. Sedangkan abrasi itu terjadi area sekitar pelabuhan Jetty. Laju sedimentasi ini terjadi secara tidak merata dan tidak mampu mengimbangi laju abrasi. Alhasil, pada 2003 kecepatan laju abrasi di sekitar pelabuhan Jetty Pertamina Balongan itu mencapai 1-4 meter per tahun (Lukman & Beben, 2016: 26).

PT Pertamina Balongan sebenarnya telah berusaha untuk menahan laju abrasi tersebut dengan membangun tembok laut di sekitar area operasionalnya. Akan tetapi, tembok laut yang dibangun di sepanjang wilayah kilang minyak Pertamina RU-VI Balongan telah mengalami kerusakan yang parah. Alhasil, fungsi tembok laut itu untuk menahan laju erosi atau abrasi telah melemah secara signifikan. Struktur bangunan tembok laut itu hanya dibangun dengan satu lapis batuan sehingga ia mudah sekali rusak oleh serangan ombak. Sekarang, tembok laut itu sudah tidak mampu menahan laju erosi dan berakibat pada kerusakan saluran air dan jalan yang ada di belakang tembok laut (Msiren, 2016). Meskipun begitu, Pertamina menolak mengakui bahwa pihaknya yang menjadi penyebab tingginya laju abrasi di daerah tersebut (Wawancara Pak Mista, 2022).

Selanjutnya, pengalihfungsian lahan-lahan pertanian sekitar Balongan semakin memperburuk kondisi sosio-alamiah wilayah sekitar dan memperparah kondisi kemiskinan warga Majakerta. Misalnya, banyak warga Majakerta tidak bisa menjadi petani lagi karena sebagian besar lahan pertanian mereka telah dibeli Pertamina dan hasil dari aktivitas nelayan di laut semakin menurun dikarenakan hilir mudik kapal tanker yang membawa batu bara dan minyak mentah yang mencemari area tangkapan nelayan. Oleh

karena itu, banyak warga Majakerta yang mencoba untuk beralih profesi dan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan (Ayodya & Rusmana, 2017: 1261).

Dari perspektif masyarakat Balongan, mereka meyakini bahwa laju abrasi yang sangat cepat di desanya itu disebabkan oleh aktivitas pengerukan dasar laut oleh Pertamina. Masyarakat tidak mengetahui secara pasti bagaimana pengerukan itu dilakukan. Akan tetapi Pertamina melakukan pengerukan di sekitar jetty yang menjorok ke laut untuk mengatasi pendangkalan. Sebab jika terjadi pendangkalan, kapal-kapal tanker Pertamina akan kesulitan untuk berlabuh, sehingga akan sangat menghambat laju produksi.

Akibat dari pengerukan itu tanah yang berada di dasar laut pinggiran akan cenderung semakin bergerak ke dasar laut, sampai akhirnya mengalami pengikisan tanah di area pantai. Tarwan, nelayan tambak Balongan, menyebutkan bahwa hal itu sebenarnya diketahui oleh sebagian besar orang di Balongan. Akan tetapi masyarakat tidak menuntut Pertamina karena tidak mampu membuktikannya secara ilmiah. Sedangkan Pak Mista mengatakan bahwa dari pantai yang sekarang menuju bibir pantai pada saat jetty tersebut belum dibangun diperkirakan ada lebih dari 400 meter. Artinya ada lahan yang sangat luas yang hilang akibat peristiwa abrasi tersebut. Dulunya lahan yang hilang itu terdiri dari lahan pertanian padi, tambak garam dan tambak perikanan tradisional.

v. *Corporate Social Responsibilities: Pemberdayaan, Fragmentasi dan Konflik Horizontal*

Di tengah dampak-dampak sosio-alamiah yang merugikan warga Balongan, PT Pertamina berusaha menyalurkan *Corporate Social*

Responsibilities (CSR) dalam bentuk program-program pemberdayaan masyarakat. Misalnya, CSR Pertamina Balongan menginisiasi sebuah program Dermayu (Desa Wisata Pantai Tirta Ayu telah menghasilkan beberapa manfaat terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar. Wisata Pantai Tirta Stu dikelola oleh BUMDES Balongan (CBT – *Community-Based Tourism*) sehingga ia memberikan manfaat ekonomis bagi pemerintah dan masyarakat desa Balongan. Pertamina Balongan kemudian hadir berkolaborasi dengan membawa program Coastal *Eco-based Tourism* (CET) yang diberi nama program ‘Dermayu’. Program Dermayu Pertamina ini telah meningkatkan daya saing wisata pantai Tirta Ayu dari sisi pengadaan prasarana yang ramah lingkungan, edukasi tentang kelestarian lingkungan dan pelibatan pemuda lokal dalam pengelolaan sampah di kawasan wisata. Program Dermayu ini diklaim mampu mengurangi timbunan sampah, meningkatkan pendapatan anggota kelompok dan memberikan peluang usaha bagi masyarakat lokal (Wulandari, 2021).

Di desa Sukaurip, program CSR yang dilakukan oleh Pertamina RU-VI Balongan sejak 2011 dalam bentuk pembudidayaan jamur tiram di desa Sukaurip telah memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi warga. Selain menanamkan semangat kewirausahaan dan peningkatan kapasitas warga, Pertamina Balongan juga mengembangkan pelatihan konsep zero waste guna menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya (Rhamadayanti, 2022). Ironinya, Pertamina Balongan menyuruh warga untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam pembudidayaan jamur tiram tersebut, tetapi pengolahan limbah Pertamina sendiri tidak memenuhi standar baku mutu (SUSANTHY et al., 2008).

Implementasi pemberdayaan komunitas dalam sektor pertanian oleh Pertamina Balongan itu sebenarnya telah sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indramayu yang mayoritas warganya berprofesi

sebagai petani. Misalnya, Pertamina Balongan meminjamkan lahan pertanian produktif miliknya seluas 140 Ha yang ada di blok ‘ranjeng’ (yang masuk ke wilayah administratif tiga desa, yaitu desa Sukaurip, Sukareja dan Tegalsembadra) kepada warga masyarakat. Lahan pertanian tersebut sebenarnya telah dibeli dari warga, tetapi sementara ini Pertamina Balongan masih belum memanfaatkannya. Namun, pembagian pemanfaatan lahan tersebut oleh warga seringkali menimbulkan gesekan (friksi) antar warga (Ridwanullah et al., 2009).

Yang mengejutkan, Pertamina RU-VI ternyata tidak memiliki lembaga atau bidang tersendiri dalam menjalankan dan mengevaluasi pelaksanaan program CSR-nya secara menyeluruh. Akibatnya, program-program CSR yang dilakukan oleh Pertamina Balongan dilakukan oleh karyawan biasa tanpa kompetensi khusus berkaitan dengan CSR. Sehingga, masyarakat target CSR gagal memahami tujuan dari pelaksanaan program CSR dan setali tiga uang Pertamina Balongan kurang memahami kebutuhan yang sebenarnya dari masyarakat dikarenakan pendekatan terhadap masyarakat dinilai kurang memadai (Setio & Rahayu, 2011).

Namun, ada program CSR dari PT Pertamina RU-VI Balongan yang justru menimbulkan permasalahan sosial. Misalnya, penyaluran dana CSR telah menyebabkan fragmentasi, friksi dan konflik sosial di Indramayu, terutama di Desa Majakerta. Desa Majakerta merupakan desa yang terletak di kecamatan Balongan dan berada paling dekat dengan Pertamina UP-VI Balongan. Konflik sosial itu dipicu oleh pembagian dana CSR dari Pertamina Balongan (1259 & 1264). Konflik sosial ini kemudian telah terpolarisasi dimana berbagai aktor terlibat dalam eskalasi konflik tersebut. Aktor-aktor yang terlibat konflik itu diantaranya adalah (1) Warga Majakerta, (2) Tokoh Masyarakat Majakerta, (3) Pemerintah Desa Majakerta dan (4) Pemerintah Kabupaten Indramayu (Ayodya & Rusmana, 2017).

Mayoritas warga Majakerta berprofesi sebagai (1) buruh (tani, nelayan atau bangunan), (2) petani dan (3) nelayan (yang memiliki perahu dan alat tangkap) (Ayodya & Rusmana, 2017: 1260-1). Namun, kondisi warga Majakerta secara umum masih miskin dan lemah secara ekonomi. Fakta ini merupakan sebuah ironi yang menunjukkan secara nyata bahwa keberadaan Pertamina di Balongan itu tidak memberikan keuntungan secara ekonomi terhadap desa yang berada tepat di sebelahnya (Ayodya & Rusmana, 2017: 1260).

5. PLTU Cirebon: Krisis Sosial Ekologis di Kawasan Pesisir

- a. Desa Citemu dan Pembangunan PLTU: Pembebasan Lahan, Friksi antar Gerakan anti-PLTU, dan Perubahan *Social Mindset*
 - i. **Dinamika Awal Pendirian PLTU-1**

Sejak awal rencana pendirian PLTU unit 1 di Desa Kanci tidak lepas dari penolakan warga desa terdampak. Penolakan warga terdampak itu sangat kuat di awal, tapi akhirnya perlahan penolakan itu melemah. Alasan penolakan warga terutama dikarenakan mereka terancam tidak kehilangan lahan garapannya. Pelemahan gerakan penolakan itu dipicu, diantaranya, oleh tawaran harga yang tinggi untuk lahan warga dan propaganda yang dijalankan oleh PLTU bahwa keberadaannya akan membuka lowongan pekerjaan bagi warga sekitar. Selain itu, orkestrasi isu yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintahan desa dan ketidakkonsistenan aktivis pendamping berhasil menimbulkan apatisme warga terhadap gerakan penolakan.

Di pemetaan awal itu murni gejala itu muncul di Kanci Kulon. Wilayah berdirinya PLTU itu masuk ke dalam desa Kanci Kulon. Banyak warganya yang memiliki lahan di situ. Pemetaan lahan untuk PLTU sudah dimulai sejak 2004. Sejak pemetaan, rencana pendirian PLTU itu sudah bocor. Awalnya semua warganya menolak, termasuk misalnya Aan yang memiliki lahan di situ dan digarap oleh saudaranya meskipun tidak luas. Selain Aan, ada Yoyo yang konsisten menolak PLTU sampai hari ini. Sampai sekarang, tanahnya tidak dijual yang berlokasi dekat taman Cirebon pinggir jalan. Lahan itu ditanami padi dekat dengan tembok lahan PLTU.

Sejak kabar pemetaan lahan ini, masyarakat mulai melek dan faham mengenai isu PLTU. PLTU adalah sebuah proyek besar dst. Alasan utama penolakan adalah ketidaktahuan dan dampak lingkungan terhadap lingkungan. Alasan itu sangat kuat waktu itu dan masyarakat mempercayai itu. Meskipun sebagian lahan tersebut tidak produktif (dibiarkan saja), warga sudah memiliki rencana untuk mengelola lahan itu agar produktif. Mereka merasa terancam bakal tidak bisa mengelola lahan mereka. Mayoritas lahan di lahan PLTU itu berupa tambak; garam atau bandeng.

Penolakan mulai berkurang karena para pemimpin (aktivis) gerakan anti-PLTU ternyata tidak konsisten. Ketidakkonsistenan itu membuat masyarakat goyah pada 2006. Rumor yang beredar para aktivis lokal tersebut merasa tidak akan kuat melawan kepentingan Negara. Sedikit demi sedikit masyarakat juga mulai apatis. Mulai ramai perang isu.

Ternyata para aktivis itu juga bernegosiasi dengan PLTU. Masyarakat mulai berkurang. Aan itu dari 2004-2008 sebenarnya konsisten. Tapi, Aan tidak bisa sendiri. Pada saat ini, walhi dan greenpeace mulai masuk. Namun, baik WALHI atau Greenpeace ini tidak bisa tiap hari ada di lokasi. Hal ini berpengaruh terhadap warga yang merasa *down* dan merasa dimanfaatkan saja. Sementara itu, propaganda bahwa PLTU beredar di masyarakat bahwa ia akan memberikan manfaat ke warga desa, misalnya lowongan pekerjaan dan peluang ekonomi lain bagi warga lokal.

Lahan di pinggir pantai yang tidak produktif itu akan dibeli oleh PLTU dengan harga yang lumayan gede waktu itu. Karena penolakan, harganya semakin dinaikkan oleh PLTU. Alhasil, secara perlahan warga mulai berubah pikiran. Penaikan harga lahan itu merupakan strategi PLTU atau sesuatu yang alamiah masih menjadi perdebatan. Di PLTU, warga yang menjual di awal karena terpengaruh mendapatkan harga yang lebih kecil daripada yang menjual lahannya di akhir. Sebenarnya tidak ada faktor intimidasi untuk menjual lahan, yang ada adalah godaan harga lahan yang semakin naik. Dan, strategi ini efektif.

Mayoritas (oknum) aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat itu mendukung PLTU. Mereka adalah aktor yang menyebarkan propaganda “udah, gak bakalan menang” “lawannya ini kepentingan Negara” di masyarakat.

ii. **Friksi antar Gerakan Anti-PLTU-1**

Pemutaran film *sexy killers* menyebabkan friksi antar aktivis anti-PLTU. Tanpa sepengetahuannya, aktivis Walhi Jabar, Meko, mengajak keponakan dari Aan Anwaruddin untuk ikut hadir di Nobar. Meko tidak tahu kalau yang diajak itu adalah keponakannya Aan. Mas Angga tanpa sadar berbicara tentang kelompok Ujang (Ansor-NU) dan Aan yang tidak hadir di acara “Halaqoh Santri Nelayan” sebelumnya, padahal Kang Ujang sudah menyatakan kesediaannya ketika *dijapri*. Keponakan Aan tersebut kemudian melaporkan apa yang diucapkan Angga tersebut. Akibatnya, Mas Angga kemudian dipanggil oleh Kang Ujang dan dikonfrontir mengenai ucapannya tersebut di padepokan Kang Ujang. “Kalau ngomong itu yang tahu batasan dong”, kata Ujang. “Maaf nih, obrolan yang mana nih karena waktu itu saya banyak ketemu orang Kang. Dan saya terus terang banyak ngomong”, jawab Angga. Angga lalu menunjukkan bukti jawaban Ujang di hapenya. “Ikut ta Kang? Siap hadir”, intinya Kang Ujang menyatakan siap ikut. Ketika disidang oleh Polsek di rumah Pak Kuwu, Angga dituduh mencatut nama Ujang. Meko-Walhi ini masuk ke PLTU melalui Aan. Pemain isu PLTU, Yosu, pernah dauber-uber oleh Wahyu-Walhi karena Yosu ini dekat dengan CSR-Proyek PLTU guna mencari informasi.

iii. Nasib Warga Penjual Lahan Sekarang

Secara ekonomis, warga yang menjual lahannya ke PLTU beralih profesi. Dan, sebagian mereka perekonomiannya semakin bagus secara ekonomis. Namun, ada juga warga yang gagal dalam usahanya. Uang yang didapat dari jual lahan itu

sebenarnya lumayan gede. Ada warga yang beralih profesi membuka warung klontongan. Ada yang dibuat modal untuk membuat CV dan menjadi partner dalam proses pembangunan PLTU, seperti proyek pengurangan lahan. Peralihan profesi ke warung klontongan, toko material bangunan dan peningkatan usaha yang sudah ada sebelumnya itu efektif. Nominal uang yang diterima dari penjualan lahan itu gede. Ada yang nilainya milyaran, misalnya Haji Persis Waruduwur. Kalau mayoritas mendapat ratusan juta. Jadi, sebenarnya masyarakat diuntungkan dengan harga lahan yang disetujui.

Banyak oknum atau aktivis LSM lokal yang bermain menjadi perantara ke PLTU bagi warga yang bingung gimana jualnya. Lalu, warga tersebut ketemu dengan broker atau makelar atau perantara tersebut untuk mengurus penjualan lahannya dan akan mendapatkan komisi.

Mayoritas lahan untuk PLTU itu adalah tanah timbul yang diklaim milik Perhutani. Perhutani ada di situ karena ada tanaman *mangrove*. Lahan tersebut yang jelas tanah milik Negara. Padahal, Perhutani tidak melakukan apa-apa terhadap keberadaan dan pengelolaan *mangrove* tersebut. DISTANBUNAKUT (Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan) adalah badan Negara yang mengelola tanah timbul tersebut. Tanah timbul itu terbentuk secara alami dan *mangrove* itu juga tumbuh secara alami. BLHK tidak muncul tetapi yang muncul adalah Perhutani. Di PLTU-2 itu juga yang muncul adalah Perhutani.

iv. Dampak terhadap Warga Sekitar yang Tidak Masuk dalam Lahan Pembangunan PLTU dan Kompensasi terhadap Nelayan Terdampak

Yang paling terdampak waktu itu adalah peternak kerang ijo. Mereka digusur karena akan dibangun pelabuhan jetty PLTU. Dan, menurut AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan), sebenarnya nelayan yang berada di satu satu setengah mil juga seharusnya mendapat dana kompensasi. Pokoknya dari bibir pantai sampai satu setengah mil, PLTU harus mengkompensasi, terutama nelayan sekitar yang menggantungkan mata pencahariannya di situ. Sampai sekarang, sama sekali tidak ada kompensasi yang diterima nelayan.

Petani kerang ijo mendapatkan ganti rugi karena lahan mereka digusur. Titik lokasi petani kerang ijo tepat menjadi titik pembangunan PLTU. Sementara itu, nelayan terdampak sama sekali tidak mendapatkan kompensasi per bulan. 1 mil itu kurang lebih 12 km. Kompensasi tidak turun, tapi hanya CSR saja yang berjalan. Padahal kompensasi terhadap nelayan itu syarat wajib ada jika PLTU berdiri. Jika tidak ada kompensasi seharusnya PLTU tidak bisa (boleh) berdiri. Kompensasi diibaratkan warga lokal sebagai "*uang kadedeuh*". Di Amdal disebutkan karena mereka terancam hilang mata pencahariannya. Uang kompensasi itu wajib dibayarkan selama PLTU berdiri. Harusnya pendataan nelayan terdampak itu ada tetapi kenyataannya tidak ada. Nominal kompensasi itu

sebenarnya di bawah lima ratus ribu. Tim yang bikin amdal PLTU-1 dari UGM (Universitas Gadjah Mada).

Pada waktu itu, isu kompensasi nelayan itu tidak diangkat oleh walhi. Walhi hanya fokus ke isu ganti rugi peternak kerang ijo saja. Isu yang lainnya jadi tenggelam. Ada cerita, ketika sidang di PTUN di Bandung, WALHI mengajak warga mundu untuk jalan-jalan katanya. Ternyata di Bandung diajak aksi di depan gedung PTUN. Dan, saksi yang dihadirkan WALHI ternyata sama sekali tidak tahu permasalahan sehingga tuntutan kalah di pengadilan. Waktu itu WALHI memang belum bisa masuk ke warga desa Citemu atau Waruduwur. Kalau bisa bawa warga nelayan sebenarnya WALHI bisa menang telak itu. Waktu itu WALHI kenal dengan tokoh masyarakat Mundu dan tokohnya ini yang “asal comot” saja. Sebenarnya dia berprofesi nelayan tapi tidak tahu konteks dan tujuan gerakan perlawanan anti PLTU tersebut.

Waktu itu yang jadi trending topiknya itu adalah peternak kerang ijo karena mereka memang yang terdampak secara langsung. WALHI tidak mengangkat isu secara keseluruhan. Gara-gara ada perlawanan dari petani kerang ijo yang dibantu WALHI akhirnya mereka dapat ganti rugi. Sebenarnya WALHI punya banyak peluang untuk melakukan tuntutan pengadilan. Karena hanya fokus ke petani kerang ijo mengakibatkan friksi kecil dengan nelayan terdampak. Ini tidak untuk nelayan keseluruhan, hanya untuk petani kerang ijo saja.

Tim Amdal dari UGM. Tidak ada keterwakilan masyarakat lokal dalam pembuatan Amdal PLTU-1. Hanya kalangan intelektual dan akademisi beserta pejabat dan aparat hukum yang terlibat. Nelayan yang dilibatkan untuk dimintai partisipasi penyusunan Amdal adalah orang-orang yang tidak mewakili keresahan masyarakat lokal sama sekali. Kajian Amdal itu sebenarnya hasilnya realistis. Aparat desa dan warga hanya diundang untuk sosialisasi lalu dimintai pendapatnya. Sama sekali tidak ada pemahaman terhadap tujuan pertemuan itu. Warga hanya diundang di tempat yang enak dan dapat uang saku, itu saja yang ada di pikiran warga.

Mulai tahun 2017 sampai sekarang sebenarnya grafik jumlah warga yang direkrut untuk bekerja di PLTU itu naik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sejak 2008 diresmikan. Rata-rata diserap sebagai tenaga kerja sipil saja karena masyarakat lokal tidak punya kemampuan skill teknis. Perekrutan itu sekarang lebih terbuka tanpa harus melalui calo lagi. Sebelum 2015, banyak calo-calo yang membrokerin warga lokal yang ingin jadi pekerja PLTU. Sekarang penolakan terhadap PLTU itu hampir tidak ada terutama sejak 2009 sampai sekarang.

Sekitar 2012 – 2013, sebetulnya ada LSM dan warga yang aksi mengepung PLTU dari darat dan laut. Salah satu keresahan warga adalah tidak tersalurkannya program CSR dengan baik. Faktanya, PLTU hanya memberikan akses pada orang-orang tertentu yang mengerti apa itu CSR. Penyaluran CSR tidak dilakukan secara terbuka. Masyarakat sama sekali

tidak tahu apa itu CSR. Awal 2020-an CSR PLTU mulai dilakukan secara terbuka sesuai regulasi yang ada. Setelah aksi 2013, PLTU sempat mengimplementasikan CSR-nya secara terbuka cuma selama satu tahun saja. Kemudian, PLTU mencoba mengkotak-kotakkan warga yang berakibat pada fragmentasi warga. Misalnya, jika ada sekelompok warga yang protes soal CSR, maka akan ada sekelompok warga lain yang dirangkul dalam program CSR. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan friksi dan fragmentasi warga. PLTU berdalih bahwa sementara mereka masih mengimplementasikan di kelompok warga tertentu, belum semuanya. Parahnya, warga di lapangan kemudian saling menghabisi kelompok masyarakat lain demi mendapatkan CSR tersebut. Misalnya, sebenarnya semua warga desa mengetahui kelompok desa mana yang melakukan aksi protes, tetapi ketika warga desa lain yang mendapatkan tawaran CSR justru mau menerimanya tanpa ada solidaritas terhadap warga yang sedang melakukan protes. Sehingga, muncul persepsi bahwa yang melakukan protes itu tidak akan mendapatkan CSR. “demo-demo apa, kayak ngerti-ngerti aja”. Namun, yang melakukan demo tetap melakukan demo dan mengajak yang lain dan yang tidak demo juga mengajak warga agar tidak usah ikut demo. Itu terjadi seakan-akan alamiah di kalangan warga. Sehingga, “rakyat yang lapar saling menerkam”. Strategi itu sangat efektif. “Daripada demo pegel-pegel, karuan bae dapat ini”. Bantuan CSR PLTU itu berupa program wirausaha, misalnya peternak lele, ayam boiler, tata rias pengantin. Kalau di nelayan itu petani garam; bagaimana menghasilkan garam yang berkualitas, dan bagi-bagi jaring untuk nelayan.

Sejak 2019, program-program CSR itu berkurang karena program wirausaha seperti itu tidak berjalan efektif. *Mindset* warga juga sudah habis. Warga mengistilahkan BATU BARA (Barang Tuhan dibagi Rata). Dari pihak pelaksana CSR, mereka juga tidak ambil pusing karena yang penting bukti foto program itu ada. “Asal keren di foto, nyatanya sih tidak ada yang berjalan”. Sehingga, program CSR yang sebenarnya bisa mencapai tujuan itu menjadi tidak terarah. Selain itu, pemikiran warga mengenai CSR itu juga sudah melenceng jauh. Pemberdayaan ekonomi itu seharusnya digunakan untuk usaha, bukan dibagi rata dulu baru sisanya untuk usaha. Itupun sekedar untuk memenuhi laporan pertanggungjawaban dan diperparah oleh para pendamping (karyawan PLTU) program itu sendiri. “Udah bilang saja pailit atau bangkrut”. Pendamping PLTU sendiri tidak konsisten sehingga warga semakin anarkis. Dalam program pemberdayaan ekonomi itu tidak ada pendampingan yang serius. Yang penting cukup seremonial. Kira-kira Sembilan puluh persen program CSR itu gagal. Oleh karena itu, Angga menyimpulkan bahwa program-program CSR itu hanya dijadikan alat peredam saja. Dan memang masyarakat sendiri sukanya diredam seperti itu saja. Artinya, pragmatisme itu sudah terinternalisasi juga ke dalam pikiran warga. Tidak hanya warga, LSM pendamping warga yang protes juga sudah pragmatis pemikirannya.

Seharusnya LSM juga memberikan kapasitas kritis kepada warga lokal dalam mengkritisi PLTU, bukan hanya mendampingi “*by project*” saja yang datang hanya sesuai kebutuhan mereka saja. Baik yang pro atau yang kontra kalau

ada ikatan emosional yang konsisten itu pasti akan menyelesaikan permasalahan atau kesalahan yang pernah ada. Sehingga, gerakan anti-PLTU mudah patah karena ego sektoral masing-masing.

v. Dampak Ekologis terhadap Ekosistem Nelayan Sekitar PLTU

Dampak lingkungan yang paling drastis terhadap wilayah sekitar adalah degradasi area tangkap nelayan karena ikan lari semua dari situ. Penurunan jumlah dan jenis ikan yang hidup di area tangkap terus menurun secara signifikan. Indikator utamanya adalah penurunan biota laut karena banyak biota laut yang dulu hidup di situ, sekarang tidak ada lagi. Dulu kerang-kerangan laut di bibir pantai itu banyak, sekarang tidak ada. Misalnya, ikan *kedukang* dan ikan *sembilang* yang hidup di sekitar perairan dangkal sudah tidak ada lagi. Padahal itu lumayan untuk mendukung penghasilan dan penghidupan petani. Terutama, kalau lagi sepi ikan di tengah, nelayan bisa cari di pinggiran. Itu lumayan hasilnya dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur. Sejak PLTU berdiri, grafik jumlah biota laut ini menurun. Ikan *sembilang* sama sekali sudah tidak bisa ditemui. Dulu, *blakutak* atau cumi, sebelum perahu jalan, baling-baling itu jalan dan mengangkat *blakutak*. Banyak *blakutak* yang tersangkut di baling-baling, tinggal diambil saja. Itu fakta. Sekarang sudah tidak ada lagi seperti itu.

Intinya, di perairan dangkal yang dijadikan wilayah kerja PLTU (*jetty*, hilir mudik kapal tongkang dll). Penurunan kualitas ekosistem dan lingkungan turun drastis. Kalau dulu,

ada musim ikan tapi sekarang tidak ada lagi musim-musiman karena, baik itu musim paceklik atau panen, ikan *sembilang* itu sudah tidak ada lagi.

Kesadaran nelayan dalam melaut di sini itu tidak seperti di tempat lain. Nelayan memakai alat tangkap apapun dan, ironinya, semua tidak peduli. Dampak dari cara melaut yang ramah lingkungan itu tidak ada lagi diperparah dengan kehadiran PLTU. Dan, ketebalan endapan batu bara yang jatuh ke laut itu bertambah tiap tahun di atas lumpur. Berdasarkan hasil uji coba di tambak Mas Angga, biota laut/plankton/bakteri yang ada di sekitar batu bara itu sama sekali tidak bisa hidup. Ekosistem mati. Padahal itu batu bara bekas yang sudah dipakai oleh pabrik “*mie soun*” dimana bekas pembakarannya dibuat urugan jalan. Kisaran dua meter persegi, ikan bandeng dan lain-lain itu tidak mau mendekat sama sekali. Di laut, jika ada tumpahan kurang lebih dampaknya akan seperti eksperimen tersebut. Bahkan, ikan yang dianggap memiliki daya tahan paling kuat (ikan *boso*, ikan *sriting*) saja tidak mau mendekat. Intinya, di sekitar wilayah jetty PLTU itu banyak varian biota laut yang hilang mulai dari ikan dan kerang-kerangan. Tiap tahun menurun dan hampir tidak ada sekarang.

Dulu, di musim perairan dangkal, nelayan cukup mencari ikan di pinggir saja. Namun, sekarang di musimnya sudah tidak ada lagi sehingga banyak nelayan yang menganggur karena tidak bisa pergi ke tengah laut karena musim badai. Oleh karena itu, sebagian nelayan pergi ke

Muara Angke Jakarta untuk melaut di sana. Bahkan, ada nelayan sini yang akhirnya melaut ke Sumatera.

Sesepi-sepinya di perairan dangkal, dapur masih ngebul. Kalau sekarang total tidak ada ikan. Akhirnya, nelayan sekarang ganti alat tangkap. Karena susah atau tidak ada lagi ikan yang bisa ditangkap dengan jaring, nelayan beralih memakai pukot harimau di bibir pantai untuk mendapatkan rajungan dan kerang. Sehingga akhirnya warga (nelayan) di sini berkontribusi juga terhadap perusakan ekosistem laut. Meskipun sebelum ada PLTU, pemakaian pukot harimau itu sudah ada, tetapi tidak separah (se-ekstrem) sekarang pemakaiannya. Kalau dulu pemakaian pukot harimau di kawasan bibir pantai yang airnya berwarna biru, tetapi sekarang pukot harimau dipakai juga di air yang berwarna butek (keruh).

vi. Perubahan *Social Mindset* (Pola Pikir) Warga dan Alih Profesi

Dulu masyarakat guyub (*ngariung*), sekarang turun drastis. Perubahan *social mindset* itu karena situasi kondisi sekitar, tapi PLTU berkontribusi terhadap perubahan *mindset* tersebut. Kalau dulu ada debat antar warga tetapi setelah itu sudah berkumpul (*ngopi*) barenag. Kalau sekarang berdebat soal PLTU antar warga itu tidak berakhir seperti dulu (*ngopi* bareng).

Banyak nelayan beralih profesi sekarang. Mayoritas ke area perikanan dan ada yang menjadi ABK ke luar negeri.

Mayoritas anak muda memilih menjadi ABK sekarang. ABK warga sini ada tiga orang yang menjadi korban kecelakaan laut yang bekerja di Canada dan Korea. Rata-rata yang menjadi ABK dari warga sini tampak menghasilkan kesejahteraan ekonomi yang lumayan sehingga banyak anak muda lain yang ikutan. Gaji ABK itu paling kecil sebelas juta dan ada yang sudah mencapai tiga puluh juta. Gaji itu diterima bersih karena kebutuhan keseharian ditanggung oleh kapal.

b. Degradasi Ekosistem Laut di Desa Pengarengan: Penurunan Penghasilan Nelayan dan Peternak Ijoan

Desa Pengarengan adalah Desa yang dekat dengan PLTU 2 Cirebon. Desa ini merupakan dengan pesisir yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani garam, petambak ikan dan udang, dan nelayan tangkap. Menurut Pak Muslikh, ketua kelompok nelayan Sumber laut di Pengarengan, menyebut bahwa anggota nelayan di desanya ada sekitar 170 nelayan. Kebanyakan mereka adalah nelayan harian, akan tetapi alat yang digunakan adalah barok atau pukot harimau. Biasanya berangkat malam hari, pulang siang. Hasil tangkapannya berupa ikan, kepiting dan rajungan. Jarak tangkap nelayan dari bibir pantai ke tengah laut berada di 30 km. Adapun untuk pendapatannya tidak menentu. Paling banyak 700 sampai 1 juta rupiah. Kalau sedang sepi, ikan tidak ada, bahkan untuk solar tidak balik modal.

Tangkapan pokok nelayan Pengarengan adalah rajungan. Wilayah tangkapnya sampai 3 kilometer dari bibir pantai. Meskipun semakin ke tangan bisa memperoleh lebih banyak rajungan. Akan tetapi perahu yang dipakai adalah perahu kecil, sehingga tidak memungkinkan nelayan untuk lebih ke tengah lagi. Sedangkan nelayan kerang hijau memasang rumah bambu tangkapnya relatif

lebih dekat dari bibir pantai. Nelayan memasang bambu ke dasar laut pinggiran, menunggu sampai ijoan itu menempel di bambu-bambu tersebut. Biasanya untuk satu rumah ijoan nelayan harus mengeluarkan modal 8 juta rupiah.

Dua mata pencaharian itu sangat terdampak oleh keberadaan PLTU. Sebelum ada PLTU menangkap rajungan bisa dilakukan di dekat bibir pantai. Sekarang harus ke tengah sampai 3 km untuk dapat menangkap rajungan. Sementara nelayan ijoan pernah bambu saja bisa memperoleh 3 karung ijoan. Namun setelah ada PLTU, jangankan satu bambu, satu *ranggong* (rumah ijoan) saja terkadang sudah sulit didapat. Hal itu terasa sejak dua tahun terakhir. Padahal Pak Muslikh sudah memasang *ranggong* ijoan sejak 2010.

Menurut Pak Muslikh kelangkaan rajungan dan ijoan itu disebabkan oleh keberadaan jetty PLTU yang dekat dengan desanya. Jetty itu telah menghalangi datangnya arus yang berputar di laut pinggiran atau laut dangkal. Sehingga hal itu mencegah datangnya bibit-bibit baru baik ijoan maupun rajungan di perairan dekat desanya. Sebab nelayan ijoan dan rajungan bukan hasil menanam, melainkan murni pemberian alam. Hal itulah yang kemudian menyebabkan kelangkaan hasil tangkap nelayan Pengarengan. Lokasi jety sebelum dibangun itu dulunya tempat rajungan dan udang rebon, sedangkan di sana yang paling banyak. Panjang dari jety sekitar 3 kilometeran ke tengah laut. Lebarinya sekitar 10 meteran, Kira-kira 3 mobil bisa berpapasan. Jika diukur dengan perahu Pak Muslikh yang panjangnya 9 meter, jembatan itu masih lebih, jadi lebarinya kurang lebih sekitar 10 sampai 12 meter (Wawancara Pak Muslikh, 2022).

Selain itu, PLTU dan pabrik-pabrik yang berada dekat dengan Pengarengan pun, menurut dugaan Pak Muslikh berkontribusi terhadap kematian biota laut yang ada di laut sekitar Pengarengan. Terutama pada saat musim hujan. Biasanya limbah dibuang pada bulan Oktober-Desember. Namun masalahnya, masyarakat tidak mampu membuktikan hal itu. Pernah dicoba oleh Pak Muslikh tapi tidak berhasil karena hasil lab menunjukkan sebaliknya. Padahal berdasarkan

pengamatan nelayan, ada banyak ijoan yang mati karena limbah. Hal itu terlihat, karena nelayan menggunakan barok dan bisa menangkap hasil tangkap dari dasar laut. Nelayan sering memperoleh ijoan atau ikan yang mati yang menurut mereka itu mati karena limbah, karena mereka bisa membedakannya. Ciri yang lain adalah mulai hilangnya biota laut yang ada di perairan dekat desanya. Menurut Pak Muslikh, nelayan di Pangarengan multi tangkap, ada nelayan rajungan, ijoan, kakap, blanak, krapu, dan udang rebon. Ketika limbah itu datang ikan-ikan tersebut menghilang bahkan mati mengapung di atas air laut. Bahkan, umpang udang untuk mancing saja mati sekejap ketika terkena limbah. Sehingga, ketika masuk musim limbah, para nelayan tidak ada pekerjaan. Ketika nelayan mengeluh ke Polairud, mereka tidak ditanggapi.

6. Bendungan Kuningan: Penggusuran dan Relokasi yang Tak Sepadan

Bendungan Kuningan ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional di Era Jokowi-Jusuf Kalla. Namun, bendungan ini sebenarnya sudah direncanakan akan dibangun sejak 1984. Awalnya nama bendungan ini adalah Bendungan Cileuweung, karena letak bangunan material bendungan ada di dusun Cileuweung, salah satu dusun di Desa Randusari. Nama bendungan diganti menjadi bendungan Kuningan, karena ada desakan dari masyarakat di desa-desa sekitar yang terdampak bendungan tersebut. Menurut masyarakat nama Cileuweung terkesan primordial dan mengesampingkan desa-desa yang juga terdampak. Akhirnya nama bendungan itu diganti menjadi Bendungan Kuningan.

Setelah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, pengerjaan bendungan Kuningan dipercepat sejalan dengan percepatan pembangunan ekonomi di bawah cetak biru MP3EI yang ditetapkan di era Presiden SBY. Bendungan ini dicanangkan sebagai salah satu bagian dari proyek infrastruktur yang akan menopang kebutuhan air cetak biru tersebut. Bendungan Kuningan dibangun untuk mengaliri irigasi di 3000 Ha, yang masing-masing 1000 Ha di Kuningan dan 2000 di Brebes. Selain itu, bendungan ini dibangun sebagai

proyek pengendalian banjir dengan reduksi banjir 429,24 m³/s (67,83%), serta untuk pemenuhan air baku 300 l/det, dan pembangkit PLTA 500 kW.

Namun, seperti halnya proyek strategis nasional yang lain di bawah kapitalisme, bendungan Kuningan tidak lepas dari dampak krisis sosial ekologis di sekitarnya. Sejak mulai dibangun pada 2014 sampai sekarang, setidaknya bendungan Kuningan telah meletakkan masyarakat dibawah resiko bencana, mengeksklusi masyarakat dari ruang hidupnya, dan mengubah lanskap ekosistem yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dengan kata lain, bendungan Kuningan dibangun untuk melayani kapitalisme, sambil mengorbankan keberlangsungan sosial ekologis di sekitar sebagai gantinya.

i. Dinamika Pembangunan Bendungan di Desa Randusari: Mengorbankan Rasa Aman dan Mengancam Keselamatan Rakyat

Bendungan Kuningan yang dibangun di Dusun Cileuweung Desa Randusari membendung sungai Cikaro. Sungai ini mengalir di sepanjang Kawungsari dan Randusari yang menjadi sampel kasus untuk melihat dampak krisis sosial ekologis dalam penelitian ini. Ketika pertama kali peneliti sampai di lokasi, kesan pertama yang langsung muncul adalah resiko keselamatan rakyat desa di bawah sepanjang aliran sungai tersebut. Bendungan Kuningan dibangun tepat di atas pemukiman Desa Randusari.

Setelah bercakap-cakap dengan warga Desa Kawungsari, setiap orang yang peneliti temui menyatakan hal yang sama, bahwa mereka merasa takut dan khawatir jika sewaktu-waktu bendungan tersebut jebol. Masyarakat mengaku tidak tenang terutama setiap terjadi hujan deras dengan intensitas yang tinggi. Masyarakat merasa takut jika dinding bendungan tidak mampu menampung air yang terlalu banyak dan banjir terjadi secara tiba-tiba.

Ketakutan masyarakat sangat berdasar mengingat mereka hidup tepat di bawah dinding bendungan. Pernah terjadi peristiwa yang membuat

masyarakat trauma. Pada Februari 2017 bendungan baru dibangun sekitar $\frac{1}{4}$ jadi. Saat itu tiba-tiba terjadi bencana pergerakan tanah selama sekitar seminggu, terjadi beberapa kali. Maksud pergerakan tanah itu, ada beberapa titik di sekitar Desa Randusari yang amblas, dan beberapa titik posisi tanah naik. Masyarakat panik, beberapa orang yang tinggal di wilayah yang mengalami pergerakan sempat mengungsi di lokasi yang lebih aman di desa itu. Pak Rohman menggambarkan situasi pergerakan tanah tersebut begini: "ada yang keramik ngangkat sampai plafon. Sumber air keluar dari samping rumah. Rumah itu ngangkat. Sebagian roboh. Di dekat rumahnya ada 5 yang terdampak. Jalan putus, tidak bisa dipakai. Jalan naik."

Kemudian di tengah situasi pergerakan itu, sempat hujan terjadi selama tiga hari tiga malam berturut-turut. Masyarakat semakin resah. Di tengah keresahan itu desas-desus datang, masyarakat mendapat kabar bahwa bendungan mau jebol. Desas-desus itu muncul tengah malam. Hujan sangat deras dan ditambah listrik padam. Banyak pohon yang terlihat berjatuh. Karena panik, masyarakat terpengaruh isu tersebut dan panik. Situasi malam itu sangat genting. Pak Aldi, salah seorang warga Randusari menggambarkan situasi malam itu seperti mau kiamat. Di tengah hujan deras dan gelap karena saluran listrik yang padam masyarakat berhamburan meninggalkan rumah. Mereka tidak sempat membawa banyak barang-barang, hanya yang dianggap penting seperti surat-surat tanah dan rumah dan sebagainya.

"Orang-orang berhamburan keluar rumah. Ada yang ke atas, blok paling atas. Ada yang lari ke desa tetangga. Semua orang panik. Rumah ditinggalkan. Orang bingung. Mau ke atas takut longsor. Mau ke bawah takut banjir."

Kepentingan mulai mereda setelah masyarakat mengonfirmasi bahwa isu bendungan jebol merupakan kabar burung belaka. Kepanikan itu ternyata dipicu selain karena keadaan yang begitu mencekam,

masyarakat juga masih belum familiar dengan bendungan. Pada saat itu bendungan masih 25 persen dan belum dilakukan penggenangan.

"Isunya bendungan mau jebol. Sebenarnya air itu belum penuh. Terowongan belum ditutup. Namanya orang kampung, baru tau bendungan. Waktu itu berbarengan dengan di Cimeong. Waktu itu di beberapa titik di Jawa Barat. Di Ciwaru sana lebih parah. Waktu itu bareng sama pergerakan tanah, di bulan yang sama." (Wawancara Pak Rohman, 2022).

Meskipun jebolnya bendungan pada waktu itu sebatas kabar burung, kemungkinan resiko itu tentu saja ada. Selain itu kenyataan bahwa masyarakat memang kehilangan rasa amannya sejak Bendungan Kuningan dibangun itu tidak terbantahkan. Peneliti sempat bertanya ke beberapa warga Randusari tentang desa-desa yang mungkin terdampak jika Bendungan Kuningan jebol. Hampir setiap warga menjawab yang pertama kali terkena dampaknya adalah Randusari, kemudian Cibeureum, Cisaat, Dukuh Badag, Bantar Panjang, sampai ke Ciledug Cirebon. Desa-desa tersebut secara topografis berada di bawah Bendungan Kuningan yang menurut masyarakat memiliki kemungkinan terdampak jika bendungan Kuningan jebol. Tentu saja, resiko itu adalah resiko yang tidak diinginkan dan menjadi mimpi buruk masyarakat Randusari sampai sekarang.

Adapun peristiwa pergerakan lahan itu berdampak pada kerusakan rumah-rumah masyarakat. Ada yang rusak parah, ada yang tidak parah sehingga masih memungkinkan untuk diperbaiki. Akan tetapi setelah kejadian itu, area yang mengalami pergerakan lahan dinyatakan sebagai area rawan longsor dan tidak dianjurkan untuk dihuni. Berkaitan dengan masalah penetapan area rawan bencana itu pemerintah Desa Randusari mengajukan ganti rugi kepada pemerintah sebagai pemegang proyek bendungan. Dari pengajuan itu, pemerintah memutuskan untuk merelokasi masyarakat yang tinggal di area rawan

longsor ke rumah khusus yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak pembebasan lahan bendungan, namun rumah yang ditinggal tidak dibayar atau diberikan ganti rugi, sebab berada di luar area proyek bendungan.

Asumsi yang dibangun oleh pemerintah Desa Randusari adalah ada kemungkinan bahwa pergerakan lahan itu disebabkan oleh getaran yang dihasilkan selama pembangunan bendungan berlangsung. Sebelum bendungan dibangun pada 2012 dibangun jalan baru terlebih dahulu untuk akses ke pembangunan proyek selama setahun. Setelah membangun jalan, tahap awal pembangunan adalah membuat terowongan yang berfungsi untuk mengatur volume genangan air bendungan. Dalam membangun terowongan awalnya dilakukan dengan menggunakan bor. Akan tetapi tidak berhasil. Akhirnya pembuatan terowongan menggunakan dinamit, sekali tiga kali ledakan pagi, siang dan sore, berjalan selama setahun. Masyarakat menduga ledakan itu telah berpengaruh pada pergerakan tanah seperti digambarkan di atas.

Misalnya Pak Aldi, salah seorang warga Desa Randusari, rumahnya rusak akibat peristiwa pergerakan tanah. Dia diberi hak hunian di Desa Kawungsari, tetapi rumah yang rusak itu tidak diganti rugi. Sekarang Pak Aldi tinggal di Kawungsari dan secara administratif sudah menjadi warga Desa Kawungsari. Rumah yang lama tidak lagi ditinggali karena takut sewaktu-waktu terjadi longsor. Dia berharap ada pembebasan lahan lagi dan rumah yang lama diganti rugi. Sebab informasi yang beredar, akan ada rencana pembangunan irigasi buatan di tahun-tahun mendatang yang akan mengalirkan air dari bendungan ke wilayah-wilayah di bawahnya.

Selain Pak Aldi, tetangganya di Randusari yang terkena dampak pergerakan tanah pun mendapat bagian hak hunian rumah khusus di

Kawungsari. Akan tetapi sebagian besar tetangganya itu tidak menempati rumah khusus tersebut karena beberapa hal. Pertama, karena masalah penyediaan air di rumah khusus belum stabil, sehingga harus beli. Kedua, untuk warga yang memiliki mata pencaharian sebagai petani lebih memilih tinggal dan merenovasi rumah lama di Randusari karena aksesnya yang cukup jauh. Bagi petani yang hasil panennya tidak seberapa, ongkos transport pulang pergi dari Kawungsari baru ke lahannya di Randusari itu sangat tidak menguntungkan. Ketiga, merasa lebih nyaman tinggal di Randusari, sebab berat bagi mereka untuk melepaskan relasi sosial dengan keluarga, kerabat dan tetangganya.

ii. Dinamika Pembebasan Lahan dan Relokasi di Desa Kawungsari: Mencerabut Petani dari Ruang Hidupnya

Berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor 593/Kpts. 244-Tapem/2019 tanggal 29 April 2019 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Kuningan, bendungan dibangun di atas lahan seluas 302,26 Ha. Dari luasan itu ada dua kepemilikan, yaitu tanah masyarakat 176,76 Ha dan kawasan hutan 125,5 Ha. Lokasi bangunan bendungannya berada di sungai Cikaro di Desa Randusari. Adapun total volume tampungannya sekitar 25,955 juta m³.

Setelah diresmikan bendungan Kuningan mengenai tanah setidaknya di 6 desa, yaitu Desa Randusari Kecamatan Cibeureum, Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum. Lalu, Desa Kawungsari Kecamatan Cibeureum, Desa Simpayjaya Kecamatan Karangkencana, Desa Tanjungkerta Kecamatan Karangkencana, Desa Cihanjaro Kecamatan Karangkencana. Tanah-tanah yang tergenang itu sebelumnya sudah dibebaskan. Artinya pemerintah telah memberikan ganti rugi kepada masyarakat bentuk ganti ruginya yaitu tanah sawah, pekarangan dan rumah dibayar. Kemudian masyarakat diberikan izin pinjam pakai rumah khusus

(rusus). Bentuk rumahnya seperti halnya rumah-rumah di perumahan pada umumnya.

Pembangunan rumah khusus ini dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan. Jumlah rumah yang dibangun sebanyak 444 unit di atas lahan seluas 9.8 hektar dengan tipe 28 kopel. Selain rumah, dibangun juga sarana dan prasarana sarana umum, seperti masjid, sekolah dan balai desa. Adapun lokasi rumah khusus itu masuk ke wilayah administrasi Desa Sukarapih, yang kemudian dibebaskan dan dijadikan wilayah Desa Kawungsari yang baru.

Maksud dibangunnya rumah khusus ini adalah sebagai kompensasi "ganti untung" oleh masyarakat yang rumahnya tergusur pembangunan bendungan berupa program relokasi. Dari jumlah 444 unit rumah khusus itu diberikan hak menempati kepada masyarakat Desa Kawungsari sebanyak 361 unit dan 83 rumah untuk masyarakat Desa Randusari, yang dalam prakteknya masyarakat Randusari yang menerima hak tinggal di rumah khusus ada 77 orang. Meskipun setelah masyarakat direlokasi, tidak sedikit masyarakat Randusari yang pindah domisili kependudukan menjadi warga Desa Kawungsari. Sebab jarak antara bendungan ke lokasi relokasi itu sekitar 4 km, ditempuh dengan sepeda motor sekitar 15 menit.

Frasa "ganti untung" ini sangat familiar diucapkan oleh masyarakat, terutama di Desa Kawungsari. Frase adalah frasa yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Hal itu untuk menunjukkan citra bahwa proyek bendungan tersebut tidak menyebabkan dampak yang buruk kepada masyarakat. Sementara itu, masyarakat menggunakan frasa itu untuk menagih janji pembayaran atas pembebasan yang layak. Salah satu perwujudan ganti untung itu adalah harga pembebasan lahan yang berlipat ganda dan pemberian hunian rumah khusus di desa relokasi. Namun

pertanyaannya, apakah benar masyarakat mendapatkan keuntungan dari proyek Bendungan Kuningan? Untuk menjawab pertanyaan itu peneliti akan memaparkan beberapa temuan lapangan terkait dinamika pembebasan lahan proyek bendungan tersebut. Sementara itu, peneliti akan tetap menggunakan frasa ganti rugi sebagai bentuk pemosisian peneliti terhadap subjek penelitian ini.

Beberapa informan yang diwawancara menjelaskan bahwa harga ganti rugi rumah dan tanah yang tergusur berkali-lipat jika dibandingkan harga rumah dan harga tanah sebelum ada proyek bendungan. Namun, ada perbedaan harga antara ganti rugi di Randusari dan di Kawungsari. Di Randusari harga ganti ruginya relatif lebih murah dibanding harga ganti rugi di Kawungsari. Sebelum ada pembebasan lahan harga tanah sawah di Randusari dan sekitarnya adalah 3 juta sampai 10 juta rupiah per seratus bata, atau di tahun 2012. Sedangkan ketika dibebaskan pada 2014, ganti rugi yang diterima masyarakat Randusari adalah rata-rata 84 juta per 100 bata. Adapun di Kawungsari ketika dibebaskan masyarakat menerima ganti rugi sebesar 100 juta per 100 bata, atau dalam masyarakat, "kalo 100 ya 100 lagi, gitu ngitungnya".

Di Randusari yang dibebaskan adalah lahan sawah dan pemukiman. Untuk pemukiman ada dua RT yang dibebaskan, yaitu RT yang tepat berdekatan dengan bendungan. Satu RT direlokasi di lahan Randusari yang dekat dengan bendungan tetapi secara topografi berada di atasnya. Sedangkan satu RT yang lain direlokasi di Kawungsari baru. Sementara Desa Kawungsari yang dibebaskan adalah semuanya, baik lahan sawah maupun pemukiman. Beberapa orang mengistilahkananya bedol desa.

Pembebasan lahan pertama kali dilakukan di Randusari. Akan tetapi tidak sedikit warga Randusari yang tidak puas ganti rugi pembebasan lahan tersebut. Sebab harga yang dibayarkan lebih sedikit ketimbang yang ganti

rugi untuk masyarakat Kawungsari. Mereka menyebutnya sebagai pembebasan lahan di Randusari sebagai pembebasan lahan percobaan, karena dilakukan pertama kali. Kepala Desa Randusari menyebut bahwa dibayar murah karena sejak awal masyarakat tidak ada penolakan yang kompak. Sehingga tidak punya data tawar yang kuat untuk negosiasi harga.

Ketidakkompakan masyarakat Randusari itu disebabkan oleh tidak adanya transparansi yang cukup dalam proses pembahasan lahan. Seperti disebut oleh Pak Udin, bahwa dirinya kecewa tidak dilibatkan dalam musyawarah penentuan harga ganti rugi. Dalam musyawarah pembebasan lahan hanya melibatkan 25 orang, tidak semua warga yang tergusur dilibatkan. Sehingga keputusan harga ditetapkan tanpa mufakat bulat seluruh warga tergusur. Ketika keputusan sudah ditetapkan, Pak Udin merasa tidak lagi mampu berbuat apa-apa (Wawancara Pak Udin, 2022).

Sementara itu dinamika pembebasan lahan di Kawungsari lain lagi. Jika di Randusari yang dibebaskan hanya dua RT, di Kawungsari semua lahan baik sawah maupun pemukiman dibebaskan. Secara nominal memang harga ganti rugi di Kawungsari lebih besar dari pada di Randusari, akan tetapi dampaknya bagi Kawungsari jauh lebih dalam untuk saat ini. Masyarakat Kawungsari digusur rumahnya, diganti rugi, direlokasi sekaligus diberi hak hunian. Namun, dibalik itu di desa yang baru masyarakat Kawungsari mengalami masalah yang tidak mudah untuk dipecahkan. Sebab masyarakat Kawungsari dicabut total dari tanah dan ruang hidupnya. Karena menyadari akan dampaknya itulah pada saat pembebasan lahan masyarakat Kawungsari menuntut harga yang besar.

Menurut Pak Kusnara, bagi masyarakat Kawungsari kabar akan dibangunnya bandara sudah terdengar sejak zaman Orde Baru, sekitar 37 tahun sebelum bendungan itu dibangun. Kemudian pada 2012 kabar itu datang lagi. Petugas dari pemerintah daerah mensosialisasikan di balai desa

bahwa desa ini akan dibangun bendungan. Pada 2013 pembebasan lahan mulai berjalan melalui tiga tahap, yang mana pertama adalah pembebasan lahan sawah. Selanjutnya pada 2015 pembangunan bendungan dimulai.

Pada saat bendungan mulai dibangun, ganti rugi belum dibayarkan. Karena itu masyarakat mulai mengadakan unjuk rasa, dan akhirnya pembayaran ganti rugi mulai dilakukan. Itupun tidak langsung dibayarkan. Masyarakat masih harus bolak-balik menagih janji yang terus diulur-ulur. Karena yang digusur satu desa dan kebijakannya melakukan relokasi, yang diganti rugi bukan hanya pemukiman dan sawah milik warga, melainkan juga fasilitas umum seperti balai desa, masjid, sekolah, makam dan seterusnya. Pemukiman dan lahan sawah Kawungsari sudah selesai dibayarkan ganti ruginya. Begitu juga fasilitas umum sekolah, masjid dan balai desa sudah diganti rugi dan dibangun. Sampai Oktober 2022 yang belum diganti rugi adalah makam, tanah bengkok dan tanah kas desa, dan kandang-kandang kambing dan unggas milik warga.

Tanah relokasi di Kawungsari sebagian tanah milik, sebagian lagi tanah perhutani. Lokasi desa relokasi ini berada di pintu masuk Desa Sukarapih. Di sekitarnya, di sisi yang lain adalah lahan Perhutani dan sawah milik masyarakat Desa Sukarapih. Desanya lebih mirip seperti perumahan, hanya saja bedanya ada kantor dan administratifnya. Sementara warganya sebagian besar adalah petani dan buruh tani. Hanya dua puluh persen saja yang berdagang di perantauan (Wawancara Pak Tas'an, 2022).

Sebuah ironi, di mana desa yang mayoritasnya adalah petani dan buruh tani, tetapi tidak memiliki wilayah persawahan di sekitarnya. Ada lahan hutan, tetapi sudah digarap oleh warga desa Sukarapih. Masyarakat Kawungsari bisa menggarap lahan hutan tapi harus berjalan jauh ke tengah hutan, dan itu tidak akan sepadan dengan penghasilannya dari hasil panen. Ada cara lain yaitu dengan membayar hak garap kepada masyarakat Desa

Sukarapih sebesar 10 juta per petaknya. Itu Pun jarang dari mereka yang mau melepaskannya.

Masyarakat Sukarapih yang melepas lahan garapan hutan itu karena mereka tahu bahwa dalam waktu dekat tanah garapannya itu akan ditukar gulingkan, sehingga mereka akan kehilangan tanpa bayaran. Pak Kusnara menyebutkan bahwa ada rencana dirinya akan mengusahakan ganti rugi tanah bengkok dan tanah kas desa itu diberikan berupa tanah lagi, yaitu tanah perhutani. Masalahnya ketika tukar guling itu terealisasi maka akan berhadapan dengan penggarap dari desanya sendiri, dan hal itu akan merugikan mereka. Meskipun secara hukum, jual beli hak garap perhutani itu inkonstitusional (Wawancara Pak Kusnara, 2022).

Di Desa relokasi, masyarakat diberi hak hunian rumah menyesuaikan kepemilikan rumah pada saat di desa lama. Jika seseorang memiliki dua rumah, maka akan diberi rumah dua di desa baru. Namun, jika tidak memiliki rumah akan tetapi memiliki kartu keluarga dan tinggal lama di Kawungsari, akan diberi rumah juga. Adapun dalam proses pembagiannya masyarakat diberikan kunci oleh pemerintah desa. Tidak dibagi-bagi berdasarkan kedekatan rumah seperti di desa lama, melainkan dibagi secara acak. Termasuk warga Randusari diposisikan secara acak, tidak mengelompok di satu tempat saja.

Dalam konteks ini, peneliti tidak begitu dalam memahami bagaimana proses penentuan distribusi rumah-rumah tersebut. Akan tetapi ada beberapa kesan yang peneliti dapat pada saat beberapa hari di Desa Kawungsari. Pertama, memberikan rumah sesuai jumlah rumah di desa lama cenderung mengesankan ketimpangan. Orang yang memiliki lebih dari satu rumah asumsinya adalah orang yang relatif kaya di desa. Ketika rumahnya dibebaskan perolehan ganti ruginya lebih besar dari yang lain, sehingga lebih

memungkinkan baginya untuk memulihkan sosial ekonominya pasca relokasi.

Pak Kusnara menyebutkan bahwa masalah yang cukup mendesak bagi masyarakat Kawungsari adalah masalah ketidakjelasan hak atas tanah dari rumah-rumah khusus tersebut. Masyarakat sudah merasa memiliki rumah itu, merenovasi total, namun belum memiliki sertifikat tanahnya. Menurutnya ada cara yang bisa ditempuh untuk mensertifikasi tanah rumah khusus itu, namun cukup sulit dan prosesnya panjang, apalagi mengingat sebagian adalah tanah perhutani.

Masalah yang lain adalah masalah akses dan distribusi air. Di desa yang lama, masyarakat mudah memperoleh air baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun irigasi. Namun di desa relokasi, air adalah hal sulit diakses. Sebagian masyarakat harus membayar untuk kebutuhan sehari-hari, setidaknya 30 ribu per toren dan biasanya habis dalam 3-7 hari. Meskipun sebagian yang lain bisa menggunakan sumur bor, akan tetapi terbatas. Mereka yang bisa menggunakan sumur adalah yang tinggal di tempat yang lebih rendah, dan disana merupakan tanah milik, bukan lahan Perhutani.

iii. Dampak Sosial-Ekologis Masyarakat Pasca Pembebasan Lahan

Kecamatan Cibeureum memiliki lanskap yang berbukit-bukit, yang terdiri dari kawasan hutan, ladang dan persawahan. Begitu juga Randusari dan Kawungsari merupakan desa yang dikelilingi oleh area hutan, kadang dan persawahan, sehingga mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah petani, baik petani sawah, kadang maupun hutan. Di sawah masyarakat biasanya menanam padi, setahun dua kali tanam. Sedangkan di ladang dan hutan masyarakat menanam aneka tanaman palawija, umbi dan buah, seperti cabai, jagung, singkong dan pisang, yang biasanya ditanami di sela-sela tegakan milik Perhutani.

Tegakan itu pun sebenarnya yang menanam adalah masyarakat setempat dengan perjanjian akan dibagi hasil 1:10. Meskipun akhirnya pada 2019 lalu karena ada pergantian jabatan di Perhutani, perusahaan negara ini mangkir dan mengklaim seluruh tegakan yang ada. Karena itulah masyarakat merasa dikhianati dan tidak mau lagi menanam tegakan. Masyarakat hanya menanam untuk dirinya sendiri, palawija, umbi dan buah. Itupun selama masih diperbolehkan. Sebab, ada relasi yang tidak baik antara mandor kehutanan dengan petani di wilayah tersebut (Wawancara dengan Pak Udin, 2022). Seiring berjalannya waktu, arus depeasantisasi mulai massif. Generasi yang lebih muda, banyak dari mereka yang memilih bekerja di luar bidang pertanian.

Di Randusari kebanyakan generasi muda memilih untuk mencari penghidupan di perantauan, yaitu sebagai kuli bangunan dan pedagang kelontongan. Trend bekerja di perantauan ini dimulai pada era Orde Baru. Mulanya pada 1970-an ada seorang pemborong yang datang mengajak satu rombongan untuk bekerja di Jakarta bekerja sebagai kuli bangunan dengan sistem borongan paling lama dua minggu, lalu pulang lagi. Lambat laun proyek borongan ini semakin sering dilakukan. Karena tempatnya yang jauh beberapa orang memilih untuk menginap sambil menunggu pekerjaan berikutnya. Akhirnya perantauan sebagai kuli bangunan ini menjadi umum bagi masyarakat Randusari.

Dari trend perantauan ini, di antara mereka ada yang memilih bekerja sebagai penjaga toko milik orang dari desa tetangganya. Lambat laun karena sudah memiliki ilmu perkelontongan ada mencoba membuka usaha kelontongan sendiri dan berhasil. Melihat kesuksesan salah seorang dari mereka, masyarakat Randusari mulai menggandrungi usaha kelontongan ini. Banyak dari mereka yang berusaha menabung untuk mengumpulkan modal. Tidak sedikit juga yang memperoleh modal dari menghutang ke bank.

Bagi yang kekurangan modal, biasanya mereka bekerja sama dengan tetangganya dengan cara patungan modal. Perjanjiannya dengan menetapkan jumlah modal yang diputar. Setelah ditetapkan, misalnya sebesar 30 juta (belum termasuk sewa), mereka dua orang. Setelah itu mereka bergantian berjualan misalnya per 6 bulan atau per 3 bulanan. Orang yang sudah menyelesaikan gilirannya wajib mengembalikan nilai toko itu sesuai perjanjian 30 juta atau membayar sisanya berupa uang kepada orang yang akan mengambil giliran berjualan. Bagi yang memiliki cukup modal, biasanya memiliki perjanjian berjualan dengan 2 atau 3 orang, sehingga ia terus bisa mendapat giliran berjualan.

Di Kawungsari trend usaha toko kelontongan itu pun ada. Akan tetapi jumlahnya tidak semassif di Randusari. Mayoritas masyarakat Kawungsari bermata pencaharian sebagai petani, tepatnya buruh tani. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki lahan pribadi, jika pun punya tanahnya tidak terlalu luas. Lahan sawah di Kawungsari kebanyakan dimiliki dan digarap oleh orang-orang dari desa-desa di sekitarnya. Menurut penuturan Pak Kusnara dan Pak Tas'an, orang yang bermata pencaharian sebagai pedagang kelontongan di perantauan jumlahnya sedikit, sekitar 20 persen saja.

Di bawah kondisi seperti itu pembangunan masyarakat yang paling terdampak secara sosial ekonomi adalah masyarakat Kawungsari dan masyarakat Randusari yang sangat bergantung pada tanah. Sebab seluruh lanskap desanya berubah total, digenangi air seluruhnya, sedangkan masyarakatnya sangat bergantung pada tanah yang tenggelam tersebut. Memang mereka pindah ke tempat baru, namun hal itu tidak serta merta masyarakat dapat bertahan dan memulihkan sosial ekonominya. Sebagai masyarakat petani yang paling dibutuhkan adalah tanah. Sementara tidak semua masyarakat yang terdusur bendungan dapat membeli tanah kembali

dari uang ganti ruginya. Dalam realitasnya faktor yang membuat mereka tidak mampu memperoleh tanah lagi.

Pak Udin, warga desa Randusari, hanya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, tanahnya ditenggelamkan oleh proyek bendungan. Pak Udin menerima ganti rugi 79 juta untuk 100 bata lahan sawahnya. Per meter lahan dihargai 57 ribu rupiah. Tetapi uang ganti rugi Pak Udin sekarang sudah habis tidak karuan, atau untuk dipakai kebutuhan sehari-hari. Uang senilai 79 juta rupiah tidak dapat dibelikan lahan lagi. Sebab pada saat itu harga tanah di desa-desa sekitar bendungan mendadak naik. Pak Udin menyebut lahan di Kecamatan Cibingbin saja sudah 100 juta per 100 bata, apalagi di Kecamatan Cibeureum, lebih mahal lagi.

Di Simpajaya menurutnya harga tanah relatif lebih murah dari di desa-desa lain, akan tetapi lahannya tidak subur untuk pertanian. Ada lahan yang subur dan murah tetapi sangat jauh lokasinya dan tidak memungkinkan untuk digarap. Akhirnya uang ganti rugi itu habis dan tidak ada bekasnya. Sekarang keseharian Pak Udin menggarap lahan yang tersisa untuk mengisi waktu luang di usianya yang sudah 70 tahunan (Wawancara Pak Udin, 2022).

Pak Rohman (50-an tahun) warga Randusari, menjelaskan bahwa pembebasan lahan bendungan tidak sekali jalan, tetapi bertahap. Pembebasan lahan pertama kali pada 2013, pada saat mulai membangun jalan. Pada tahap itu yang diganti rugi adalah lahan sawah di Randusari dihargai 57.000 rupiah per meter. Tahap kedua yaitu Desa Sukarapih dihargai 67.000 per meter. Kemudian tahap keempat yaitu lahan sawah Desa Kawungsari dihargai 72.000 per meter.

Pak Rohman adalah seorang tukang bangunan, sekaligus pemborong di Bandung. Pada 2014 memutuskan untuk pulang untuk mengurus pembebasan lahan milik orang tuanya. Di Randusari orangtuanya memiliki

kurang lebih 1800 meter dihargai 57.000 rupiah, seingatnya mendapat uang 128 juta rupiah. Kemudian orang tuanya punya lahan sawah juga di Kawungsari seluas 3100 meter, dibayar 100 juta per 100 bata, atau 75.000 rupiah per meter (Wawancara Pak Rohman, 2022).

Dari uang ganti rugi itu orang tua Pak Rohman membeli sawah lagi 100 bata di Desa Sumurwiru seharga 120 juta untuk yang masih di pinggir jalan dan subur, jika di tengah bisa dapat 100 juta untuk 100 bata. Padahal harga normalnya di Sumurwiru hanya 20 juta per 100 bata. Menurutnya hal itu juga berlaku untuk jual beli rumah. Orang yang dapat ganti rugi rumah belum tentu bisa membeli rumah lagi, karena harga pasaran rumah melonjak naik. Orang yang dapat ganti rugi dari rumah 300 juta, harus menambah uang 100 juta lagi untuk bisa membeli rumah.

Karena sudah lama di rumah, sekarang Pak Rohman memutuskan untuk bekerja di desa sebagai petani. Namun karena tidak memiliki tanah, ia menggarap lahan hutan di sekitar kawasan bendungan. Pak Rohman menanam pisang dan singkong. Sembari mengurus tanamannya itu Pak Rohman menangkap ikan yang sengaja ditanam oleh pihak bendungan menggunakan jaring. Meskipun tetap saja pendapatan dari menangkap ikan tidak seberapa, hanya sekilogram atau dua kilogram per harinya. Sambil menunggu jaring ikan, ia juga mencari rumput untuk ternaknya. Pak Rohman mempunyai satu sapi dan beberapa kambing di dekat rumahnya.

Meskipun tanahnya dijual, Pak Rohman masih bisa mempertahankan kondisi ekonominya di kampung. Namun tentu saja pendapatan petani hutan tidak akan sepadan dengan pendapatan dari pertanian sawah. Bagaimanapun begitulah kehidupan di pedesaan. Meskipun sedikit, selalu ada cara bagi petani untuk bertahan. Demikian itu berbeda dengan apa yang dialami para petani Desa Kawungsari yang harus dipisahkan dari sumber penghidupannya. Sebagian besar petani tidak mampu memulihkan penghidupannya meskipun

memperoleh ganti rugi yang relatif lebih besar dibanding masyarakat Randusari.

Pak Tas'an misalnya, petani Desa Kawungsari di Kawungsari lama memiliki lahan hanya 50 bata. Meskipun lahannya sedikit baginya hidup di desa yang lama lebih mudah ketimbang hidupnya yang sekarang. Pak Tas'an masih bisa menggarap tanah punya tetangganya atau di desa-desa tetangga. Hal itu lebih mudah karena relasi sosialnya sudah terbangun berpuluh-puluh tahun. Berbeda ketika di desa yang baru, meski masyarakat Desa Sukarapih sama-sama berbasis pada pertanian, namun Pak Tas'an tidak bisa langsung beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Masyarakat Desa Sukarapih akan lebih mendahulukan warga desanya untuk menggarap lahan ketimbang masyarakat pendatang.

Di desa yang lama Pak Tas'an biasa bekerja sebagai pembajak bayaran menggunakan traktor miliknya sendiri. Sekian itu ia biasa bekerja jasa memanen padi menggunakan mesin pemanen combine kepada tetangganya. Namun di desa yang baru, di Sukarapih para petaninya banyak yang memiliki traktor dan mesin combine sendiri. Sehingga sulit baginya untuk menawarkan jasa dari mesin yang dimilikinya. Sekarang mesin yang ia miliki sudah tidak terpakai lagi.

Di desa relokasi Pak Tas'an sempat membeli kambing untuk bisa memperoleh pendapatan, namun kambingnya hilang karena tidak ada yang menjaga. Kandang kambingnya diletakkan di tanah Perhutani, jauh dari rumahnya. Sebab di desa yang baru suasananya padat pemukiman. Antara satu rumah dengan rumah yang lain berdempetan. Sehingga susah baginya untuk memelihara ternak. Meskipun menurut Pak Tas'an, ketika kandangnya jauh dari rumah, yang lebih aman adalah memelihara sapi. Namun uang ganti ruginya sudah hampir habis. Uang ganti rugi Pak Tas'an "*ga dibelikan*

sawah lagi, uangnya habis. Kalo yang tanah banyak, beli sawah lagi. Saya mah sedikit."

Dari tanah sawah 50 bata dan rumah yang dimilikinya, Pak Tas'an memperoleh uang ganti rugi sebesar 300 juta. Sawah dibayar 50 juta dan rumah dibayar 250 juta. Uang itu di antaranya untuk membeli motor anaknya yang laki-laki 35 juta, untuk membangun rumah anaknya perempuan yang sudah menikah 75 juta. Untuk merenovasi dapur habis 57 juta. Selain itu Pak Tas'an sempat membeli mesin usaha selep padi, yang akhirnya tidak terpakai. Selain itu juga membangun kandang dan membeli kambing, tapi kambingnya itu hilang. Karena semua rencana usahanya itu berakhir gagal, yang tersisa adalah uang untuk bertahan, dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Sekarang Pak Tas'an hanya menunggu waktu uangnya habis. Ia masih belum ada rencana ke depannya. Kesehariannya di rumah saja.

Menurut Pak Tas'an apa yang dialaminya itu juga dialami oleh para petani yang lain di Kawungsari, yang jumlahnya mayoritas. Dari 36 kepala keluarga di RT-nya hanya kurang dari 5 orang yang bekerja di luar pertanian. Yang terbanyak adalah petani yang juga mengalami apa yang ia alami, sehari-hari hanya di rumah. Jika jenuh kebanyakan dari mereka memancing id bendungan. *"Di situ mah punya kambing banyak, melak singkong, melak cau, segala, di situ. Di situ mah ga dekat rumah juga bebas. Di sini mah perum, miara ayam aja susah. Pas-pasan. Tambah susah. Pengeluaran terus."*

Selain kebutuhan makan, pengeluaran yang memberatkan petani adalah kebutuhan listrik dan air. Di desa yang lama, *"dulu listrik 20 ribu nyampe 4 minggu. Sedangkan listrik lima hari 50 ribu, token. Soalnya ga subsidi. Kadang ngisi 50 kadang 100. Sementara di sini juga sudah setahun, kerja engga kemana engga, punya uang sekarung juga habis pakai listrik."*

Adapun untuk kebutuhan air, Pak Tas'an menggunakan sumur bor. Namun, airnya terbatas. Tidak hujan seminggu saja, mesin pompa sudah tidak keluar air. Sementara yang paling berat adalah yang tinggal di sisi yang lebih tinggi. *"Yang di atas, biasanya beli terus. Satu tangki 150 ribu. Sampe buat 5 toren. Patungan. Dari PDAM. Katanya ganti solat aja. Kan ada torem gede, itu satu toren."*

Apa yang dikatakan oleh Pak Tas'an ini adalah konfirmasi dari apa yang sering diungkapkan oleh orang-orang lain yang peneliti temui. Semua hampir menyatakan bahwa sekarang semua orang banyak yang diam di rumah saja tanpa pekerjaan. Seperti yang diungkapkan oleh seorang penjaga warung di Kawungsari, "lebih enak dulu di desa lama, sekarang mah banyak yang nganggur, Pak".

B. Pembahasan dan Temuan

Pembangunan berbagai proyek strategis nasional (PSN) di berbagai wilayah Indonesia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proyek tersebut dianggap strategis sebab masyarakat membutuhkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Pemerintah mengambil kebijakan berupa penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Inpres tersebut dikeluarkan karena pemerintah ingin segera memberikan pemerataan pembangunan dan menyejahterakan rakyatnya.

Proyek strategis nasional (PSN) juga dibangun di Wilayah III Jawa Barat. Beberapa proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun di wilayah tersebut seperti Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Majalengka, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Cirebon, Kilang Pertamina RU-VI dan Petrokimia Balongan di Indramayu, dan bendungan kuning di Kuningan. Proyek-proyek

tersebut diunggulkan oleh diunggulkan oleh pemerintah dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Masyarakat berharap dengan dibangunnya berbagai proyek strategis nasional di Wilayah III Jawa Barat mampu mensejahterakan mereka.

Akan tetapi, proyek strategis nasional yang diunggulkan dan dinantikan tersebut telah menimbulkan krisis sosial-ekologis pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan. Masyarakat terdampak langsung di sekitar lokasi pembangunan proyek telah tereksklusi sosial. Eksklusi sosial yang dialami oleh masyarakat berupa diskriminasi berdasarkan pada tempat tinggal mereka. Mereka mengalami ketidakadilan sosial sebab, harus tergusur dari tempat tinggal dan kehilangan mata pencaharian hidupnya. Proyek strategis nasional yang dibangun di berbagai Wilayah III Jawa Barat memang betul mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Namun sebagian masyarakat yang tinggal di lokasi pembangunan proyek strategis nasional (PSN) malah mengalami krisis sosial ekologis sehingga tereksklusi sosial.

Mengacu pada Departement for International Development, (2005) disebutkan bahwa eksklusi sosial dapat disebabkan karena masyarakat/kelompok-kelompok tertentu secara sistematis dirugikan karena terdiskriminasi akibat tempat tinggal mereka. Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat mengalami krisis sosial-ekologis sehingga tereksklusi sosial. Masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi pembangunan proyek strategis nasional mengalami peningkatan kesejahteraan dan merasakan pemerataan pembangunan. Di sisi lain, masyarakat/kelompok yang tempat tinggalnya menjadi lokasi pembangunan proyek strategis nasional (PSN) malah mengalami kerugian. Kerugian yang dialami baik berupa material, non material, ekonomi, dan sosial. Masyarakat terdampak langsung pembangunan proyek strategis nasional tidak ikut merasakan peningkatan kesejahteraan dan tidak mengalami pemerataan pembangunan.

Temuan ini menegaskan pendapat dari Silver, (2012) bahwa masalah yang muncul pasca industri ialah terkait keadilan sosial. Pendapat dari Hilary silver tersebut terbukti bahwa pasca pembangunan proyek strategis nasional di Wilayah III Jawa Barat, masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi mengalami ketidakadilan.

Di aras mikro, ketidakadilan dialami oleh individu-individu. Pada aras ini, ekspresi eksklusi sosial yang dialami individu terdampak langsung di lokasi pembangunan proyek strategis nasional berupa kemiskinan. Contohnya, uang ganti rugi pembebasan lahan pembangunan proyek tersebut jumlahnya tidak cukup untuk membeli lahan baru. Selain itu, individu-individu kehilangan mata pencahariannya sebab lokasi yang dahulunya menjadi tempat mencari nafkah kini telah hilang. Sumber daya alam yang dulu mereka andalkan untuk mencari kebutuhan hidup telah rusak.

Di aras meso, eksklusi sosial terjadi pada kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang diuntungkan dari pembangunan proyek strategis nasional mengalami peningkatan ekonomi secara drastis. Sedangkan beberapa kelompok masyarakat yang lain hanya mendapatkan ampasnya saja. Contohnya, kompensasi ganti rugi yang seharusnya dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat terdampak pembangunan malah hanya dinikmati oleh segelintir kelompok yang memiliki kuasa modal.

Di aras Makro, eksklusi sosial terjadi pada konteks nasional. Negara yang seharusnya melindungi warga negaranya malah mendiskriminasi. Niat negara awalnya ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pada kenyataannya masyarakat yang tempat tinggalnya dijadikan proyek strategis nasional mengalami krisis sosial ekologis, sehingga tereksklusi sosial berupa ketidakadilan.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian tentang reorganisasi ruang kapital, pembangunan, dan krisis sosial ekologis di Wilayah III Jawa Barat memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan didalam penelitian ini merupakan hal yang wajar. Peneliti dalam melakukan penelitian ini berupaya semaksimal mungkin meminimalisir keterbatasan-keterbatasan yang ada.

Keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti selama penelitian berlangsung seperti pada saat pengumpulan data. Proses pengumpulan data dilakukan dibanyak lokasi dan melibatkan banyak informan. Banyaknya lokasi dan informan ini menyebabkan pembengkakan pada dana penelitian. Peneliti berusaha mengatasi keterbatasan penelitian ini dengan cara menghemat pengeluaran dan melakukan management keuangan dengan baik. Melalui strategi penghematan dan manajemen keuangan ini, keterbatasan penelitian pada tahap proses pengumpulan data dapat teratasi dengan baik

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Proyek strategis nasional (PSN) di Wilayah III Jawa Barat berdampak positif pada percepatan pembangunan nasional. Akan tetapi, pembangunan proyek strategis nasional ini cenderung neoliberalistik. Pembangunan terkesan lebih banyak menguntungkan investor. Pembangunan yang sedianya menguntungkan seluruh masyarakat malah merugikan sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar berdirinya proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Masyarakat terdampak langsung pembangunan proyek strategis nasional (PSN) mengalami krisis sosial-ekologi sehingga tereksklusi sosial berupa ketidakadilan.

B. Implikasi

Berdasarkan pada temuan penelitian ini, menunjukkan bahwa persoalan pembangunan proyek strategis nasional di Wilayah III Jawa Barat cenderung berpihak pada kapitalisme neoliberal yang mengabaikan kesejahteraan masyarakat terdampak. Kondisi ini berimplikasi pada terbuka lebarnya kajian bertema reorganisasi ruang kapital, pembangunan, dan krisis sosial-ekologis di berbagai wilayah sasaran proyek strategis nasional (PSN) di seluruh Indonesia. Sebab, penelitian sejenis belum banyak dilakukan.

Implikasi lain dari dilakukannya penelitian ini adalah kebijakan pembangunan proyek strategis nasional yang dilakukan oleh pemerintah selayaknya betul-betul memastikan masyarakat terdampak sejahtera. Kondisi ini perlu dipastikan agar pembangunan proyek strategis nasional di berbagai wilayah Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik.

C. Saran

1. Saran Akademik

Secara umum penelitian di Wilayah III Jawa Barat ini menyajikan analisis pada bidang sosiologi, antropologi, lingkungan dan pengembangan masyarakat. Secara khusus, diperoleh pemahaman bahwa proyek strategis nasional PSN yang dibangun di Wilayah III Jawa Barat seperti Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Majalengka, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Cirebon, Kilang Pertamina RU-VI dan Petrokimia Balongan di Indramayu, dan bendungan kuning di Kuningan menyebabkan reorganisasi ruang kapital, pembangunan, dan krisis sosial-ekologis. Lebih lanjut, disarankan penelitian mendatang mengkaji tiap-tiap proyek strategis nasional (PSN) lebih mendalam. Proyek strategis nasional di berbagai wilayah Indonesia masih dapat diteliti dari berbagai aspek. Masih banyak celah untuk dimanfaatkan sebagai penelitian lanjutan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian serupa.

2. Saran Praktis

Berdasarkan pada hasil penelitian, disarankan agar proyek strategis nasional di Wilayah III Jawa Barat mempertimbangkan aspek sosial-ekologis lebih dalam. Sebab, berdasarkan penelitian ini, dampak sosial ekologis yang terjadi pada masyarakat sangat nyata dirasakan. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus betul-betul menjamin keadilan di masyarakat. Masyarakat terdampak proyek strategis nasional harus dipastikan kesejahteraannya. Pembangunan yang dilaksanakan harus memastikan keberpihakannya pada masyarakat, tidak hanya pada berpihak pada kapitalisme neoliberal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adharani, Y. (2017). Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon). *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(1), 61–83. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a4>
- Akbar, W. (2016, August 30). Benteng Terakhir Sukamulya Melawan Gempuran Penggusuran. Cnn Indonesia.
- Alam, G. N., Maharani, R., Affandi, R. N., & Dermawan, W. (2021). PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF SEBAGAI PARADIPLOMASI KOTA METROPOLITAN SEOUL. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(01). <https://doi.org/10.36859/JDG.V6I01.463>
- Alvian, R. A., Putri, G. C., & Ardhani, I. (2018). Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi ‘Middle Power’ Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(2), 148–163. <https://doi.org/10.18196/hi.62112>
- Arifin Rivai, A. N., & Bastari, G. R. (2019). Paradoks Penerapan Good Governance Di Indonesia: Suatu Tinjauan Kritis Mp3Ei. *Jurnal Politik Profetik*, 7(2), 178–203. <https://doi.org/10.24252/profetik.v7i2a2>
- Astuti, W. R. D., & Fathun, L. M. (2020). Diplomasi Ekonomi Indonesia di dalam Rezim Ekonomi G20 pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(1), 47. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n1.4>
- Astuti, W. R. D., & Fathun, L. M. (2020). View of Indonesian Economic Diplomacy in the G20 Economic Regime during the Administration of Joko Widodo. *47Intermestic:Journal of International Studies*, 5(1), 47–68. <https://intermestic.unpad.ac.id/index.php/intermestic/article/view/223/63>
- Baidhawiy, Z. (2015). Kemiskinan dan Kritik Atas Globalisme Neo-Liberal. In LP2M IAIN Salatiga (Issue June).
- Barry, B. (2002). *Social Exclusion , Social Isolation and the Distribution of Income* (D. U. S. E. Hills, J., Le Grand, J. and Piachaud, Ed.; Issue August). Oxford University Press.
- Barth, F. (1969). *Ethnic Groups and Boundaries: The social organization of culture difference*. Allen & Unwin.

- Bose, Pablo S. "Dams, Development, and Displacement: The Narmada Valley Development Projects." In *Development's Displacements: Ecologies, Economies, and Cultures at Risk*, edited by Peter Vandergeest, Pablo S. Bose, and P. L. E. Idahosa. Vancouver: UBC Press, 2007.
- Brenner, N., & Theodore, N. (2007). Neoliberalism and the regulation of 'environment.' In N. Heynen, J. McCarthy, Scott, Prudham, & P. Robbins (Eds.), *Neoliberal Environments: False Promises and Unnatural Consequences* (pp. 153–160). Routledge.
- Brenner, Neil, and Nik Theodore. "Neoliberalism and the Regulation of "Environment." In *Neoliberal Environments: False Promises and Unnatural Consequences*, edited by Nik Heynen, James McCarthy, Scott Prudham, and Paul Robbins. London ; New York: Routledge, 2007.
- Cernea, M. M., & McDowell, C. (2000). *Risks and Reconstruction*. The World Bank. <https://doi.org/doi:10.1596/0-8213-4444-7>
- Conway, D., & Heynen, N. (Eds.). (2006). *Globalization's contradictions: geographies of discipline, destruction and transformation*. Routledge.
- Conway, D., & Heynen, N. (Eds.). (2017). *Globalization's Contradictions Geographies of discipline, destruction and transformation*. Routledge . <https://library.oapen.org/bitstream/id/0065c287-c73c-420a-880a-99874aba6d34/1005895.pdf>
- Conway, Dennis, and Nik Heynen. "Globalization's Dimensions." In *Globalization's Contradictions: Geographies of Discipline, Destruction and Transformation*, edited by Dennis Conway and Nik Heynen. London ; New York: Routledge, 2006.
- Craig, M. (2018). On "the other crisis": Diagnosing the socio-ecological crisis. In C. Hay & T. Hunt (Eds.), *The coming crisis. Building a Sustainable Political Economy: SPERI Research & Policy* (pp. 17–24). Palgrave Macmillan.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Departement for International Development. (2005). Reducing Poverty by Tackling Social Exclusion. In *Reducing poverty by tackling social exclusion*. Departement for International Development. <https://www2.ohchr.org/english/issues/development/docs/socialexclusion.pdf>
- Dewi, Arita. "Sejarah Kilang Minyak Pertamina Balongan." *Rri.Co.Id*. Last modified March 29, 2021. Accessed September 30, 2022. <https://rri.co.id/cirebon/1789-humaniora/1010117/sejarah-kilang-minyak-pertamina-balongan>.
- Dzulfaroh, A. N. (2021, April 1). Habiskan Dana Triliunan Rupiah, Mengapa Bandara Kertajati Sepi? Kompas.Com.

- Endraswara, S. (2006). *Metode Penelitian Kebudayaan* (Revised). Gajah Mada University Press.
- Erna & Sumaryono. (2020). Pengembangan Strategi Metropolitan Cirebon Raya (MCR) dalam Mengantisipasi Dampak Lingkungan. *Journal of Communication Sciences*, 2(2), 92-105
- Fadli, F. (2021). Renewable Energy Governance in Indonesia: A Study of Transparency and Participation in Yogyakarta. September. [https://flex.flinders.edu.au/file/7e172dec-c40b-4559-aaf1-16f61fbcec9e/1/10b.Thesis %28lib.pdf](https://flex.flinders.edu.au/file/7e172dec-c40b-4559-aaf1-16f61fbcec9e/1/10b.Thesis%28lib.pdf)
- Fahmi, A. R. A. (2009). HUKUM DAN KEPENTINGAN; TELAAH KRITIS ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM PERSPEKTIF UUD 1945 DAN HUKUM ISLAM. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Fathun, L. M. (2022). Peran Paradiplomacy dalam Presidensi G20 Indonesia: Studi Kasus Diplomasi Kota Jakarta pada Urban 20. *Indonesian Perspective*, 7(1), 57–78. <https://doi.org/10.14710/ip.v7i1.48595>
- Fungky, A. F. (2014). *Gambaran Kebisingan Dan Hearing Conservation Program Di Unit Ahu Pt. Pertamina (Persero) Refinery Unit Vi Balongan Indramayu Jawa Barat* [Universitas Sebelas Maret]. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/37479/Gambaran-Kebisingan-Dan-Hearing-Conservation-Program-Di-Unit-Ahu-Pt-Pertamina-Persero-Refinery-Unit-Vi-Balongan-Indramayu-Jawa-Barat>
- Hermanto, B. (2021). DAMPAK PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL KERTAJATI DALAM KAJIAN GREEN POLITICAL THEORY. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*, 5(2), 62–73.
- Heryuanita, A. (2016). *PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT BOCORNYA PIPA MINYAK OLEH PT PERTAMINA DI BALONGAN KOTA INDRAMAYU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP* [Universitas Pasundan]. <http://repository.unpas.ac.id/1810/>
- Heynen, N., McCarthy, J., Prudham, S., & Robbins, P. (Eds.). (2007). *Neoliberal environments: false promises and unnatural consequences*. Routledge. https://books.google.com/books/about/Neoliberal_Environments.html?hl=id&id=qI6SAgAAQBAJ
- Heynen, Nik, James McCarthy, Scott Prudham, and Paul Robbins. “Conclusion: Unnatural Consequences.” In *Neoliberal Environments: False Promises and Unnatural Consequences*, edited by Nik Heynen, James McCarthy, Scott Prudham, and Paul Robbins. London ; New York: Routledge, 2007.

- . “Introduction: False Promises.” In *Neoliberal Environments: False Promises and Unnatural Consequences*, edited by Nik Heynen, James McCarthy, Scott Prudham, and Paul Robbins. London ; New York: Routledge, 2007.
- Hickey, S., & du Toit, A. (2013). Adverse Incorporation, Social Exclusion, and Chronic Poverty. In S. A & B. J (Eds.), *Chronic Poverty Rethinking International Development Series* (Issue June). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137316707_7
- Huboyo, S. H. (2008). ANALISIS SEBARANG KEBISINGAN FASILITAS UTILITY PT. PERTAMINA (PERSERO) UP-VI BALONGAN INDRAMAYU. *Jurnal Presipitasi*, 5(2), 1–7.
- Imannulloh, E. R., & Rijal, N. K. (2022). Upaya Indonesia dalam Mendorong Prioritisasi Perekonomian Negara Berkembang melalui G20: Perspektif Hyper-Globalist | Imannulloh | Indonesian Perspective. *Indonesian Perspective*, 7(1), 79–101. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/48596/22117>
- Imannulloh, E. R., & Rijal, N. K. (2022). Upaya Indonesia dalam Mendorong Prioritisasi Perekonomian Negara Berkembang melalui G20: Perspektif Hyper-Globalist. *Indonesian Perspective*, 7(1), 79–101. <https://doi.org/10.14710/ip.v7i1.48596>
- Iqbal, D. (2017). *Proyek PLTU Unit II Cirebon Terus Berjalan, Ditengah Penolakan Masyarakat*.
- Kaika, Maria. *City of Flows: Modernity, Nature, and the City*. New York: Routledge, 2005.
- kemenperin.go.id. “Kemenperin: Investasi Industri Petrokimia Bakal Mengucur Deras.” Last modified August 2, 2019. Accessed September 30, 2022. <https://kemenperin.go.id/artikel/20903/Investasi-Industri-Petrokimia-Bakal-Mengucur-Deras>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2011). *Masterplan Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia 2011-2025* (Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ed.). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Kementerian Perhubungan. (2005). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun 2005 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat*. Kementerian Perhubungan.
- Kencana, Maulandy Rizky Bayu. “Buatan Anak Negeri, 2 Komponen Inti RDMP Balongan Pertamina Telah Tiba.” Last modified November 26, 2021. Accessed September 28, 2022. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4721816/buatan-anak-negeri-2-komponen-inti-rdmp-balongan-pertamina-telah-tiba>.
- Lestari, R.A, Fatimah, E., & Barus, L.S. (2017). Identifikasi Perkembangan Perkotaan Metropolitan Cirebon Raya. Seminar Nasional Cendikiawan ke 3, 199-205

- Liidakis, G. (2018). Capital, Economic Growth, and Socio-Ecological Crisis: A Critique of De-Growth. *International Critical Thought*, 8(1), 46–65. <https://doi.org/10.1080/21598282.2017.1357487>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: Putusan Nomor 124/G/LH/2016/PTUN-BDG*.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2016). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan*.
- Merrifield, A., & Swyngedouw, E. (1996). *The urbanization of injustice*. The University of Oxford, NYU Press.
- Merrifield, Andy, and Erik Swyngedouw. *The Urbanization of Injustice*. London: Lawrence & Wishart, 1996.
- Moento, P. A., Firman, F., & Yusuf, A. P. (2019). Good Governance Dalam Pemerintahan. *Musamus Journal of Public Administration*, 1(2), 10–16. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v1i2.1985>
- Muhaimin, Sugiharto, E., & Suratman, A. (2015). Air Pollution Simulation From Cirebon Power Plant Activity. *Eksakta: Jurnal Imu-Ilmu MIPA*, 15(1–2), 23–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/eksakta.vol15.iss1-2.art2>
- Prastya, D. (2019). Peran Media Massa Dalam Menyuarakan Kebijakan Orde Baru: Studi Kasus Harian Suara Karya 1971-1974. Repository.Uinjkt.Ac.Id. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50439>
- Pratiwi, A. (2021). KEBIJAKAN EKONOMI : PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK. 3(1), 1–14.
- Prianto, A. L. (2011). Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i1.11>
- REBANA METROPOLITAN a portfolio of new industrial area and city development in west java*. (n.d.). Retrieved December 20, 2022, from <https://investasi.jabarprov.go.id/public/file/Rebana%20Book%20V5%2027102020.pdf>
- Ridha, M. (2016). EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEPENTINGAN KAPITAL. *JURNAL POLITIK PROFETIK*, 4(1). <https://doi.org/10.24252/profetik.v4i1a4>

- Ridwanullah, Iwan, A., & Wattie, A. M. (2009). *Implementasi community development di Pertamina UP VI Balongan Indramayu* [Universitas Gajah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/41624>
- Rivai, A. N. A., & Bastari, G. R. (2019). PARADOKS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA: SUATU TINJAUAN KRITIS MP3EI. *Jurnal Politik Profetik*, 7(2), 178–203. <https://doi.org/10.24252/PROFETIK.V7I2A2>
- Rivai, A.N.A, and Bastari, G.R. (2021). Paradoks Penerapan Good Governance di Indonesia: Suatu Tinjauan Kritis MP3EI. *Jurnal Politik Profetik*, 7(2), 178-203
- Rochman, B. T. F. R., Meilina, C., Fajriati, C. E., Amalia, D. N., & Subhan, H. (2021). Analisis Ekologi Administrasi: Dampak Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Di Desa Putridalem Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2761–2768.
- Sari, N. M., & Kushardono, D. (2019). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Bandara Internasional Jawa Barat Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Melalui Citra Satelit Resolusi Tinggi. *Jurnal Geografi*, 11(2), 146–162. <https://doi.org/10.24114/jg.v11i2.13470>
- Silver, H. (2012). The Process of Social Exclusion: The Dynamics of an Evolving Concept. *SSRN Electronic Journal*, October. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1629282>
- Sirwanto. (2020). Kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Dampak Kedaulatan Bangsa. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(1), 84–103.
- Situmorang, M. (2015). Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 11(1). <https://doi.org/10.26593/JIHI.V11I1.1442>
- SUKAMDANI, N. B., WIDANINGSIH, T. T., & YANUAR, F. (2021). STRATEGY TO DEVELOP CITY BRANDING OF CIREBON CITY IN WEST JAVA. *International Conference On Community Development (ICCD)*, 3(1), 1–5. <https://doi.org/10.33068/ICCD.VOL3.ISS1.284>
- Suparno, B. A. (2012). Reformasi dan Jatuhnya Soeharto. In *Gastronomía ecuatoriana y turismo local*. (Vol. 1, Issue 69).
- Suryadi, Y., Chrysanti, A., Nurnadiati, F., Adityawan, M. B., & Kuntoro, A. A. (2018). Study on Water Resources Allocation for Kertajati, Jatitujuh, and Ligung Sub-Districts to Support the Development of West Java International Airport (BIJB) and Kertajati Aerocity Area. *The Third International Conference on Sustainable Infrastructure and Built Environment (SIBE 2017)*, 147, 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.1051/mateconf/201814703010>
- Susanthy, Renny, & Sudarmadji. (2008). *Kajian kemampuan pengolahan limbah cair PT Pertamina (Persero) UP VI Balongan terhadap pencemaran lingkungan pantai di*

- Balongan-Indramayu Jawa Barat* [Universitas Gadjah Mada].
http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/40607
- Swyngedouw, E. (1999). Modernity and Hybridity: Nature, Regeneracionismo, and the Production of the Spanish Waterscape, 1890–1930. *Annals of the Association of American Geographers*, 89(3), 443–465. <https://doi.org/10.1111/0004-5608.00157>
- Swyngedouw, Erik. “Modernity and Hybridity: Nature, Regeneracionismo, and the Production of the Spanish Waterscape, 1890–1930.” *Annals of the Association of American Geographers* 89, no. 3 (September 1999): 443–465.
- Syafarudin, A., & Mulyana, B. (2019). Formulation Strategy of PT Bandara Internasional Jawa Barat Bandung Indonesia, Kertajati in Business Aerocity (Aerotropolis). *International Review of Management and Marketing*, 9(3), 106–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.32479/irmm.8113>
- Syifa, A. (2017). Dampak Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Bagi Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Cirebon). *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(2), 25. <https://doi.org/10.24235/empower.v2i2.4636>
- Tilzey, M. (2016). Global Politics, Capitalism, Socio-Ecological Crisis, and Resistance: Exploring the Linkages and the Challenges. *Global Governance/Politics, Climate Justice & Agrarian/Social Justice: Linkages and Challenges*, February.
- Tjahjono, T., & Yuliawati, E. (2017). Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Potensi Kertajati Sebagai Aerocity. *Warta Ardhia*, 43(1), 43–50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25104/wa.v43i1.274.43-50>
- Touraine, A. (1991, February). Face a l’exclusion. *Esprit*, 2.
- Toussaint, E., & Millet, D. (2019). Mafia Bank Dunia & IMF : Alat Penjajahan Baru Negara Industri Terhadap Negara Berkembang Sejak Akhir Perang Dunia II. Ledalero.
- Toussaint, E., & Millet, D. (2019). *Mafia Bank Dunia: Alat Penjajahan Baru Negara Industri Terhadap Negara Berkembang Sejak Akhir Perang Dunia II* (A. Jebadu, Ed.). Penerbit Ledalero. <http://repository.stfkledalero.ac.id/id/eprint/249>
- Utomo, F & Pasha, J.A. (2020). Politik Etnosentris Semu Dalam Kasus Upaya Pemekaran Provinsi (Studi Pada Gerakan Pemekaran Provinsi Cirebon). *EMPOWER : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(1), 174-190
- Utomo, F., & Aldrin Pasha, J. (2020). Politik Etnosentris Semu Dalam Kasus Upaya Pemekaran Provinsi (Studi Pada Gerakan Pemekaran Provinsi Cirebon). *EMPOWER : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(1), 174–190. <http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/empower>

- Walcott, Susan M. "Multi-Local Global Corporations: New Reach – Same Core Locations." In *Globalization's Contradictions: Geographies of Discipline, Destruction and Transformation*, edited by Dennis Conway and Nik Heynen. London ; New York: Routledge, 2006.
- Wardani, A. K. (2017). Cirebon dan Indramayu Menggugat PLTU. *Tirto.Id*.
- Widiatmaja, A., & Albab, U. (2019). Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional. *Politica*, 10(1), 77-93
- Widiatmaja, A., & Albab, U. (2019). Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan [Indonesia under Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and Joko Widodo: Foreign Policy in the Middle of Regional Strategic Environment Dynamics]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10(1), 77–93. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politika/article/view/1313>
- Widiawaty, M. A., Nurhanifah, Ismail, A., & Dede, Moh. (2020). The The impact of Cirebon coal-fired power plants on water quality in Mundu Bay, Cirebon Regency. *Sustinere: Journal of Environment and Sustainability*, 4(3), 189–204. <https://doi.org/10.22515/sustinere.jes.v4i3.114>
- Widiawaty, M. A., Nurhanifah, Ismail, A., Artati, A. R. P., Ati, A., & Ramadhan, Y. R. (2020). Estimasi Perubahan Kualitas Udara Berbasis Citra Satelit Penginderaan Jauh Di Sekitar PLTU Cirebon. *Jambura Geoscience Review*, 2(2), 78–87. <https://doi.org/10.34312/jgeosrev.v2i2.5951>
- Wulandari, P. (2010). G20 dan Krisis Finansial Global. *Jurnal Isip*, 1, 49–56.
- Yanuardi, D., Swanvri, Muntaza, Novrian, D., Dahana, B. T., Mufakhir, A., Arifin, S., Manurung, K., Sitorus, H. P., Siagian, S., Frasetiandy, D., Fahrudin, M., Andika, & Kuswardono, T. (2014). *MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia / penulis, Dian Yanuardy [and thirteen others]; editor, Noer Fauzi Rachman, Dian Yanuardy* (N. F. Rachman & D. Yanuardy, Eds.). Tanah Air Beta.
- Yuliawati, E. (2016). Modal Share Dalam Demand Forecasting di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka. *Warta Ardhia*, 42(4), 173–184. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25104/wa.v42i4.247.173-184>
- Yunanto, S. E. (2020). Ilmu Pemerintahan: Anti Pada Politik, Lupa Pada Hukum, Dan Enggan Pada Administrasi. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 1(1), 1–23. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i1.77>